



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
PADANG

JALAN PERTANIAN SUNGAI LAREH, KELURAHAN LUBUK MINTURUN, PADANG 25175
TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.padang@kkp.go.id

Nomor : B.168/BPSPL.1/TU.210/I/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja
BPSPL Padang Tahun 2024

17 Januari 2025

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
di Jakarta Pusat

Dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang periode Tahun 2024 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Fajar Kurniawan

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN



LAPORAN KINERJA Tahun 2024

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG
2025



Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi mengenai capaian kinerja BPSPL Padang selama satu tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama dengan hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja BPSPL Padang kepada para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan sepanjang tahun 2024.

Di samping itu, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Kritik, masukan, dan saran sangat kami harapkan untuk memperbaiki kekurangan laporan ini. Atas perhatian dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang, 17 Januari 2025
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Fajar Kurniawan, S.T., M.AP., M.MG.

Ringkasan Eksekutif

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Padang secara proposional dan profesional berupaya mencapai hasil yang baik dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan pada setiap kegiatan dengan cara melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang disusun setiap triwulan. LKj Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2024 merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama periode tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai upaya dalam mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), BPSPL Padang menguraikan penjabaran visi misi yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Padang berpedoman pada sasaran strategis yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran 2024. Pada tahun 2024, terdapat sebelas sasaran strategis dan 22 Indikator Kinerja (IK) di lingkup BPSPL Padang dengan jangka waktu target bersifat triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Lebih lanjut, dilakukan pengukuran capaian kinerja yang dilakukan setiap triwulannya untuk memperoleh gambaran konkret terkait aspek ketercapaian kinerja secara kuantitatif. Adapun pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang periode tahun 2024 adalah **111,12 (kategori istimewa)**. Berikut disampaikan capaian masing-masing indikator kinerja BPSPL Padang tahun 2024:

1. Nilai PNBP BPSPL Padang dengan target Rp650.000.000,00 telah tercapai dengan perolehan PNBP sebesar Rp1.087.770.503,00 dengan persentase capaian 167,35% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 320 Orang telah tercapai dengan keterlibatan nelayan sejumlah 323 orang dengan persentase capaian 100,94%. Dari 323 orang nelayan Bulan Cinta Laut BPSPL Padang, 18 orang di antaranya (5,57%) berjenis kelamin perempuan.
3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 3 Dokumen telah tercapai sesuai target dengan persentase capaian 100%.
4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 3 Daerah telah tercapai melampaui target dengan pendampingan terhadap 6 provinsi dengan persentase capaian 200% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
5. Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 1 Kesepakatan telah tercapai melampaui target dengan 2 Kesepakatan dengan persentase capaian 200% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 3 Kelompok telah tercapai sesuai target dengan persentase capaian 100%.
7. Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru dengan target 30 orang telah tercapai melampaui target dengan capaian 45 orang dengan persentase capaian 150% atau 120% berdasarkan aplikasi

- Kinerjaku KKP. Dari 45 orang masyarakat yang difasilitasi pengembangan mata pencahariannya, 12 orang di antaranya (26,67%) berjenis kelamin perempuan.
8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 8 jenis telah tercapai melampaui target dengan capaian 11 jenis dengan persentase capaian 137,5% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
 9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 5 jenis telah tercapai melampaui target dengan capaian 8 jenis dengan persentase capaian 160% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
 10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 1 Dokumen telah tercapai sesuai target dengan persentase capaian 100%.
 11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 4 Kawasan telah tercapai sesuai target dengan persentase capaian 100%.
 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 93,76 telah tercapai dengan nilai 99,61 atau 106,25% dari target.
 13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Nilai) lingkup BPSPL Padang dengan target 71 telah tercapai dengan nilai 98,32 dengan persentase capaian 138,48% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
 14. Nilai Unit Kerja Berpredikat menuju WBK di BPSPL Padang dengan target 75 telah tercapai dengan capaian 90,40 dengan persentase capaian 120,53% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
 15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang dengan target 88 telah tercapai dengan capaian 92,85 dengan persentase capaian 105,51%.
 16. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang dengan target 81 telah tercapai dengan capaian 89,85 dengan persentase capaian 110,93%.
 17. Laporan SPIP yang Disusun lingkup BPSPL Padang telah mencapai 4 dokumen sesuai dengan targetnya dengan persentase capaian 100%.
 18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah mencapai 133,33% dari target 94% dengan persentase capaian 141,84% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
 19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan telah mencapai 100% dari target 80% dengan persentase capaian 125% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
 20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Padang telah mencapai 100% dari target 100% dengan persentase capaian 100%.
 21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang dengan target 80% telah tercapai 100% dengan persentase capaian 125% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
 22. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Padang dengan target 65 telah tercapai dengan capaian 83,78 dengan persentase capaian 128,89% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.

Berdasarkan uraian capaian tersebut, BPSPL Padang telah mencapai seluruh indikator kinerja tahun 2024 dengan persentase $\geq 100\%$. Pencapaian tersebut juga didukung dengan adanya alokasi **pagu anggaran sejumlah Rp17.622.716.000,00** (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 88,14% bersumber dari Rupiah Murni sementara 11,86% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Komposisi pagu anggaran tahun 2024 telah mengalami dinamika berupa blokir senilai Rp659.800.000,00 yang disebabkan adanya Rencana Desain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sehingga perlunya penyesuaian KRO yang kemudian dibuka pada Maret dan Juni 2024, penambahan

belanja pegawai sejumlah Rp717.856.000,00, dan blokir penghematan belanja perjalanan dinas senilai Rp98781.000,00 hingga akhir tahun anggaran. **Hingga triwulan IV 2024, realisasi anggaran mencapai Rp17.394.164.610,00** (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) **dengan persentase 98,7%.**

Upaya tindak lanjut dari rekomendasi triwulan sebelumnya telah diwujudkan melalui pendampingan pengusulan penetapan kawasan konservasi di Aceh, yaitu pada tahapan Rapat Persiapan Survei Biofisik, Survei Biofisik dan Sosial Ekonomi, *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Simeulue, dan Konsultasi Teknis. Sementara itu, untuk optimalisasi kinerja tahun 2025, langkah yang dapat dilakukan adalah dialog kinerja untuk membahas penjenjangan kinerja serta kegiatan yang terdampak oleh blokir anggaran.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel.....	xvii
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	1
1.3 Perkembangan Lingkungan Kerja Strategis.....	5
1.4 Sistematika Penyajian Laporan	9
II. Perencanaan Kinerja	10
2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	10
2.2 Postur Anggaran 2024	13
III. Akuntabilitas Kinerja.....	16
3.1. Capaian Kinerja	16
IKU. 1. Nilai PNPB BPSPL Padang (Rp.000)	19
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	19
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	19
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	19
D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unir Kerja Lain yang Setara di Kementerian	20
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	20
F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	20
H. Realisasi Anggaran.....	21
IKU. 2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Orang).....	22
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	22
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	22
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	22
D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian	23

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	23
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	23
H. Realisasi Anggaran.....	26
IKU. 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)	26
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	27
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	27
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	27
D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	28
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	28
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	28
H. Realisasi Anggaran.....	34
IKU. 4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah).....	34
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	35
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	35
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	35
D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	36
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	36
F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	37
H. Realisasi Anggaran.....	66
IKU. 5. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	66
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	67
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	67
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	67

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian	68
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	68
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	68
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	68
H. Realisasi Anggaran	70
IKU. 6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)	70
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	71
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	72
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	72
D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian	73
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	73
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	73
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	74
H. Realisasi Anggaran	76
IKU. 7. Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Kelompok)	76
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	76
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	77
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	77
D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian	77
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	78
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	78
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	78
H. Realisasi Anggaran	80
IKU. 8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	80
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	80

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	81
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	81
D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	81
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	82
F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	82
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	82
H. Realisasi Anggaran.....	109
IKU. 9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis).....	109
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	109
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	110
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	110
D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	111
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	111
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	111
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	111
H. Realisasi Anggaran.....	119
IKU. 10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)	120
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	120
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	120
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	121
D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	121
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	121
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	121
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	121
H. Realisasi Anggaran.....	127

IKU. 11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kawasan).....	128
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	128
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	128
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	128
D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	129
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	129
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	129
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	129
H. Realisasi Anggaran.....	132
IKM. 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	133
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	133
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	133
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	133
D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	134
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	134
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	134
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	135
H. Realisasi Anggaran.....	135
IKM. 13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	135
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	135
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	135
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	135
D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	136
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	136
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	136
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	136

H. Realisasi Anggaran.....	136
IKM. 14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)	136
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	137
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	137
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	137
D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	138
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	138
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	138
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	138
H. Realisasi Anggaran.....	142
IKM. 15. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks).....	142
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	143
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	143
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	143
D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	143
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	144
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	144
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	144
H. Realisasi Anggaran.....	144
IKM. 16. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang	144
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	145
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	145
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	145
D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	146
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	146
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	146

G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	146
H.	Realisasi Anggaran.....	147
IKM. 17.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen).....	148
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	148
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	148
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	148
D.	Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	149
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	149
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	149
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	149
H.	Realisasi Anggaran.....	149
IKM. 18.	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	149
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	150
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	150
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	150
D.	Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	151
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	151
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	151
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	151
H.	Realisasi Anggaran.....	151
IKM. 19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%).....	151
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	152
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	152
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	153
D.	Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	153

E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	153
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	154
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	154
H.	Realisasi Anggaran.....	154
IKM. 20.	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Padang (%).....	154
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	154
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	154
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	155
D.	Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	155
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	155
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	155
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	156
H.	Realisasi Anggaran.....	156
IKM. 21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang (%)	156
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	157
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	157
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	157
D.	Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	157
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	158
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	158
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	158
H.	Realisasi Anggaran.....	160
IKM. 22.	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	160
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	161
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	161
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	161



D.	Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian.....	162
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	162
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	162
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	162
H.	Realisasi Anggaran.....	162
3. 2.	Realisasi Anggaran.....	163
IV.	Penutup	165
4.1.	Kesimpulan.....	165
4.2.	Rekomendasi.....	166
A.	Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan III 2024	166
B.	Rekomendasi Triwulan I 2025.....	166
LAMPIRAN		167

Daftar Gambar

Gambar 1. Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2024.....	2
Gambar 2. Komposisi SDM BPSPL Padang.....	2
Gambar 3. Profil ASN di BPSPL Padang.....	3
Gambar 4. Sebaran Nama Jabatan Pegawai di BPSPL Padang.....	3
Gambar 5. Struktur Organisasi BPSPL Padang.....	4
Gambar 6. Analisis SWOT Lingkungan Strategis BPSPL Padang.....	9
Gambar 7. Dinamika Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Tahun 2024	10
Gambar 8. Dinamika Komposisi Pagu Anggaran BPSPL Padang Tahun 2024	14
Gambar 9. NKO BPSPL Padang Tahun 2024	16
Gambar 10. Realisasi Pendapatan PNBPN BPSPL Padang Tahun 2024	21
Gambar 11. Realisasi Penggunaan Dana PNBPN Tahun 2024 Lingkup BPSPL Padang	21
Gambar 12. Rangkuman Pelaksanaan Gerakan Bulan Cinta Laut di BPSPL Padang	24
Gambar 13. Timeline Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di BPSPL Padang	25
Gambar 14. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Padang	25
Gambar 15. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Batam	25
Gambar 16. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Tanjungpinang	26
Gambar 17. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kab. Deli Serdang	26
Gambar 18. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Kab. Karimun.....	29
Gambar 19. Rekapitulasi Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2024	30
Gambar 20. Rekapitulasi Penilaian Teknis Perizinan Kesesuaian Ruang Laut Tahun 2024	31
Gambar 21. Rekapitulasi Hasil Kepatuhan KKPRL	32
Gambar 22. Dokumentasi Rapat Persiapan Survei Biofisik Kawasan Konservasi Daerah Simeulue.....	38
Gambar 23. Dokumentasi Survei Biofisik dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Daerah Simeulue	39
Gambar 24. Dokumentasi Proses FGD Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Simeulue dengan Masyarakat Setempat	39
Gambar 25. Dokumentasi Proses FGD Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Simeulue di Internal Tim Penyusun.....	40
Gambar 26. Dokumentasi Konsultasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Daerah Simeulue	41
Gambar 27. Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Survei Kawasan Konservasi Kabupaten Nias Barat	42
Gambar 28. Survei Biofisik, Bioekologi dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan Sirombu.....	43
Gambar 29. Dokumentasi Rapat Pokja Zonasi KK Bintang Tambelan	47
Gambar 30. Dokumentasi Lokakarya Persiapan Perancangan Zonasi KK di Perairan Bintang Tambelan	48
Gambar 31. Rapat Konsultasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan	48
Gambar 32. Konsultasi Publik Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan	50
Gambar 33. Dokumentasi Rapat Pokja Evaluasi Hasil Konsultasi Publik I Perencanaan Zonasi Kawasan Konservasi Bintang Tambelan	51
Gambar 34. Dokumentasi Penyampaian serta Penyerahan Dokumen Zonasi Final Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan	52
Gambar 35. Dokumentasi Survei Pemetaan Partisipatif KKD Batam.....	53
Gambar 36. Dokumentasi FGD Pembentukan Pokja Kawasan Konservasi Rupert Utara	54
Gambar 37. Dokumentasi Survei dan Konsultasi Publik I Usulan Penetapan KK Rupert Utara.....	55
Gambar 38. Dokumentasi Evaluasi Teknis Penetapan KKD Rupert Utara.....	56
Gambar 39. Dokumentasi Konsultasi Publik II Kawasan Konservasi Rupert Utara	57
Gambar 40. Dokumentasi FGD Usulan Penetapan Kawasan Konservasi	58
Gambar 41. Dokumentasi Survei Biofisik dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	59
Gambar 42. Dokumentasi Pra Konsultasi Teknis Kawasan Konservasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	59
Gambar 43. Dokumentasi Rapat Pembahasan Awal Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi ..60	

Gambar 44. Dokumentasi Rapat Pembahasan Dokumen Awal Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi ke-2	61
Gambar 45. Dokumentasi Konsultasi Teknis Kawasan Konservasi Pulau Maspari	63
Gambar 46. Dokumentasi Konsultasi Publik Kawasan Konservasi Pulau Maspari	66
Gambar 47. Dokumentasi Pembahasan Draft PKS Bersama Tim Sekretariat DJPKRL	69
Gambar 48. Dokumentasi Penandatanganan PKS dengan FKP Universitas Syiah Kuala	69
Gambar 49. Dokumentasi Penandatanganan PKS dengan FPP Universitas Negeri Padang	70
Gambar 50. Dokumentasi Verifikasi Usulan Bantuan Konservasi Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang	74
Gambar 51. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang	75
Gambar 52. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving	75
Gambar 53. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok LEPA	76
Gambar 54. Dokumentasi Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir Mendukung Pengelolaan Ekowisata di Kawasan Konservasi Perairan	79
Gambar 55. Dokumentasi Bimbingan Teknis Penguatan Keberlanjutan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Budi Daya Rumput Laut	79
Gambar 56. Dokumentasi Supervisi Pendataan Sldat di Kabupaten Aceh Jaya	83
Gambar 57. Sidat Stadia Glass Eel yang Terdata di Aceh Jaya	83
Gambar 58. Dokumentasi Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Besar	84
Gambar 59. Hasil Tangkapan Sidat Stadia Glass Eel di Aceh Besar	85
Gambar 60. Hasil Pendataan Sldat Stadia Glass Eel di Aceh Besar	86
Gambar 61. Pendataan Sidat di Pesisir Selatan	87
Gambar 62. Sidat Stadia Glass Eel yang Terdata	87
Gambar 63. Dokumentasi Pendataan Teripang di Pulau Sipora, Kabupaten Kep. Mentawai	89
Gambar 64. Dokumentasi Pendataan Penyu di Kabupaten Kepulauan Mentawai	90
Gambar 65. Dokumentasi Pendataan Penyu di Pulau Salaut Besar	90
Gambar 66. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Aceh Barat Daya	91
Gambar 67. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Aceh Besar	92
Gambar 68. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Pesisir Selatan	93
Gambar 69. Dokumentasi Survei Identifikasi Lokasi Rehabilitasi Terumbu Karang di Pasaman Barat	94
Gambar 70. Dokumentasi Survei Identifikasi Lokasi Rehabilitasi Terumbu Karang di Bintang	94
Gambar 71. Dokumentasi Rehabilitasi Karang di Pesisir Selatan	95
Gambar 72. Dokumentasi Rehabilitasi Karang di Bintang	95
Gambar 73. Dokumentasi Supervisi Pendataan Belida di Kabupaten Tebo	96
Gambar 74. Belida yang Terdata di Kab. Tebo	96
Gambar 75. Dokumentasi Survei Sebaran Belida di Kabupaten Bungo	96
Gambar 76. Dokumentasi Belida yang Terdata di Kabupaten Bungo	97
Gambar 77. Dokumentasi Supervisi Pendataan Belida di Kabupaten Muara Enim	97
Gambar 78. Dokumentasi Belida yang Terdata di Muara Enim	97
Gambar 79. Belida yang Terdata di Kabupaten Ogan Ilir	98
Gambar 80. Belida yang Terdata di Kota Prabumulih	98
Gambar 81. Belida yang Terdata di Kabupaten Banyuasin	99
Gambar 82. Status Eksploitasi Perikanan Berdasarkan Nilai SPR	100
Gambar 83. Dokumentasi Supervisi Pendataan Terubuk di Labuhan Batu	100
Gambar 84. SPR Terubuk Labuhan Batu	100
Gambar 85. Dokumentasi Supervisi Pendataan Terubuk di Kabupaten Bengkalis	101
Gambar 86. SPR Terubuk Riau	101
Gambar 87. Dokumentasi Supervisi Pendataan Ikan Bilih di Danau Singkarak	102
Gambar 88. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Sarolangun	103
Gambar 89. Dokumentasi Survei Pendataan Arwana di Kab. Ogan Ilir	104
Gambar 90. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Muara Enim	105
Gambar 91. Dokumentasi Survei Pendataan Arwana di Kab. Musi Banyuasin	106

Gambar 92. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Rokan Hulu	106
Gambar 93. Jenis Biota Terdampar yang Ditangani Tahun 2024	107
Gambar 94. Lokasi Penanganan Jenis Ikan Terdampar Tahun 2024	107
Gambar 95. Dokumentasi Penanganan Jenis Ikan Terdampar	108
Gambar 96. Dokumentasi Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi di Kab. Muaro Jambi	108
Gambar 97. Dokumentasi Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi di Kab. Ogan Ilir	108
Gambar 98. Dokumentasi Sosialisasi Perlindungan Penyu di Kab. Bintan	109
Gambar 99. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPS Kutaraja Lampulo, Kota Banda Aceh	112
Gambar 100. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di Pelabuhan Labuhan Haji, Aceh Selatan	113
Gambar 101. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPI Ujung Serangga, Aceh Barat Daya	113
Gambar 102. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPN Sibolga	114
Gambar 103. Dokumentasi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Bengkalis	114
Gambar 104. Dokumentasi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Kepulauan Meranti	115
Gambar 105. Dokumentasi Pendataan Kuda Laut di Batam	116
Gambar 106. Dokumentasi Survei Pendataan Kuda Laut di Bintan	116
Gambar 107. Dokumentasi Pendataan Napoleon di Natuna	117
Gambar 108. Dokumentasi Pendataan Napoleon di Kab. Kepulauan Anambas	118
Gambar 109. Dokumentasi Pendataan Pemanfaatan Sidat di Kabupaten Agam	118
Gambar 110. Dokumentasi Identifikasi Pelaku Usaha Pemanfaatan ALSE di Kota Dumai	122
Gambar 111. Dokumentasi Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan ALSE di Dumai	123
Gambar 112. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang	123
Gambar 113. Rekapitulasi Sampah pada Gernas Bulan Cinta Laut di Wilker BPSPL Padang	130
Gambar 114. Rangkuman Gernas BCL di Wilayah Kerja BPSPL Padang	131
Gambar 115. Timeline Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di BPSPL Padang	131
Gambar 116. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Padang	132
Gambar 117. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Batam	132
Gambar 118. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Tanjungpinang	132
Gambar 119. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kab. Deli Serdang	132
Gambar 120. Pengusulan BPSPL Padang untuk Predikat Menuju WBK Tahun 2024	140
Gambar 121. Undangan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 di Lingkungan KKP	141
Gambar 122. Dokumentasi Penganugerahan Predikat Menuju WBK Tahun 2024	142
Gambar 123. Status Tindak Lanjut Hasil Pemantauan terhadap BPSPL Padang	152
Gambar 124. Dokumentasi Pemantauan terhadap Kelompok Banyu Biru	158
Gambar 125. Dokumentasi Pemantauan terhadap Pokmaswas Hiu Macan	159
Gambar 126. Dokumentasi Pemantauan terhadap Kelompok Poseidon Diver Mentawai	159
Gambar 127. Dokumentasi Pembahasan Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah lingkup DJPKRL TA 2023	160

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Versi Awal.....	10
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang yang Diukur Kinerjanya pada Tahun 2024	12
Tabel 3. Penambahan Indikator Kinerja Tahun 2024	13
Tabel 4. Rincian Klasifikasi Rincian Output yang Sempat Terdampak Blokir pada Awal Tahun	14
Tabel 5. Rincian Klasifikasi Rincian Output yang Terdampak Blokir Penghematan Belanja Perjalanan Dinas	15
Tabel 6. Rincian Capaian Kinerja BPSPL Padang pada Tahun 2024	16
Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1	19
Tabel 8. Perbandingan Capaian Nilai PNBPN dengan BPSPL Pontianak.....	20
Tabel 9. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 1	21
Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.....	22
Tabel 11. Perbandingan Capaian Tenaga Kerja Bulan Cinta Laut dengan BPSPL Pontianak	23
Tabel 12. Rincian Nelayan yang Terlibat dalam Gernas Bulan Cinta Laut.....	24
Tabel 13. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 2	26
Tabel 14. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.....	27
Tabel 15. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 3 BPSPL Padang.....	27
Tabel 16. Perbandingan Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut dengan BPSPL Pontianak	28
Tabel 17. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Laut yang Dihadiri BPSPL Padang	29
Tabel 18. Verifikasi Lapangan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2024	31
Tabel 19. Hasil Penilaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.....	32
Tabel 20. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKU 3	34
Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4.....	35
Tabel 22. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 4 BPSPL Padang.....	36
Tabel 23. Perbandingan Capaian Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Daerah dengan BPSPL Pontianak	36
Tabel 24. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 4	66
Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian IKU 5.....	67
Tabel 26. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 5 BPSPL Padang.....	67
Tabel 27. Perbandingan Capaian Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi dengan BPSPL Pontianak	68
Tabel 28. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 5	70
Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian IKU 6.....	71
Tabel 30. Penerima Bantuan Konservasi Tahun 2024	71
Tabel 31. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 6 BPSPL Padang.....	72
Tabel 32. Perbandingan Capaian Bantuan Konservasi yang Diserahkan dengan BPSPL Pontianak.....	73
Tabel 33. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 6	76
Tabel 34. Perbandingan Target dan Capaian IKU 7.....	76
Tabel 35. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 6 BPSPL Padang.....	77
Tabel 36. Perbandingan Capaian Fasilitas Pengembangan Mata Pencarian Baru dengan BPSPL Pontianak.....	78
Tabel 37. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 7	80
Tabel 38. Perbandingan Target dan Capaian IKU 8.....	80
Tabel 39. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 8 BPSPL Padang.....	81
Tabel 40. Perbandingan Capaian Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dengan BPSPL Pontianak.....	82
Tabel 41. Rekapitulasi Pendataan Sldat di Kabupaten Aceh Jaya	84
Tabel 42. Kepadatan Benih Sldat.....	87
Tabel 43. Hasil Survei Sebaran Teripang di Pulau Sipora.....	88
Tabel 44. Tabulasi Data Pendaratan Penyu di Desa Betumonga, Kab. Kep. Mentawai	90
Tabel 45. Tabulasi Data Pendaratan Penyu di Pulau Salaut Besar, Kab. Simeulue	91
Tabel 46. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 8	109
Tabel 47. Perbandingan Target dan Capaian IKU 9.....	110

Tabel 48. Rincian Target dalam RPJMN yang Berkaitan dengan IKU 9 BPSPL Padang	110
Tabel 49. Perbandingan Capaian Pengelolaan Jenis Ikan yang Dimanfaatkan dengan BPSPL Pontianak	111
Tabel 50. Rekapitulasi Pelayanan Jenis Tahun 2024.....	112
Tabel 51. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 9	120
Tabel 52. Perbandingan Target dan Capaian IKU 10.....	120
Tabel 53. Perbandingan Capaian Pemanfaatan ALSE yang Diidentifikasi dengan BPSPL Pontianak	121
Tabel 54. Rekapitulasi Verifikasi Teknis Dokumen Perizinan ALSE di Wilayah Kerja BPSPL Padang	124
Tabel 55. Subjek Hukum yang Dilakukan Verifikasi Lapangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan ALSE	124
Tabel 56. Realisasi Rincian Output Pendukung IKU 10	128
Tabel 57. Perbandingan Target dan Capaian IKU 11.....	128
Tabel 58. Rincian Target dalam RPJMN yang Berkaitan dengan IKU 11 BPSPL Padang	129
Tabel 59. Perbandingan Capaian Kawasan Pesisir yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran dengan BPSPL Pontianak	129
Tabel 60. Rincian Nelayan Gernas Bulan Cinta Laut yang Terverifikasi dan Tervalidasi.....	130
Tabel 61. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 11	133
Tabel 62. Perbandingan Target dan Capaian IKM 12	133
Tabel 63. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 12 BPSPL Padang	134
Tabel 64. Perbandingan Nilai IKPA dengan BPSPL Pontianak	134
Tabel 65. Perbandingan Komponen Penilaian IKPA	134
Tabel 66. Perbandingan Target dan Capaian IKM 13	135
Tabel 67. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan BPSPL Pontianak.....	136
Tabel 68. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14	137
Tabel 69. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 14 BPSPL Padang	138
Tabel 70. Perbandingan Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK dengan BPSPL Pontianak	138
Tabel 71. Hasil Penilaian Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada BPSPL Padang	139
Tabel 72. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 14	142
Tabel 73. Perbandingan Target dan Capaian IKM 15	143
Tabel 74. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 15 BPSPL Padang	143
Tabel 75. Perbandingan IP ASN dengan BPSPL Pontianak	143
Tabel 76. Perbandingan Penilaian Komponen IP ASN	144
Tabel 77. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 15	144
Tabel 78. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16	145
Tabel 79. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 16 BPSPL Padang	145
Tabel 80. Perbandingan Nilai PM SAKIP dengan BPSPL Pontianak.....	146
Tabel 81. Perbandingan Komponen Penilaian PM SAKIP	146
Tabel 82. Nilai AKIP BPSPL Padang 2024	147
Tabel 83. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKM 16	147
Tabel 84. Perbandingan Target dan Capaian IKM 17	148
Tabel 85. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 17 BPSPL Padang	148
Tabel 86. Perbandingan Laporan SPIP yang Disusun dengan BPSPL Pontianak	149
Tabel 87. Perbandingan Target dan Capaian IKM 18	150
Tabel 88. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 18 BPSPL Padang	150
Tabel 89. Perbandingan Persentase Penerapan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dengan BPSPL Pontianak	151
Tabel 90. Perbandingan Target dan Capaian IKM 19	152
Tabel 91. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Hingga Triwulan IV 2024	152
Tabel 92. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 19 BPSPL Padang	153
Tabel 93. Perbandingan Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti dengan BPSPL Pontianak	153
Tabel 94. Perbandingan Target dan Capaian IKM 20	154
Tabel 95. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 20 BPSPL Padang	155
Tabel 96. Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK dengan BPSPL Pontianak	155



Tabel 97. Perbandingan Target dan Capaian IKM 21	157
Tabel 98. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Bantuan Pemerintah dengan BPSPL Pontianak	157
Tabel 99. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 21	160
Tabel 100. Kriteria Nilai Pengawasan Kearsipan Internal.....	161
Tabel 101. Perbandingan Target dan Capaian IKM 21	161
Tabel 102. Perbandingan Capaian Nilai Pengawasan Internal Kearsipan dengan BPSPL Pontianak	162
Tabel 103. Perbandingan Penilaian Komponen Nilai Pengawasan Internal Kearsipan	162
Tabel 104. Realisasi Anggaran BPSPL Padang Hingga Triwulan IV 2024	163

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Padang secara proposional dan profesional berupaya mencapai hasil yang baik dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan pada setiap kegiatan dengan cara melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang disusun setiap triwulan. LKj Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2024 merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama periode tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam penyajiannya, laporan ini dilengkapi dengan hasil capaian target dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan BPSPL Padang yang berpedoman pada sasaran strategis yang diturunkan dalam bentuk Indikator Kinerja (IK). Adapun hasil capaian kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana, prasarana, dan anggaran pendukung kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan BPSPL Padang.

1.2 Tugas dan Fungsi

BPSPL Padang sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki peran dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) yang berorientasi menyukseskan rencana pembangunan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang termaktub dalam prioritas nasional yaitu lingkungan hidup, penanggulangan bencana yang dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil disertai penguasaan dan pengelolaan risiko. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir adalah:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
2. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
3. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
4. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetic ikan;
5. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
6. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
8. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
9. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BPSPL Padang memiliki wilayah kerja meliputi tujuh (7) Provinsi se-Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup 60 Kabupaten/Kota Pesisir se-Sumatera. Selain itu, BPSPL Padang juga memiliki kantor wilayah kerja/satuan kerja (Satker) dan gerai pelayanan di Medan, Tanjungpinang, Pekanbaru, Banda Aceh, Jambi, Palembang, dan Batam.



Gambar 1. Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2024

Total Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BPSPL Padang hingga triwulan IV 2024 dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi adalah 76 orang, yang terdiri dari 53 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 orang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), 3 orang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 15 orang berstatus sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP). Lebih lanjut, mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tim Kerja lingkup BPSPL Padang terdiri dari empat tim, meliputi Perlindungan dan Pelestarian, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut, dan Dukungan Manajemen.



Gambar 2. Komposisi SDM BPSPL Padang



Gambar 3. Profil ASN di BPSPL Padang



Gambar 4. Sebaran Nama Jabatan Pegawai di BPSPL Padang



Gambar 5. Struktur Organisasi BPSPL Padang

1.3 Perkembangan Lingkungan Kerja Strategis

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecilnya yang sangat potensial. Indonesia memiliki *megabiodiversity*, yang mencakup keanekaragaman genetic, spesies, dan ekosistem. Kondisi tersebut memberikan beragam manfaat melalui penyediaan jasa ekosistem, baik penyediaan makanan dan obat-obatan, sebagai penyangga kehidupan ekosistem, serta memberikan beragam manfaat ekonomi jika dikelola secara bijak. Pengelolaan yang bertanggung jawab memberikan *multiplier effect* yang akan mengantarkan pada kondisi lingkungan pesisir dan pulau kecil yang optimal sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketahanan pangan, berketahanan iklim dan meningkatkan kesejahteraan.

Wilayah kerja BPSPL Padang memiliki karakteristik perairan yang khas. Di bagian barat, khas dengan ekosistem pesisir yang dipengaruhi oleh dinamika perairan Samudera Hindia, sedangkan di bagian timur, khas dengan beragam tipe ekosistem yang dipengaruhi oleh kondisi perairan Selat Malaka. Kondisi tersebut memberikan beragam potensi keanekaragaman hayati yang melimpah. Berikut adalah beberapa potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah kerja BPSPL Padang:

- 1) Perencanaan Ruang Laut
Terdapat 5 RZWP3K yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dari total 7 provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang.
- 2) Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut
 - a. Terdapat luas kawasan konservasi perairan daerah sebesar 3.004.683,25 Ha di wilayah kerja BPSPL Padang yang perlu didorong pengelolaannya secara optimum;
 - b. Letak Indonesia yang berada di kawasan segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*), menjadikan Indonesia dipertimbangkan sebagai pusat keanekaragaman terumbu karang dunia. Sebanyak sekitar 569 jenis karang yang termasuk dalam 82 genus karang dijumpai di Indonesia. Berdasarkan kebijakan satu peta (*one map policy*) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011, dirilis bahwa luas terumbu karang di Indonesia berdasar analisis dari citra satelit adalah sekitar 2.517.858 Ha, dimana 19% atau sekitar 478.587 Ha diantaranya berada di Perairan Sumatera;
 - c. Terdapat 13 target kehati prioritas pengelolaan KKP di wilayah kerja BPSPL Padang meliputi: Penyu, Kuda Laut, Napoleon, Sidat, Teripang, Lola, Kima, Terubuk, Hiu, Pari dan mamalia laut (Paus, Dugong) serta Karang;
 - d. Keanekaragaman hayati endemik yang hanya dijumpai di selat Malaka, yaitu terubuk jenis *Tenualosa ilisha* yang salah satu habitat pentingnya ada di Labuhan Batu, dan jenis *Tenualosa macrura* yang ada di selat Bengkalis;
 - e. Keberadaan Penyu Belimbing di Betumonga yang merupakan salah satu jenis penyu langka di Wilayah Kerja BPSPL Padang;
 - f. Telah dilakukan upaya monitoring secara berkesinambungan melalui pendataan penyu belimbing di site betumonga (sejak tahun 2019), pendaratan Hiu dan Pari di Sibolga dan Aceh Selatan (sejak tahun 2019) serta Kuda Laut di Bintan (sejak tahun 2018);
 - g. Terdapat potensi kelompok penggerak konservasi dengan kegiatan berupa perlindungan jenis, kawasan dan ekosistem pesisir di wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 40 kelompok.
 - h. Pangsa pasar internasional produk hiu pari non appendiks CITES meliputi beberapa negara antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, China, Italia. Spanyol, hingga Meksiko.
- 3) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - a. Potensi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sejumlah 39 PPKT di wilayah kerja BPSPL Padang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017;

- b. Potensi luasan ekosistem mangrove di wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 810.171 Ha. Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, KLHK, tahun 2020, Indonesia memiliki areal seluas 3.329.219 Ha. 16,43% luasan mangrove nasional tersebut berada di wilayah kerja BPSPL Padang, atau seluas 547,022 Ha, yang tersebar di Provinsi Aceh (32.824 Ha), Provinsi Sumatera Utara (57.898 Ha), Provinsi Sumatera Barat (18.084 Ha), Provinsi Sumatera Selatan (158.845 Ha), Provinsi Jambi (10.082 Ha), Provinsi Riau (212.857 Ha), dan Kepulauan Riau (56.432 Ha). Provinsi Riau merupakan Provinsi yang memiliki luasan mangrove terluas di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu 38,91%, sedangkan Provinsi terendah luasannya adalah Provinsi Jambi yang hanya sebesar 1,84%.
- c. Terdapat potensi kelompok pegiat mangrove di pesisir wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 49 Kelompok.

4) Pemanfaatan Jasa Kelautan

- a. Potensi petambak garam tradisional di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireun Provinsi Aceh;
- b. Potensi distributor dan pengolah garam di Kab. Bireun yang telah berstandar nasional dengan jangkauan pasar regional;
- c. Terdapat potensi jenis biota yang dapat dimanfaatkan sebagai produk biofarmakologi berupa rumput laut, kuda laut dan teripang;
- d. Kawasan pesisir di Sibolga termasuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Sibolga dan sekitarnya yang dapat didukung pengembangannya melalui Desa Wisata

Seiring dengan perkembangannya, potensi yang dimiliki tersebut dapat menghasilkan tantangan dan permasalahan dalam pengelolaannya. Pada saat ini, BPSPL Padang memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui berbagai program dan kegiatan. Sebagian tantangan tersebut adalah program dan kegiatan yang belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan sebagiannya lagi adalah tantangan terhadap dinamika kebijakan program pembangunan yang semakin kompleks. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- 1) Banyaknya kepentingan yang memanfaatkan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya di dalamnya. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan yang kurang memperhatikan daya tampung dan daya dukungnya. Tarik menarik antar beragam kepentingan terhadap ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil menyebabkan beberapa provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang, menjadi terkendala dalam upaya pengesahan ranperda RZWP3K nya, yang diharapkan mampu menjadi alat pengendalian pemanfaatan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Dalam rentang waktu 2015–2020, dari 7 Provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang, 2 di antaranya masih belum dapat disahkan menjadi produk hukum sehingga perlu program akselerasi dan pendampingan yang lebih intensif, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tantangan secara lebih spesifik, adalah penyelesaian potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang laut diselesaikan melalui Penyusunan rencana zonasi antara kawasan (RZ KAW), rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ-KSNT);
- 2) Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebabkan perubahan tata Kelola terkait pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satunya adalah amanat untuk mengintegrasikan RTRW dan RZWP3K menjadi satu produk hukum tata ruang sebagai rujukan pemanfaatan ruang dan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses integrasi tersebut menjadi tantangan untuk dapat diselesaikan melalui program dan kegiatan akselerasi dan pendampingan penyusunannya. Proses integrasi tersebut merupakan suatu terobosan penting dalam melihat ruang perairan dan darat dalam satu persepektif integratif dan holistik. Namun demikian ada banyak penyesuaian substansi dan administrasi sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang berkualitas, memenuhi kaidah keberlanjutan dan partisipasi masyarakat;

- 3) Pemanfaatan ruang laut dan potensi sumber daya di dalamnya perlu dikelola melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan mengikuti koridor keberlanjutan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang laut yang disusun. Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan dengan program dan kegiatan operasionalisasi permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL);
- 4) Dalam rangka memenuhi Aichi Target yang memandatkan perlunya melakukan konservasi seluas 10% dari luas perairan, pesisir dan pulau kecil atau sekitar 32,5 juta Ha. Di wilayah kerja BPSPL Padang, kawasan konservasi perairan ada di semua Provinsi namun pengelolaannya belum efektif termasuk di dalamnya adalah upaya peningkatan status perlindungan kawasan konservasi yang baru pada status pencadangan dan belum ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana luasan kawasan konservasi yang akan dicapai dapat berjalan beriringan dengan efektivitas pengelolaannya sehingga keberadaan kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan peningkatan kesejahteraan serta nilai ekonomi kawasan. Salah satu program dan kegiatan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplimentasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- 5) Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi. Tantangan selanjutnya adalah terkait adanya rencana pelimpahan kewenangan/managemen authorities untuk jenis ikan bersirip (pisces) dari KLHK kepada KKP. Terkait hal itu, maka UPT diharapkan mampu menyelenggarakan issue perdagangan jenis ikan yang sebelumnya dikelola oleh KLHK, dimana di dalamnya mencakup perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Salah satu dari jenis ikan tersebut adalah ikan Arwana, dimana komoditas tersebut termasuk banyak diperdagangkan di Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan;
- 6) Wilayah kerja BPSPL Padang, memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, meliputi kuda laut, teripang, lola, kima, hiu-pari, mamalia laut, napoleon, dugong, penyu, sidat, terumbu karang, terubuk, ikan purba, dan beragam jenis kehati lainnya. Keberadaannya semakin terancam akibat semakin meningkatnya tekanan habitat di alam oleh aktivitas antropogenik meliputi over-eksploitasi, *bycatch*, *spesies invasive*, kerusakan habitat, dan lain sebagainya. Permasalahan ini mendorong perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengelolaan kehati agar dapat terjaga habitat dan keanekaragaman hayati di dalamnya sesuai dengan kerangka rencana aksi dari masing-masing keanekaragaman hayati prioritas pengelolaan. Kondisi tersebut diperparah dengan asih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat;
- 7) Meningkatnya dampak negatif adanya fenomena perubahan iklim menyebabkan permasalahan ketahanan pesisir, diantaranya adalah ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir serta kerusakan ekosistem terumbu karang akibat adanya *coral bleaching*. Hal ini dilakukan melalui rehabilitasi pesisir dengan program dan kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai serta

penguatan ketahanan sosial masyarakat pesisir melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan ekosistem mangrove. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi upaya mitigasi dan adaptasi terhadap adanya fenomena perubahan iklim di pesisir dan pulau-pulau kecil;

- 8) Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu jalur transportasi laut yang cukup padat. Kondisi tersebut membawa dampak terjadinya peningkatan pencemaran pesisir dan laut dengan meningkatnya intensitas kejadian tumpahan minyak. Kondisi tersebut mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati dan habitatnya. Sehingga perlu adanya program dan kegiatan yang dapat menjawab tantangan dari permasalahan tersebut;
- 9) Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem. BPSPL Padang telah diberikan mandat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penatakelolaan dan pendayagunaan PPKT agar menjadi objek dan asset pembangunan yang bernilai strategis untuk meningkatkan daya guna lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara. Dari 111 PPKT, 39 PPKT berada di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu 7 PPKT di Provinsi Aceh, 3 PPKT di Provinsi Sumatera Utara, 3 PPKT di Provinsi Sumatera Barat, 22 PPKT di Provinsi Kepri, dan 4 PPKT di Provinsi Riau.
- 10) pemanfaatan ekonomi kelautan seperti pengelolaan produksi garam yang belum optimal. Sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu pemanfaatan ekonomi kelautan lainnya seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari perlu ditingkatkan kualitas pengelolaannya serta jasa kelautan terkait lainnya

Lebih lanjut, pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal, yang tercantum dalam analisis *strength, weakness, opportunities, threat* (SWOT) berikut ini.



Gambar 6. Analisis SWOT Lingkungan Strategis BPSPL Padang

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk menginformasikan capaian kinerja tahun 2024. Adapun capaian kinerja tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum terkait BPSPL Padang beserta perkembangan lingkungan kerja strategis.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan uraian rencana strategis berisi visi dan misi organisasi serta perjanjian kinerja BPSPL Padang tahun 2024.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja organisasi beserta analisis-analisis pendukungnya.
4. **Bab IV Penutup**, menyajikan simpulan umum serta langkah-langkah strategis pada masa mendatang.
5. **Lampiran**, melampirkan data-data pendukung laporan.

II. Perencanaan Kinerja

2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), BPSPL Padang memiliki tugas-tugas yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan Tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Padang berpedoman pada sasaran kegiatan yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran. Dalam perkembangannya, pada tahun 2024 ini terdapat sebelas (11) sasaran kegiatan dan 22 indikator kinerja yang dimandatkan kepada BPSPL Padang yang mengalami dinamika perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana diilustrasikan sebagai berikut.



Gambar 7. Dinamika Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Tahun 2024

Tabel berikut menjelaskan rincian indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja BPSPL Padang versi awal yang disahkan pada 25 Januari 2024. Secara lengkap, dokumen Perjanjian Kinerja BPSPL Padang secara lengkap tersajikan pada Lampiran 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Versi Awal

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya nilai PNB BPSPL Padang	1	Nilai PNB BPSPL Padang (Rp.000)	650.000
2	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang	2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	320
3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang	3	Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	3

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan Kawasan konservasi di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	4 Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Daerah)	3
5	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerja sama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja BPSPL Padang	5 Kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
6	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	6 Bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Padang (Kelompok)	3
		7 Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Kelompok)	1
7	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	8 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	8
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang	9 Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
9	Terfasilitasinya pemanfaatan Air Laut Selain Energi di wilayah kerja BPSPL Padang	10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang	1
10	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	4
11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Padang	12 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang (nilai)	93,76
		13 Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang (nilai)	86
		14 Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Padang (Nilai)	75
		15 Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang (indeks)	88
		16 Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (nilai)	81
		17 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		18 Persentase unit kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		19 Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Padang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		21 Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	80
		22 Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Padang (Nilai)	65

Dalam perkembangannya, terdapat arahan untuk revisi Perjanjian Kinerja tentang Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran. Mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024 hal Revisi Target dan Manual IKU NKA KKP TA. 2024, terdapat perubahan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran beserta targetnya, yaitu menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan target 71. Perjanjian Kinerja hasil penyesuaian tersebut

disahkan pada 14 Oktober 2024. Kemudian, kembali terdapat penyesuaian pada Perjanjian Kinerja yang disebabkan adanya penambahan anggaran belanja pegawai yang kemudian disahkan pada 30 Desember 2024. Berikut dilampirkan rincian indikator kinerja BPSPL Padang yang diukur pada tahun 2024.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang yang Diukur Kinerjanya pada Tahun 2024

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya nilai PNBP BPSPL Padang	1	Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)	650.000
2	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang	2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	320
3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang	3	Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	3
4	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan Kawasan konservasi di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	4	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Daerah)	3
5	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerja sama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja BPSPL Padang	5	Kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
6	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	6	Bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Padang (Kelompok)	3
		7	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang)	30
7	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	8	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	8
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang	9	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
9	Terfasilitasinya pemanfaatan Air Laut Selain Energi di wilayah kerja BPSPL Padang	10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang	1
10	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	4
11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Padang	12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang (nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPSPL Padang (nilai)	71
		14	Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Padang (Nilai)	75
		15	Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang (indeks)	88
		16	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (nilai)	81
		17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		18	Persentase unit kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		19 Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Padang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		21 Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	80
		22 Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Padang (Nilai)	65

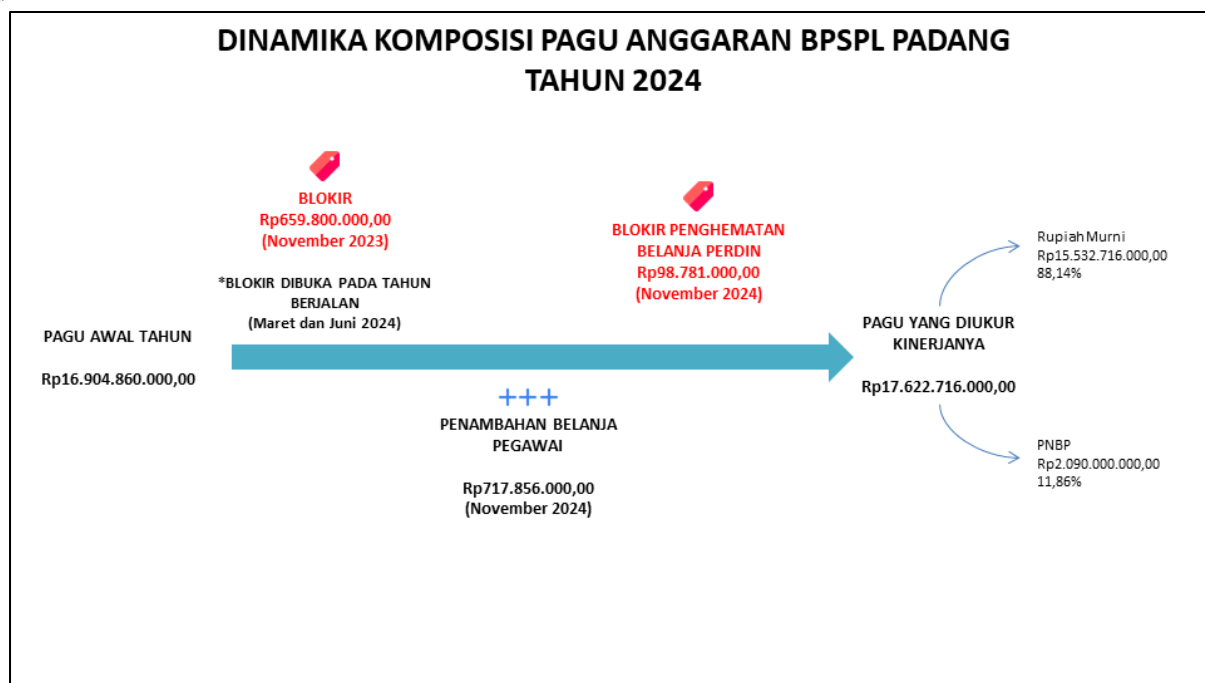
Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu, terdapat enam belas indikator kinerja 2024 yang digunakan dalam pengukuran kinerja tahun 2023. Ditinjau dari komposisinya, pada tahun 2024 ini terdapat penambahan beberapa indikator kinerja baru. Penambahan indikator kinerja tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Penambahan Indikator Kinerja Tahun 2024

Nomor	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	Indikator Kinerja baru yang tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023
2	Kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 namun tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023
3	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Kelompok)	Indikator Kinerja yang sempat terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 namun berakhir tidak diukur pada periode tersebut karena anggaran pendukungnya terblokir hingga akhir tahun
4	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang	Indikator Kinerja baru yang tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023
5	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	Indikator Kinerja yang sempat terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 namun berakhir tidak diukur pada periode tersebut karena anggaran pendukungnya terblokir hingga akhir tahun
6	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Padang (Nilai)	Indikator Kinerja baru yang tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023

2.2 Postur Anggaran 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian target-target kinerja, pada tahun 2024 ini BPSPL Padang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA 032.07.2.499346/2024 sebesar **Rp17.622.716.000,00** (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 88,14% bersumber dari Rupiah Murni sementara 11,86% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pagu anggaran tersebut telah mengalami dinamika blokir dan penambahan anggaran pada tahun anggaran 2024.



Gambar 8. Dinamika Komposisi Pagu Anggaran BPSPL Padang Tahun 2024

Saat pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 tanggal 24 November 2023, terdapat blokir anggaran senilai Rp659.800.000,00 pada tiga Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang disebabkan adanya Rencana Desain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sehingga perlunya penyesuaian KRO. Dalam perkembangannya, telah dibuka blokir pada KRO [2367.CAN] Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi senilai Rp172.800.000,00 yang bersumber dari PNB dalam pengesahan Rincian Kerja dan Anggaran Revisi ke-4 tanggal 28 Maret 2024. Perkembangan tersebut menyisakan blokir pada dua KRO, yaitu [2362.REA] Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem dan [2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies karena memerlukan persetujuan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, dilaksanakan penelaahan usulan revisi buka blokir BPSPL Padang yang mengacu pada Surat a.n Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan Nomor UND-83/AG.3/AG.31/2024 tanggal 19 Juni 2024. Hasil penelaahan tersebut menghasilkan disetujuinya usulan pembukaan blokir kedua KRO yang terdampak blokir dalam Rincian Kerja dan Anggaran revisi ke-7 tanggal 20 Juni 2024.

Tabel 4. Rincian Klasifikasi Rincian Output yang Sempat Terdampak Blokir pada Awal Tahun

No	Klasifikasi Rincian Output	Total Blokir		Status
		Sumber Dana Rupiah Murni (Rp)	Sumber Dana PNB (Rp)	
1	[2362.REA] Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	100.000.000,00	100.000.000,00	Buka blokir yang disahkan dalam Rincian Kerja dan Anggaran Revisi ke-7 tanggal 20 Juni 2024 dengan perubahan Klasifikasi Rincian Output menjadi [2362.SCC] Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan
2	[2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies	-	172.800.000,00	Buka blokir yang disahkan dalam Rincian Kerja dan Anggaran Revisi ke-7 tanggal 20 Juni 2024 dengan perubahan Klasifikasi Rincian Output [2362.RAL]

No	Klasifikasi Rincian Output	Total Blokir		Status
		Sumber Dana Rupiah Murni (Rp)	Sumber Dana PNBPNP (Rp)	
				Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
3	[2367.CAN] Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	287.000.000,00	Buka blokir yang disahkan dalam Rincian Kerja dan Anggaran Revisi ke-4 tanggal 28 Maret 2024

Dalam perkembangannya, BPSPL Padang mengajukan Usulan Tambahan Belanja Pegawai sebesar Rp694.469.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) melalui Surat Kepala BPSPL Padang Nomor B.2240/BPSPL.1/RC.210/IX/2024 tanggal 23 September 2024. Usulan tersebut kemudian diproses dengan penambahan belanja pegawai senilai Rp717.856.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menyebabkan perubahan pagu anggaran yang semula Rp16.904.860.000,00 (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp17.622.716.000,00 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang mana disahkan dalam Rincian Kerja dan Anggaran Revisi ke-11 tanggal 14 November 2024.

Sementara itu, mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, BPSPL Padang melakukan penghematan sejumlah Rp98.781.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah). Adapun penghematan ini berupa blokir yang tidak mempengaruhi pagu anggaran yang tercantum pada Rincian Kerja dan Anggaran tahun 2024.

Tabel 5. Rincian Klasifikasi Rincian Output yang Terdamak Blokir Penghematan Belanja Perjalanan Dinas

No	Klasifikasi Rincian Output	Blokir (Rp)	Status
1	[2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies	37.171.000,00	Blokir Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas
2	[2362.UBA] Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	14.040.000,00	
3	[2366.PBT] Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	40.460.000,00	
4	[2367.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.308.000,00	
5	[2367.EBC] Layanan Manajemen SDM Internal	1.644.000,00	
6	[2367.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal	4.158.000,00	
Total		98.781.000,00	

III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Padang dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Adapun pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang periode tahun 2024 adalah **111,12 (kategori istimewa)**.



Gambar 9. NKO BPSPL Padang Tahun 2024

Pada tahun 2024 ini, Perjanjian Kinerja BPSPL Padang terdiri dari sebelas (11) sasaran strategis dan 22 indikator kinerja dengan periode capaian triwulanan, semesteran, dan tahunan. Sementara itu, rincian target dan capaian kinerja BPSPL Padang pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Rincian Capaian Kinerja BPSPL Padang pada Tahun 2024

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERIODE PENGUKURAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya nilai PNBP BPSPL Padang	1 Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)	Tahunan	650.000	1.087.770,503	167,35 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP
2	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang	2 Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	Tahunan	320	323	100,94
3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang	3 Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	Tahunan	3	3	100
4	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan Kawasan konservasi di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	4 Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Daerah)	Tahunan	3	6	200 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP
5	Meningkatnya pelaksanaan konvensi	5 Kerjasama konservasi yang diinisiasi di	Tahunan	1	2	200 atau 120 berdasarkan

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERIODE PENGUKURAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	PERSENTASE CAPAIAN
	dan kontribusi kerja sama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja BPSPL Padang	wilayah kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)				aplikasi Kinerja KKP
6	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	6 Bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Padang (Kelompok)	Triwulanan	3	3	100
		7 Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang)	Tahunan	30	45	150 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerja KKP
7	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	8 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	Tahunan	8	11	137,5 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerja KKP
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang	9 Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	Tahunan	5	8	160 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerja KKP
9	Terfasilitasinya pemanfaatan Air Laut Selain Energi di wilayah kerja BPSPL Padang	10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	Tahunan	1	1	100
10	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	Tahunan	4	4	100
11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Padang	12 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang (nilai)	Semesteran	93,76	99,61	106,24
		13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Padang (nilai)	Tahunan	71	98,32	138,48 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerja KKP
		14 Nilai unit kerja berpredikat menuju	Tahunan	75	90,40	120,53 atau 120 berdasarkan

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERIODE PENGUKURAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	PERSENTASE CAPAIAN
		WBK di wilayah kerja BPSPL Padang (Nilai)				aplikasi Kinerjaku KKP
		15 Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang (indeks)	Semesteran	88	92,85	105,51
		16 Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (nilai)	Tahunan	81	89,85	110,93
		17 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	Triwulanan	4	4	100
		18 Persentase unit kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Triwulanan	94	133,33	141,84 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP
		19 Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Padang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Triwulanan	80	100	125 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP
		20 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)	Tahunan	100	100	100
		21 Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	Tahunan	80	100	125 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP
		22 Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Padang (Nilai)	Tahunan	65	83,78	128,89 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP

IKU. 1. Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Padang adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, meliputi Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, pengelolaan BMN, denda dan lain-lain.

$$PNBP_{BPSPL\ Padang} = PNBP_{Layanan} + PNBP_{BMN} + PNBP_{Lainnya}$$

$PNBP_{Layanan}$: Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya dan Jasa Kelautan dan Perikanan.

$PNBP_{BMN}$: Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

$PNBP_{Lainnya}$: Nilai PNBP yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKU 1 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1

IKU 1. Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)				
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
958.877,695	650.000	1.087.770,503	167,35 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerja KKP	13,44

Pada tahun 2024, capaian IKU ini adalah Rp1087.770.503,00 dengan persentase capaian 167,35% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerja KKP. Capaian IKU ini didukung oleh perolehan PNBP yang berasal dari pendapatan perizinan, pengelolaan Barang Milik Negara, dan Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hQdJixKocpxQmuVldrZJrJke0hzKz6k>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat 13,44% kenaikan. Adapun peningkatan ini dipengaruhi oleh perbedaan tipe perolehan PNBP yang dihitung pada setiap tahunnya. Pada tahun 2023, PNBP yang diukur sebagai capaian kinerja merupakan PNBP fungsional yang bersumber dari kegiatan pelayanan pemanfaatan jenis ikan di wilayah kerja BPSPL Padang. Sementara itu, pada tahun 2024 perolehan PNBP yang dihitung sebagai capaian kinerja merupakan total keseluruhan PNBP yang diterima BPSPL Padang.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator nilai PNBP tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unir Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Nilai PNBP juga tidak termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

Sementara itu, perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Nilai PNBP dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai PNBP (Rp.000)	650.000	1.087.770,503	2.000.000	2.421.607, 418

Ditinjau dari capaian Nilai PNBP kedua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak telah mencapai target nilai PNBP masing-masing. Di sisi lain, realisasi PNBP BPSPL Padang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi BPSPL Pontianak. Hal tersebut dipengaruhi dengan potensi pemanfaatan jenis ikan yang berbeda di masing-masing unit kerja. Dalam hal ini, BPSPL Pontianak memiliki potensi pemanfaatan jenis ikan yang lebih tinggi dengan jumlah penerbitan dokumen layanan yang lebih banyak.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKU ini didukung dengan penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pengelola PNBP. Aplikasi yang digunakan dalam PNBP layanan, yaitu e-SAJI dan SIMPONI, dapat mempermudah proses pemungutan PNBP dan mempersingkat waktu pelayanan. Namun, ada kalanya aplikasi-aplikasi tersebut mengalami gangguan atau *maintenance*. Maka dari itu, menghadapi kemungkinan tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP BPSPL Padang mengantisipasi risiko tersebut dengan menyiapkan format pencatatan dan penghitungan PNBP secara manual.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi yang didukung oleh penggunaan aplikasi e-SAJI, e-Sultan's, dan SIMPONI. Aplikasi e-SAJI merupakan aplikasi untuk memproses layanan perizinan rekomendasi dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) untuk jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES. Sementara itu, e-Sultan's merupakan platform yang dikelola oleh BPSPL Padang untuk optimalisasi layanan yang belum terakomodir pada aplikasi e-SAJI, yaitu permohonan Berita Acara Verifikasi Lapang (BAVL) Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), permohonan pemeriksaan keberangkatan/kedatangan SAJI, permohonan Berita Acara Pemeriksaan Stok, dan permohonan Berita Acara Kematian Ikan Arwana. Terakhir, aplikasi SIMPONI juga mendukung proses layanan dalam penerbitan billing PNBP. Adanya aplikasi tersebut dapat menunjang pelaksanaan layanan hingga pemungutan PNBP secara tersistem.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Perolehan PNBP Tahun 2024

Perolehan PNBP Tahun 2024 disajikan pada gambar berikut.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	411121 Pendapatan PPh Pasal 21	0	0	0	0	0	0	0
2	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	325,215	0	0	3,926,596	0	4,253,811
3	425259 Pendapatan Perizinan Lainnya	0	274,185,000	0	0	0	(405,000)	273,780,000
4	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	425,500	0	0	0	0	425,500
5	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	187,832,107	0	0	0	0	187,832,107
6	425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	621,479,085	0	0	0	0	621,479,085
GRAND TOTAL		0	1,084,246,907	0	0	3,926,596	(405,000)	1,087,770,503

Gambar 10. Realisasi Pendapatan PNPB BPSPL Padang Tahun 2024

Sumber: Aplikasi OM-SPAN, Januari 2025

2. Penggunaan Dana PNPB di BPSPL Padang

Pada tahun 2024, terdapat proporsi pagu anggaran BPSPL Padang yang bersumber dari PNPB sebesar Rp2.090.000.000,00 atau 11,86% dari keseluruhan pagu anggaran. Berikut adalah rincian anggaran yang bersumber dari PNPB beserta realisasinya. Realisasi anggaran yang bersumber dari PNPB hingga triwulan IV telah mencapai Rp2.035.043.944,00 atau 97,37%.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	7,947,856,000	7,193,710,000	391,150,000	0	0	0	0	0	0	15,532,716,000
		REALISASI	7,936,800,558 (99.86%)	7,031,964,115 (87.75%)	390,355,993 (99.80%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15,359,120,666 (98.88%)
		SISA	11,055,442	161,745,885	794,007	0	0	0	0	0	0	173,595,334
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	0	1,917,200,000	172,800,000	0	0	0	0	0	0	2,090,000,000
		REALISASI	0.00%	1,862,778,344 (97.16%)	172,265,600 (99.69%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,035,043,944 (97.37%)
		SISA	0	54,421,656	534,400	0	0	0	0	0	0	54,956,056
GRAND TOTAL		PAGU	7,947,856,000	9,110,910,000	563,950,000	0	0	0	0	0	0	17,622,716,000
		REALISASI	7,936,800,558 (99.86%)	8,894,742,459 (97.63%)	562,621,593 (99.76%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17,394,164,610 (98.70%)
		SISA	11,055,442	216,167,541	1,328,407	0	0	0	0	0	0	228,551,390

Gambar 11. Realisasi Penggunaan Dana PNPB Tahun 2024 Lingkup BPSPL Padang

Sumber: Aplikasi OM-SPAN, Januari 2025

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 1 didukung dengan kegiatan pelayanan peredaran jenis yang memiliki alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies dengan Rincian Output (RO) [2362.REB.002] Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 1

No	Komponen	Pagu (Rp)	Total Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.REB.002.052] Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES	873.402.000,00	19.687.000,00	848.242.695,00	97,1
Total		873.402.000,00	19.687.000,00	848.242.695,00	97,1

Realisasi anggaran komponen [2362.REB.002.052] adalah 97,1% yang digunakan untuk perjalanan pemeriksaan, verifikasi lapangan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha pemanfaat jenis ikan. Komponen ini berdampak blokir penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp19.687.000,00.

IKU. 2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Balai pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun nonfisik. Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang.

$$TK_{BPSPL \text{ Padang}} = TK_{Lokasi \ 1} + TK_{Lokasi \ 2} + TK_{Lokasi \ 3} + TK_{Lokasi \ 4}$$

Keterangan:

$TK_{BPSPL \text{ Padang}}$ = Jumlah tenaga kerja BPSPL Padang

$TK_{Lokasi \ 1}$ = Jumlah tenaga kerja dalam Gerakan nasional bulan cinta laut di Lokasi 1.

$TK_{Lokasi \ 2}$ = Jumlah tenaga kerja dalam Gerakan nasional bulan cinta laut di Lokasi 2.

$TK_{Lokasi \ 3}$ = Jumlah tenaga kerja dalam Gerakan nasional bulan cinta laut di Lokasi 3.

$TK_{Lokasi \ 4}$ = Jumlah tenaga kerja dalam Gerakan nasional bulan cinta laut di Lokasi 4.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKU 2 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2

IKU. 2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Orang)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	320	323	100,94	-

Pada tahun 2024, capaian IKU ini adalah 323 orang dengan persentase capaian 100,94 yang didukung oleh keterlibatan nelayan dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di empat Kawasan, meliputi Kota Padang, Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Deli Serdang. Dari 323 orang nelayan Bulan Cinta Laut BPSPL Padang, 18 orang di antaranya (5,57%) berjenis kelamin perempuan.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EpOTkKLLwrjw7epbOPvi2aa63fDV1EuY>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU ini tidak terdapat pada tahun 2023 sehingga tidak terdapat perbandingan capaian antara tahun 2023 dan tahun 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut juga tidak termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

Sementara itu, perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Tenaga Kerja Bulan Cinta Laut dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Orang)	320	323	320	320

BPSPL Padang dan Pontianak memiliki target Tenaga Kerja Bulan Cinta Laut yang sama, yaitu 320 orang, dan kedua unit kerja tersebut telah mencapai target. Namun demikian, realisasi Tenaga Kerja Bulan Cinta Laut BPSPL Padang lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Pontianak dengan selisih 3 orang. Adanya capaian melebihi target pada BPSPL Padang didukung oleh keaktifan nelayan yang turut serta menyemarakkan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU ini didukung oleh partisipasi aktif nelayan dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Pada tahun 2024, Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilaksanakan di empat lokasi wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu Kota Padang, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Deli Serdang. Sepanjang tahun 2024, rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut meliputi sosialisasi, penimbangan sampah, dan bimbingan teknis telah dilaksanakan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat selama pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Selain itu, efisiensi sumber daya juga terdapat pada pelibatan mitra stakeholder terkait selama penyelenggaraan kegiatan.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan rangkaian Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang. Berdasarkan hasil identifikasi calon lokasi, disepakati bahwa lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang adalah Kota Batam, Kota Padang, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Deli Serdang. Berikut adalah rincian jumlah nelayan yang terlibat di masing-masing lokasi.

Tabel 12. Rincian Nelayan yang Terlibat dalam Gernas Bulan Cinta Laut

No	Lokasi	Periode Penimbangan Sampah	Jumlah Nelayan yang Terlibat (Orang)	Sampah Terkumpul (Kg)	Sampah Bernilai Ekonomis (Kg)
1	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	8 Mei s.d. 19 Juli 2024	93	33.514	345,9
2	Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat	22 Mei s.d. 11 Juli 2024	87	109.914,82	97.795,84
3	Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	16 Mei s.d. 9 Juli 2024	73	5.345,25	3.794,1
4	Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara	21 Mei s.d. 13 Juni 2024	70	11.007,8	11.007,8
Total			323	159.781,87	112,943.64



Gambar 12. Rangkuman Pelaksanaan Gerakan Bulan Cinta Laut di BPSPL Padang



Gambar 13. Timeline Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di BPSPL Padang



Gambar 14. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Padang



Gambar 15. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Batam



Gambar 16. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Tanjungpinang



Gambar 17. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kab. Deli Serdang

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 2 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD] Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dengan Rincian Output (RO) [4346.QDD.001] Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 2

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[4346.QDD.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	800.000.000,00	791.390.836,00	98,9
Total		800.000.000,00	791.390.836,00	98,9

IKU. 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)

Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 35, bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: (a) ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; (b) pemberian insentif dan disinsentif; dan (c) pengenaan sanksi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui: 1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), (2) Persetujuan KKPR;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Pasal 113 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPR.

IKU ini tercapai dengan menginventarisasi dan menjumlahkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang eksisting, dan/ atau Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKU 3 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 14. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3

IKU 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
3	3	3	100	-

Capaian IKU ini adalah 3 Dokumen dengan persentase capaian 100% yang didukung oleh kegiatan identifikasi/verifikasi, sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut, penilaian teknis, penilaian lapangan, dan monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y8pMDkRMg2pOyW8Ek3Gm8VGAyqna82j4>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2023 dan 2024, IKU ini memiliki target tahunan dan capaian yang sama sehingga tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 15. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 3 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut	10	12	14	16	18	34 Provinsi
	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah	12	27	26	40	46	34 Provinsi

Dalam hal ini, indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun (Dokumen)	3	3	3	3

Berdasarkan perbandingan capaian antara dua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak telah mencapai Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun sesuai target, yaitu 3 Dokumen. Dalam hal ini, kedua unit kerja melaksanakan sosialisasi, identifikasi/verifikasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU ini didukung oleh kelengkapan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan kooperasi dari pelaku usaha. Hingga triwulan IV, BPSPL Padang telah melaksanakan sosialisasi, penilaian teknis, penilaian lapangan, asistensi, dan pengendalian dalam lingkup perizinan pemanfaatan ruang laut. Di samping itu, pedoman teknis terkait kegiatan ini juga telah diterbitkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut pada tanggal 4 September 2023 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Dalam hal ini, BPSPL Padang akan mempedomani ketentuan dalam pedoman tersebut dalam penyeleggaran pemanfaatan ruang laut.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat untuk mendampingi identifikasi ataupun verifikasi lapangan. Selain itu, efisiensi juga didukung dengan penggunaan aplikasi zoom sebagai media dalam pelaksanaan penilaian teknis permohonan pemanfaatan ruang laut.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh serangkaian kegiatan berikut.

a. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut

BPSPL Padang telah melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Aston Karimun City, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 12 Juni 2024 dengan total peserta 40 orang yang hadir secara luring dan daring. Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut meliputi:

- Sosialisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau,
- Mekanisme Pelayanan Perizinan Berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA),

- Kebijakan dan Ketentuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL),
- Kebijakan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut.

Melalui kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Kabupaten Karimun, pemahaman stakeholder, pelaku usaha dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang penyelenggaraan penataan ruang laut mencakup regulasi, prosedur dan tata cara perizinan pemanfaatan ruang meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari Terdapat peningkatan skor sebesar 8,62 poin Dimana hasil pada pre-test mendapatkan skor rata-rata 78,05 sedangkan hasil pada post- test mendapatkan skor 86,67 poin.



Gambar 18. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Kab. Karimun

Selain itu, BPSPL Padang juga turut berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi pemanfaatan ruang laut yang diselenggarakan oleh instansi lain. Pada kesempatan tersebut, BPSPL Padang menyampaikan materi seputar perizinan KKPRL.

Tabel 17. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Laut yang Dihadiri BPSPL Padang

No	Tanggal	Kegiatan	Lokasi	Tim yang Terlibat	Keterangan
1	Rabu, 15 Mei 2024	Sosialisasi Izin Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh	Penyelenggara: DKP Aceh Barat Daya Narasumber: BPSPL Padang	30 Peserta Luring
2	Kamis, 4 Juli 2024	Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Kota Sabang, Provinsi Aceh	Penyelenggara: Bappeda Kota Sabang Narasumber: BPSPL Padang	30 Peserta Luring
3	Rabu, 19 Juni 2024	Percepatan Peningkatan Nilai Investasi dan Pendapatan di Kawasan Sabang dan Sosialisasi KKPRL Tahun Anggaran 2024	Kantor Badan Pengusahaan Kota Sabang	Penyelenggara: Badan Pengusahaan Kota Sabang	12 Orang
4	Selasa, 24 September 2024	Sosialisasi Materi Teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Selatan dan Sosialisasi KKPRL	Kantor Desa Sungsang 2, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin	Penyelenggara: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Narasumber: BPSPL Padang	30 Peserta
5	Kamis, 24 Oktober 2024	Sosialisasi Materi Teknis RZWP-3-K dan KKPRL Provinsi Sumatera Selatan	Kantor Desa Pantai Harapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir	Penyelenggara: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	30 Peserta

No	Tanggal	Kegiatan	Lokasi	Tim yang Terlibat	Keterangan
				Naeasumber: BPSPL Padang	
6	Rabu, 25 September 2024	Pelatihan Pengelolaan home stay dan sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	Hotel Shafa Resort Rupaat Utara, Provinsi Riau	Penyelenggara: Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis Narasumber: BPSPL Padang	32 Orang

b. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Sepanjang tahun 2024, BPSPL Padang telah melaksanakan identifikasi pemanfaatan ruang laut di empat provinsi yaitu Aceh, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Adapun identifikasi ini dilakukan terhadap pelaku usaha pemanfaat ruang laut yang belum memiliki PKKPR. Rekapitulasi identifikasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang disajikan dalam ilustrasi di bawah ini.



Gambar 19. Rekapitulasi Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2024

c. Penilaian Teknis Perizinan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut

Penilaian teknis merupakan salah satu tahapan dalam pemrosesan izin PKKPR yang dimohonkan oleh pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan BPSPL Padang berperan sebagai penyelenggara penilaian teknis. Rekapitulasi verifikasi teknis perizinan kesesuaian ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam ilustrasi di bawah ini.



Gambar 20. Rekapitulasi Penilaian Teknis Perizinan Kesesuaian Ruang Laut Tahun 2024

d. Verifikasi Lapangan

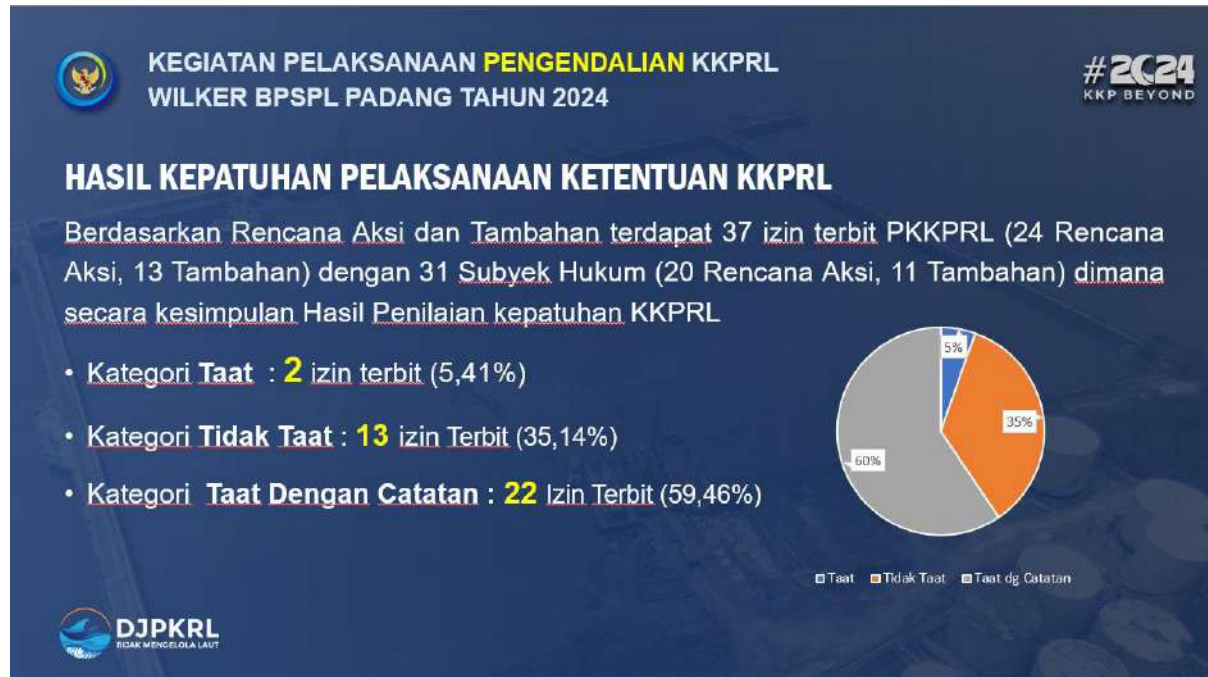
Verifikasi lapangan merupakan tahapan lanjutan dalam pemrosesan izin PKKPR setelah penilaian teknis ketika terdapat hal-hal yang perlu ditinjau kembali di lapangan. Berikut adalah rincian kegiatan verifikasi lapangan PKKPR yang BPSPL Padang laksanakan pada tahun 2024.



Tabel 18. Verifikasi Lapangan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2024

d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Pengendalian pemanfaatan ruang laut dilakukan terhadap subjek hukum yang telah mengantongi izin PKKPR. Pada tahun 2024, BPSPL Padang telah melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang laut terhadap 31 subjek hukum dan 37 izin terbit PKKPR di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.



Gambar 21. Rekapitulasi Hasil Kepatuhan KKPRL

Tabel 19. Hasil Penilaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

No	Subjek Hukum	Provinsi	Detil Kegiatan	Luas (Ha)	Hasil Penilaian
1	BUT Zaratex	Aceh	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi	1	Tidak Taat
2	PT Meulaboh Power Generation	Aceh	Water Intake PLTU nagan Raya Unit 3 dan 4	0,39	Taat dengan Catatan
3	PT PLN Nusantara Power	Aceh	Terminal Khusus	24,58	Taat dengan Catatan
4	PT Pertamina Patra Niaga	Aceh	Pengembangan Fuel Terminal Krueng Raya	13,05	Taat dengan Catatan
5	Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam	Kepulauan Riau	Pengendalian Daya Rusak Air (Breakwater dan Revetment)	73,08	Tidak Taat
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Pembangunan Jembatan Batam Bintan	71,94	Taat dengan Catatan
7	PT Batamas Puri Permai	Kepulauan Riau	Pembangunan Pelabuhan	147,5	Tidak Taat
8	PT Batamas Puri Permai	Kepulauan Riau	Real Estat yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	40,91	Tidak Taat

No	Subjek Hukum	Provinsi	Detil Kegiatan	Luas (Ha)	Hasil Penilaian
9	PT Bintang Alumina Indonesia	Kepulauan Riau	Pengembangan Kawasan Industri Alumina	127,84	Tidak Taat
10	PT Buana Megawisata	Kepulauan Riau	Wisata Bahari	9,71	Tidak Taat
11	PT Dirgantara Inti Abadi	Kepulauan Riau	Pembangunan Kawasan Permukiman	17,08	Tidak Taat
12	PT Indoprima Karisma Jaya	Kepulauan Riau	Pembangunan Pelabuhan	7,42	Tidak Taat
13	PT Karimun Granite	Kepulauan Riau	Pembuangan Limbah Pertambangan Batu Granit	19,28	Taat dengan Catatan
14	PT Optic Marine Indonesia	Kepulauan Riau	Sistem Komunikasi Kabel Laut Asia <i>Direct Cable</i>	134,60	Tidak Taat
15	PT Pasifik Karyasindo Perkasa	Kepulauan Riau	Pembangunan Kawasan Industri	21,16	Tidak Taat
16	PT Pasifik Karyasindo Perkasa	Kepulauan Riau	Pembangunan Kawasan Industri	34,78	Taat dengan Catatan
17	PT Servotech Indonesia	Kepulauan Riau	Pembangunan Industri <i>Shipyards</i> , Pabrikasi, Dan Pergudangan	22,74	Taat dengan Catatan
18	PT Sumber Bahari Abadi	Kepulauan Riau	Pembangunan Pelabuhan/Terminal Khusus Tanpa Reklamasi	1,55	Taat dengan Catatan
19	PT Sumber Bahari Abadi	Kepulauan Riau	Pembangunan Terminal Khusus	4,38	Taat dengan Catatan
20	PT Uma Graha Berkah	Kepulauan Riau	Pembangunan Kawasan Permukiman Dan Jasa	22,49	Taat dengan Catatan
21	PT Pulau Cempedak	Kepulauan Riau	Wisata Bahari	3,67	Taat
22	PT Pulau Nikoi	Kepulauan Riau	Dermaga Wisata Lainnya	1,64	Taat
23	Pusat Perencanaan Program Strategis, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Kepulauan Riau	Revitalisasi Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Terminal Batu Ampar Batam	23,24	Tidak Taat
24	PT Limas Raya Griya	Kepulauan Riau	Penyediaan Lahan Untuk Kawasan Perumahan	12,02	Taat dengan Catatan
25	PT Multi Auto Protect	Kepulauan Riau	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata	3,22	Taat dengan Catatan
26	PT Kelong Wisata Senggarang	Kepulauan Riau	Pembangunan Kawasan Pariwisata	3,31	Tidak Taat
27	PT Adhitya Seraya Korita	Riau	Pengembangan Terminal Khusus	19,44	Taat dengan Catatan
28	PT Kawasan Industri Dumai	Riau	Terminal Khusus	23,70	Taat dengan Catatan

No	Subjek Hukum	Provinsi	Detil Kegiatan	Luas (Ha)	Hasil Penilaian
29	Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang	Sumatera Barat	Pembangunan Pengaman Pantai Kota Padang	0,79	Tidak Taat
30	PT Pertamina Patra Niaga (Teluk Kabung)	Sumatera Barat	Pengembangan Integrated Terminal Teluk Kabung	75,40	Taat dengan Catatan
31	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Sumatera Selatan	Pemasangan Kabel Laut 150 Kv Interkoneksi Sumatera-Bangka Sirkuit 2	35,20	Taat dengan Catatan
32	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Sumatera Selatan	Pemasangan Kabel Laut 150 Kv Interkoneksi Sumatera-Bangka Sirkuit 1	35,17	Taat dengan Catatan
33	BUT EMP Gebang	Sumatera Utara	Pengembangan Lapangan Migas Secanggang	4,84	Taat dengan Catatan
34	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sumatera Utara	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan	156,55	Taat dengan Catatan
35	PT Multimas Nabati Asahan	Sumatera Utara	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	20,88	Taat dengan Catatan

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2366.PBT] Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan Rincian Output kegiatan tersebut.

Tabel 20. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKU 3

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Total Blokir	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2366.PBT.009] Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	1.100.000.000	40.460.000,00	1.056.265.852,00	96
Total		1.100.000.000	40.460.000,00	1.056.265.852,00	96

Realisasi anggaran Rincian Output [2366.PBT.009] adalah 96%. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan sosialisasi, identifikasi, verifikasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang. Rincian output ini bersumber dari rupiah murni senilai Rp600.000.000,00 dan bersumber dari PNPB senilai Rp500.000.000,00. Rincian Output ini berdampak blokir penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp40.460.000,00.

IKU. 4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah Provinsi yang didampingi penyusunan percepatan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan, atau pendampingan lain sesuai dengan kondisi Kawasan Konservasi. Dasar hukum yang dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dengan cara menginventarisasi dan

menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Padang yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan Kawasan konservasinya.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKU 4 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4

IKU 4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
3	3	6	200 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerja KKP	100

Capaian IKU ini adalah 6 Daerah dengan persentase capaian 200% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerja KKP yang didukung dengan fasilitasi proses pengusulan penetapan Kawasan konservasi daerah sebagaimana rincian berikut:

1. Provinsi Aceh melalui pendampingan dalam pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Kabupaten Simeulue;
2. Provinsi Sumatra Utara melalui pendampingan dalam pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Kabupaten Nias Barat;
3. Provinsi Riau melalui pendampingan dalam pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Rupat Utara Kabupaten Bengkalis;
4. Provinsi Kepulauan Riau melalui pendampingan dalam pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Bintan II (Tambelan) dan Batam;
5. Provinsi Jambi melalui pendampingan dalam pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
6. Provinsi Sumatra Selatan melalui pendampingan dalam pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Pulau Maspari.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19JQz1U86-dQwLLZGnGPilaLTi24T8Krf>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2024, terdapat kenaikan capaian sebesar 100% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh adanya upaya pendampingan terhadap provinsi yang belum didampingi pada tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 22. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 4 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil baru (nasional dan daerah) yang ditetapkan	Luas kawasan konservasi baru (ha)	700000	800000	900000	900000	900000	9 Provinsi

Dalam hal ini, indikator kinerja Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 23. Perbandingan Capaian Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Daerah dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Daerah Yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi (Daerah)	3	6	1	1

Berdasarkan perbandingan capaian antara kedua unit kerja, BPSPL Padang telah melampaui target dalam hal pendampingan pemerintah daerah dalam mengusulkan penetapan Kawasan Konservasi Daerah. Sementara itu, BPSPL Pontianak mencapainya sesuai target. Lebih tingginya capaian BPSPL Padang juga dipengaruhi oleh banyaknya Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerjanya yang belum diusulkan. Dari tujuh provinsi yang merupakan wilayah kerja BPSPL Padang, hanya Sumatra Barat yang sudah menetapkan Kawasan Konservasi Daerahnya secara menyeluruh. Maka dari itu, BPSPL Padang melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi lainnya untuk mendorong proses pengusulannya.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung terbesar dalam upaya pencapaian IKU 4 adalah akselerasi pemerintah daerah dalam memproses pengusulan penetapan kawasan konservasi perairan daerah. Dalam pelaksanaannya, BPSPL Padang telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah perihal tahapan-tahapan pendampingan pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Daerah yang dapat didampingi oleh BPSPL Padang.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada upaya koordinasi yang dilakukan secara jarak jauh dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat juga dilakukan untuk mendukung efisiensi.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah setempat, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dalam tahapan pengusulan penetapan Kawasan konservasi di wilayah provinsinya masing-masing. Sepanjang tahun 2024, BPSPL Padang turut serta dalam pendampingan terhadap enam provinsi, meliputi Sumatra Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, dan Aceh.

1. Aceh

a. Rapat Persiapan Survei Biofisik Kawasan Konservasi Daerah Simeulue

Pada tanggal 9 Oktober 2024, bertempat di Kantor Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Gerai Pelayanan Aceh, telah dilaksanakan rapat koordinasi untuk persiapan survei biofisik wilayah Simeulue. Rapat ini dihadiri oleh tim survey gabungan yang terdiri dari perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh dan BPSPL Padang. Tujuan utama dari rapat ini adalah menyusun rencana kerja selama tujuh hari survey untuk pengumpulan data lapangan terkait kondisi biofisik perairan serta aspek sosial ekonomi masyarakat.

Dalam pembahasan, disepakati bahwa tim survey akan dibagi menjadi dua kelompok utama untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas. Tim pertama akan berfokus pada pengumpulan data biofisik perairan, meliputi pengukuran kualitas air, pendokumentasian transek berupa foto, dan identifikasi potensi ekosistem mangrove, lamun, serta terumbu karang. Lokasi yang menjadi target pengambilan data mencakup enam kecamatan, yaitu Simeulue Barat, Simeulue Timur, Simeulue Cut, Teupah Selatan, Salang, dan Simeulue Tengah.

Sementara itu, tim kedua bertugas melakukan koordinasi dengan aparat terkait di wilayah survey, seperti Camat, Panglima Laot, dan stakeholder lainnya. Selain itu, tim ini juga akan melaksanakan survey sosial ekonomi untuk memahami kondisi masyarakat lokal serta hubungan mereka dengan sumber daya perairan di wilayah tersebut. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif, baik dari sisi lingkungan maupun sosial.

Rapat ini juga menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan aparat daerah sebelum dan selama pelaksanaan survey untuk memastikan kelancaran kegiatan di lapangan. Persiapan logistik, transportasi, dan peralatan survey telah dibahas secara rinci guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing tim. Pembagian jadwal dan penentuan lokasi survey akan disesuaikan dengan kondisi lapangan serta prioritas wilayah.

Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, masing-masing tim akan memfinalisasi jadwal operasional dan memastikan kesiapan logistik sebelum keberangkatan ke wilayah Simeulue. Melalui koordinasi yang baik dan pelaksanaan tugas sesuai rencana, diharapkan data yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan.



Gambar 22. Dokumentasi Rapat Persiapan Survei Biofisik Kawasan Konservasi Daerah Simeulue

b. Survei Biofisik dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Daerah Simeulue

Pada 12 s.d. 17 Oktober 2024, BPSPL Padang melakukan survei biofisik dan groundcheck lapangan dalam rangka pendampingan penetapan 3 Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. KKD yang dimaksud adalah KKD Teupah Selatan, KKD Simeulue Tengah, Simeulue Cut, dan Salang serta KKD Simeulue Barat. 3 KKD ini mencakup 5 kecamatan dengan luas total KKD yang akan ditetapkan sebesar 24.649,68 Hektar. KKD yang akan ditetapkan ini sangat luas dan berada pada tiga titik yang cukup berjauhan. Hal ini menjadi tantangan berat bagi BPSPL Padang yang hanya melakukan survei secara efektif selama 4 hari.

Menurut Permen KP 31/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, survei adalah salah satu tahapan yang harus dilakukan agar KKD dapat ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Survei dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang paling sedikit memuat: a. sebaran habitat penting; b. sebaran biota penting; c. daerah pemijahan; d. potensi ancaman terhadap target konservasi; e. kondisi status pemanfaatan sumber daya; f. pemetaan pemangku kepentingan; g. keberadaan potensi Situs Budaya Tradisional; dan h. keterwakilan, keterulangan, dan konektivitas habitat penting. Data yang telah terkumpul nantinya akan digunakan untuk menyusun dokumen awal KKD.

Secara umum, di 3 KKD yang akan ditetapkan dapat ditemui habitat penting berupa terumbu karang dan lamun. Sedangkan mangrove tidak ditemui di KKD Simeulue Tengah, Simeulue Cut, dan Salang. Pada saat survey, BPSPL Padang berupaya untuk memetakan sebaran habitat penting ini sehingga nantinya dapat ditentukan berapa luas total dari tiap habitat dan luas zona inti yang harus ditetapkan. Selain habitat penting, BPSPL Padang juga berhasil mengumpulkan sebaran biota penting seperti buaya, penyu dan mamalia laut. Di semua KKD bisa ditemukan penyu, di KKD Simeulue Barat dan Teupah Selatan terdapat buaya dan di KKD Simeulue Tengah, Simeulue Cut, dan Salang serta KKD Teupah Selatan terdapat jalur migrasi mamalia laut dilindungi.

Selain itu, secara sosial ekonomi dan budaya tiap KKD yang akan ditetapkan masih relatif lestari. Pemanfaatan sumber daya masih dilakukan secara tradisional oleh masyarakat setempat sedangkan ancaman terhadap target konservasi dimungkinkan muncul dari factor eksternal seperti penangkapan ikan oleh kapal-kapal besar dari luar daerah dan bersandarnya kapal-kapal besar seperti kapal tangker, kargo dan sejenisnya.

Di beberapa lokasi, BPSPL Padang juga bertemu dengan beberapa pemangku kepentingan seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Simeulue, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Lembaga Adat Nelayan Panglima Laot setempat dan pemangku kepentingan lainnya. Rencana penetapan KKD ini telah BPSPL Padang komunikasikan dan mendapat respon yang cukup baik. Para pemangku

kepentingan mendukung kegiatan ini dan telah memberikan rekomendasi kawasan yang sebaiknya dizonasikan sebagai zona inti. Sebagai awalan, BPSPL Padang menerima seluruh masukan dan akan mengawal penyusunan dokumen awal agar dapat dikonsultasikan secara teknis dan publik.



Gambar 23. Dokumentasi Survei Biofisik dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Daerah Simeulue

c. FGD Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Daerah Simeulue

Penyusunan rencana zonasi untuk tiga kawasan di Kabupaten Simeulue dilakukan dengan masyarakat dan internal tim penyusun. FGD dengan masyarakat dilakukan bersamaan dengan kegiatan survei. Perangkat pemerintah daerah dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa hingga kelompok adat Panglima Laot dikumpulkan dan diminta memberi masukan terkait rencana zonasi tiga kawasan konservasi yang telah dicadangkan.

Tim penyusun meminta masukan terkait lokasi penangkapan ikan, ekosistem dengan kondisi baik, kemunculan biota laut dilindungi dan rekomendasi lokasi yang paling baik untuk dijadikan zona inti. Berdasarkan informasi dari masyarakat, tim mendiskusikan kembali secara internal untuk menentukan zonasi yang ingin disusun. Perumusan zonasi dielaborasi antara masukan masyarakat dan analisa data atas sebaran ekosistem target dan data pendukung lainnya yang telah dilakukan tim.

Berdasarkan FGD yang telah dilakukan disusunlah zonasi tiap kawasan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Secara umum tiap kawasan disusun menjadi tiga zona yaitu zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya. Adapun zona lainnya yang disusun antara lain zona rehabilitasi dan zona pelabuhan/tambat labuh.



Gambar 24. Dokumentasi Proses FGD Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Simeulue dengan Masyarakat Setempat



Gambar 25. Dokumentasi Proses FGD Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Simeulue di Internal Tim Penyusun

d. Konsultasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Daerah Simeulue

Pada tanggal 26 November 2024, BPSPL Padang mendampingi DKP Aceh untuk melakukan konsultasi teknis dengan Direktorat KEBP di Jakarta. Dalam konsultasi teknis ini ada tiga hal yang dibahas yaitu rencana penetapan KKD yang tersisa (KKD Pulau Simeuleu Cut, Simeulue Barat dan Pulau Batu Belayar) sesuai pencadangan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Aceh, rencana penetapan KKD Aceh Timur berdasarkan pencadangan melalui SK Gubernur Aceh Nomor 500.5.1/223/2024 dan rencana revisi KKD Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (Pisisi).

Menurut DKP Aceh, mereka berencana menetapkan 3 kawasan tersisa, 1 kawasan baru di Aceh Timur dan merevisi beberapa kawasan yang statusnya suaka menjadi taman. Namun, pada waktu dekat KKD Pisisi yang baru akan direvisi karena faktor kesiapan data dan dokumen. Untuk 3 kawasan tersisa target penetapan luasnya adalah 24.000 hektar dan akan ditetapkan sebagai taman, namun karena perlu ada penyesuaian di KKD Simeulue Barat yang akan ada pengembangan pelabuhan penumpang, maka luasnya akan berkurang sedikit. Pada konsultasi teknis ini, data pendukung terkait habitat target, rencana zonasi dan lainnya sudah disiapkan dengan baik. Terkait revisi KKD Pisisi, bila memungkinkan penetapannya digabungkan dalam satu SK dengan 3 kawasan lain di Simeulue yang belum ditetapkan.

Tim Dit. KEBP KKP memberi masukan bahwa pada penetapan KKD hal yang paling krusial adalah pada penetapan zonasi sebab penentuan zonasi ini berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat yang memiliki kepentingan di laut yang dikonservasi. Sedangkan ide untuk menggabungkan menjadi satu SK Dit. KEBP setuju dan perlu berkonsultasi dengan Biro Hukum KKP karena SK KKD Pisisi yang lama tergabung dengan penetapan KKD lain yang berstatuts suaka seperti di Aceh Besar, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan.

Menurut Fajar Kurniawan, Kepala BPSPL Padang, posisi BPSPL Padang adalah untuk mendampingi dan menguatkan DKP Aceh dalam mengusulkan penetapan KKD di Aceh. Untuk KKD di Simeulue, sebagian besar aktivitas di lautnya belum masif dengan utamanya adalah aktivitas perikanan tangkap tradisional. Penetapan KKD di sana sangat memungkinkan dan potensi konfliknya tidak besar.

Berdasarkan hasil konsultasi teknis dinyatakan bahwa dokumen awal KKD Simeulue untuk 3 area tersisa memadai untuk dilaksanakan konsultasi publik. Luas KKD Simeulue yang akan diusulkan rencananya seluas 24.120,87 Hektar dengan penghitungan luas menggunakan proyeksi *Cylindrical Equal Area* (CEA). Target konservasi berupa ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove.

Masukan dari Dit. KEBP perlu penyesuaian zonasi pada zona jalur lalu lintas kapal untuk diubah menjadi zona pemanfaatan terbatas dengan digambarkan garis-garis lalu lintas kapalnya. Kecuali bila jalur lalu lintas kapal tersebut memiliki SK dari Kementerian Perhubungan. Masukan berikutnya, zona inti untuk area Simeulue Cut agar dapat dikaji lagi karena luasannya yang sangat besar. Namun bila sudah dianggap sesuai, bisa dilanjutkan dengan zonasi yang seperti itu. Dan berdasarkan kesepakatan, KKD Simeulue untuk 3 area ini rencananya akan diusulkan pada minggu ke-4 Desember Tahun 2024.

Untuk rencana penetapan KKD di Aceh Timur, desain utamanya adalah untuk mengonservasi spesies udang windu *Penaeus monodon*. Rencana luas kawasan yaitu 46.791,08 hektar dengan kategori suaka. Oleh karena kategorinya suaka, maka zona inti harus mencakup 70% luas target konservasi sehingga perlu dikaji lebih dalam terkait sebaran target konservasinya. Harapannya zona inti mampu mengonservasi 70% target konservasi sesuai aturan sehingga dapat diusulkan untuk ditetapkan. Status area KKD Aceh Timur dalam materi teknis berupa kawasan perikanan tangkap. Untuk mengakomodir KKD, fungsi konservasi pada area ini akan dikenali dalam Raperda RTRW Aceh.



Gambar 26. Dokumentasi Konsultasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Daerah Simeulue

2. Sumatra Utara

a. Rapat Koordinasi Persiapan Survei Kawasan Konservasi Kabupaten Nias Barat

Sebelum melaksanakan survey di lapangan, BPSPL Padang dan DKP Prov Sumatera Utara berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias Barat, menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yaitu adanya pencadangan kawasan konservasi di Pulau Pini seluas 27343,57 ha yang ditargetkan untuk diusulkan penetapannya pada tahun 2024 ini melalui Gubernur Sumatera Utara. Merespon hal tersebut, Nias Barat pada prinsipnya mempersilahkan tim untuk turun dan mengambil data serta turut mendukung penetapan kawasan konservasi di Nias Barat meski kewenangan kelautan sudah tidak ada di kabupaten. Konsultasi Publik direncanakan dilaksanakan di Lahomi dan kemungkinan akan dibuka oleh Bupati Nias Barat. Untuk jadwal pelaksanaan akan dikordinasikan lebih lanjut.

Briefing tim groundcheck, Pelp Ahli Muda DKP Sumatera Utara, Zufriwandi Siregar memimpin kegiatan dengan fokus menyampaikan pelaksanaan survey terdiri dari pengumpulan data ekologi berupa ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove, termasuk biota dilindungi jika terindikasi ditemukan. Di samping itu, pengumpulan data sosial ekonomi turut diperhatikan terutama aktivitas di lokasi calon zona inti. Tim GIS dari UNIMED turut membantu pengumpulan data luasan dan mapping. Selanjutnya dilakukan pembagian tim dan tugas serta data/informasi yang perlu dikumpulkan. FGD dilakukan pada Rabu malam (31/8/2024).

Tim BPSPL Padang menyampaikan bahwa pelaksanaan survey ini BPSPL Padang bersifat mendampingi dan mendukung pelaksanaan pengambilan data. Hendrisman dan Lovedrian selaku perwakilan BPSPL Padang menyampaikan perlu identifikasi tipe-tipe target konservasi dari masing-masing habitat yang dilengkapi dari informasi/data sosek. Perlu keterwakilan fitur konservasi untuk Rencana Pengelolaan Zonasinya serta memperhatikan pemanfaatan lainnya di kawasan konservasi seperti keberadaan alur pelayaran dalam RPZ nantinya. Fokus survey ditekankan pada identifikasi habitat/biota penting yang akan dilindungi. Terdapat beberapa pulau antara lain Pulau Hinako, Pulau Bawa, Pulau Himana, dan Pulau Langu yang perlu keterwakilan habitatnya dari masing-masing pulau. Titik pengambilan data dapat menjadi T-0 sebagai data series dalam pemenuhan Evika.

Koordinasi dengan PJ Kepala Desa Hinako, Tim menyampaikan maksud kedatangan dan tahapan2 penetapan kawasan konservasi di Nias Barat. Disaat bersamaan tim juga meminta bantuan agar dapat difasilitasi terkait tokoh desa yang bisa ditemui untuk kelancaran pelaksanaan FGD di Labuan Bajau. PJ Kepala Desa Labuan Bajau, Rido Uglisa Maruhawa, S.KM yang mewakili Kepala Desa se Kepulauan Hinako dan juga bertindak sebagai fasilitator warga nelayan, pada sambutannya mengatakan bahwa, menyambut baik rencana penetapan zona kawasan Konservasi Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Hinako yang tentu memberi kesempatan kepada warga nelayan tradisional dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan juga perlindungan hukum terhadap kawasan laut di perairan Sirombu.



Gambar 27. Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Survei Kawasan Konservasi Kabupaten Nias Barat

b. Survei Biofisik dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Kabupaten Nias Barat

Kegiatan dilaksanakan pada 30 Juli s.d. 2 Agustus 2024 di Kawasan Konservasi Daerah Nias Barat. Sebelum melaksanakan survey di lapangan, BPSPL Padang dan DKP Prov Sumatera Utara berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias Barat, menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yaitu adanya pencadangan kawasan konservasi di Kabupaten Nias Barat seluas 27.343,57 ha yang ditargetkan untuk diusulkan penetapannya pada tahun 2024 ini.

Pelaksanaan survei terdiri dari pengumpulan data ekologi berupa ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove, termasuk biota dilindungi jika terindikasi ditemukan. Di samping itu, pengumpulan data sosial ekonomi turut diperhatikan terutama aktivitas di lokasi calon zona inti. Di Kawasan Konservasi Perairan Sirombu, terdapat beberapa pulau antara lain Pulau Hinako, Pulau Bawa, Pulau Himana, dan Pulau Langu yang perlu keterwakilan habitatnya dari masing-masing pulau. Titik pengambilan data dapat menjadi T-0 sebagai data series dalam pemenuhan EVIKA. Hasil survei tersebut secara detail akan diolah lebih lanjut oleh tenaga ahli.

Lebih lanjut, dilakukan juga FGD dengan masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

- Target konservasi di Kabupaten Nias Barat adalah ekosistem terumbu karang,
- Kawasan konservasi Nias Barat dikategorikan sebagai Taman,
- Rencana zona inti yang disepakati antara lain:
 - Gosong (sebelah kanan) yang terletak antara Pulau Langu dan Pulau Bogi,
 - Pulau Langu (kecuali bagian barat laut);
 - Bagian tenggara Pulau Himana.



Gambar 28. Survei Biofisik, Bioekologi dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan Sirombu

c. Konsultasi Publik Kawasan Konservasi Kabupaten Nias Barat

Selasa, 22 Oktober 2024, BPSPL Padang mengikuti Konsultasi Publik II Pembahasan draft Kajian Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Sirombu Kabupaten Nias Barat serta Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Pulau Salahnama, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Pulau Pini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Pulau Sawo-Lahewa, bertempat di ruang rapat Hotel Swiss-bell in, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan via zoom meeting dari tempat masing-masing.

Kegiatan diawali dengan penyampaian kata sambutan sekaligus pembukaan kegiatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Riza Lubis. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan sebelumnya diantaranya Survei Biofisik, Bioekologi dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan Sirombu, Kabupaten Nias Barat pada bulan Agustus 2024, Konsultasi Publik tingkat masyarakat, Konsultasi Publik tingkat kabupaten di Kabupaten Nias Barat, dan saat ini Konsultasi Publik tingkat Propinsi. Setelah ini akan dilaksanakan di tingkat pusat Kementerian.

Pelaksanaan Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menggali informasi dan mendapat masukan agar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan di Perairan Sirombu Kabupaten Nias Barat yang sedang disusun tepat. Pada pertemuan ini diharapkan setiap pihak yang hadir dapat berkontribusi dengan fasilitator dari DKP Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran OPD Provinsi Sumatera Utara baik dari Bappeda, Dinas Perhubungan diharapkan dapat menyampaikan informasi regulasi terbaru di kabupaten Nias Barat terutama lokasi rencana penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Sirombu.

Saat ini Sumatera sudah memiliki 6 Kawasan Konservasi yakni Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tapanuli Tengah Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Sumatera Utara (KepmenKP 87/KEPMEN-KP/2020), Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pulau-Pulau Batu Nias Selatan dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sumatera Utara (KepmenKP 86/KEPMEN-KP/2020),

Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Berhala Provinsi Sumatera Utara (KepmenKP 48 Tahun 2022), Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Salahnama Provinsi Sumatra Utara (KepmenKP 37 Tahun 2024), Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Pini Provinsi Sumatra Utara (KepmenKP 58 Tahun 2024), Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Sawo-Lahewa Provinsi Sumatra Utara (KepmenKP 67 Tahun 2024). KK di Perairan di Wilayah Pulau Salahnama kabupaten Batubara, KK di Perairan di Wilayah Pulau Pini Kabupaten Nias Selatan, dan review Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sawo Lahewa Kabupaten Nias Utara merupakan KepmenKP terbaru yang akan disosialisasikan pada siang hari ini. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sirombu Kabupaten Nias Barat ini diharapkan akan ditetapkan tahun depan.

Saat ini DKP Provinsi Sumatra Utara sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan beberapa stakeholder LSM diantaranya Yakopi dan Yagasu. Saat ini DKP Provinsi Sumatra Utara sedang menjalin Kerjasama dengan Akademisi, diantaranya Universitas Syiah Kuala, Universitas Negeri Medan, dan Universitas Dharma Agung.

Kegiatan dilanjutkan dengan Penyampaian Draft Kajian Usulan penetapan Kawasan Konservasi Perairan Sirombu oleh Tenaga Ahli yaitu Bapak M. Ridha Syafii Damanik, S.Pi, M.Si yang dimoderatori oleh Bapak M. Riza Kurnia Lubis, S.Pi, M.Si, Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Utara.

Beberapa poin penting yang disampaikan di antaranya:

- Terdapat tiga tahapan dalam proses penetapan zonasi kawasan konservasi perairan Sirombu yang mengacu pada Permen KP. No.31 Tahun 2020 tentang pengelolaan Kawasan konservasi, yakni:
 - Survey Biofisik (Reef Health Monitoring, Ground Check) dan FGD yang telah dilaksanakan pada tgl 27 Juli – 03 Okt 2024;
 - Analisis data dengan menggunakan Spatial Planning dan modelling;
 - Desain kawasan konservasi yang meliputi diskusi, konsultasi publik dan kesepakatan bersama para pengelola yang sudah diselenggarakan pada tgl 12 September 2024.
- Berdasarkan survey yang telah dilakukan terdapat enam (6) Pulau yang telah disurvei baik yang berpenghuni dan tidak berpenghuni di delapan (8) plot sampling;
- Kondisi terumbu karang kategori sedang – baik (37,78 – 66,65 %) kondisi paling baik ditemukan di P. Langu dengan persentase tutupan karang 66,65 % dengan dominansi genus *Acropora*, *Porites* dan *Heliopore*.
- Kemudian spesies megabenthos paling banyak adalah *Drupella* spp;
- Sedangkan kelimpahan ikan karang paling tinggi di P. Langu meliputi ikan target, ikan mayor dan ikan indikator, Dimana di dominansi dengan ikan family Pomacentridae dan Achanturidae.

Berdasarkan hasil FGD (Focuss Grup Discussion) pada tgl 30 Agustus 2024 dan Konsultasi Publik I pada tanggal 12 September 2024 di kabupaten Nias Barat, telah disepakati di antaranya:

- Target Konservasi KK Perairan Sirombu adalah Ekosistem Terumbu Karang;
- Kategori Kawasan: Taman;
- Pembagian Zonasi yakni Zona Inti seluas 6,86 Ha (12,55%) sudah memenuhi persyaratan zona inti yaitu minimal 10% dari luas Kawasan, Zona Lain sesuai peruntukan Kawasan seluas 0,02 Ha (0,03 %), dan Zona Pemanfaatan Terbatas 47,75 Ha (87,42%);

- Rencana Zona Inti berada di perairan Pulau Langu keseluruhan kecuali sisi barat laut (dibuka alur transportasi masyarakat); Gosong diantar Pulau Bogi dan Pulau Langu; dan Sebagian Kecil wilayah perairan Pulau Imana.
- Peruntukan ketentuan zona sesuai Permen KP No.31/2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi dimana mengatur kegiatan yang Diperbolehkan, Diperbolehkan dengan syarat dan Tidak Diperbolehkan bagi kegiatan tertentu.

Pada sesi diskusi, Dit. KEBP menyampaikan concern KKP terhadap alur pelayaran, dan usulan zona kawasan tersebut belum dijelaskan dengan detail terkait alokasi alur pelayaran terutama pada zona inti; hasil kegiatan survey juga diharapkan dapat menjadi masukan data survey sebagai T0 atau untuk acuan kegiatan monitoring selanjutnya dan perlunya sudah dibuat titik-titik monitoring biofisik; serta hendaknya data survey bisa menjadi acuan untuk penentuan atau inventaris data untuk pembentukan kelompok-kelompok masyarakat dan dalam penentuan zona disesuaikan dengan potensi alokasi ruang PKKPR.

BPSPL Padang mendukung dan mengapresiasi semangat DKP Provinsi Sumatera Utara dalam upaya penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sirombu Kabupaten Nias Barat. BPSPL Padang juga turut hadir dan bersama tim melaksanakan survey serta Konsultasi Publik di lokasi. Selanjutnya mohon dapat diidentifikasi lebih detail terkait potensi usaha kaitannya dengan alokasi ruang atau penetapan zonasi terkait PKKPR, perlu menjadi perhatian untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami lokasi penetapan zona inti dan batasan-batasan yang boleh dan tidak dilakukan pada zona inti sehingga tidak terjadi konflik di masa depan. Berdasarkan target capaian KKP adalah meningkatnya luasan kawasan konservasi dengan harapan juga dapat diimbangi dengan perencanaan pengelolaan sehingga kualitas kawasan konservasi juga meningkat yang akan dinilai setiap tahunnya dalam penilaian Evika. Nias Barat khususnya Pulau Hinako adalah salah satu daerah yang terkenal dengan potensi wisata dalam penetapan zona seyogyanya diperhatikan dengan baik alokasi/lokasi ruang untuk kegiatan pariwisata yang kaitannya nanti terkait dengan PKKPR. Salah satu wisata budaya di Nias Barat yaitu Pulau Bawa diketahui terdapat situs batu megalit yang merupakan peninggalan Sejarah dan potensial sebagai pariwisata budaya, yang sudah dikonfirmasi keberadaannya di daratan Pulau Sirombu, bukan di lokasi rencana penetapan Kawasan Konservasi.

OPD Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, serta bidang Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan DKP Provsu, Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP DKP Provsu dan Bidang Perikanan Tangkap DKP Provsu mendukung upaya penetapan Kawasan di Perairan di Wilayah Sirombu Kabupaten Nias Barat dengan harapan setelah ini dalam penyusunan rencana pengelolaan Kawasan dapat dibentuk pengelolaan ekosistem berbasis masyarakat dan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi.

LSM yang hadir diantaranya dari YAGASU, YAKOPI dan Konservasi Indonesia menyatakan dukungan penetapan Kawasan di Perairan di Wilayah Sirombu Kabupaten Nias Barat dan siap berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan pada Kawasan tersebut.

Kepala Bidang Perikanan Provinsi Nias Barat secara prinsip mendukung pembentukan Kawasan konservasi di wilayah perairan Sirombu, Nias Barat, hal yang utama bahwa keluhan dan aspirasi masyarakat dalam pembentukan kawasan ini terakomodir dengan baik.

Secara teknis tidak ada perubahan dan perbaikan zona yang telah dituangkan dalam draft kajian dan akan disepakati bersama yang dituangkan dalam penandatanganan Berita Acara, Peta Zona dan Draft Kajian Usul Penetapan Zona kawasan Konservasi Perairan Sirombu oleh seluruh perwakilan undangan/peserta yang hadir.

Pada sesi siang dilaksanakan Sosialisasi KepmenKP Tahun 2024 Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Propinsi Sumatera Utara diantaranya Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Salahnama Provinsi Sumatra Utara (KepmenKP 37 Tahun 2024), Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Pini Provinsi Sumatra Utara (KepmenKP 58 Tahun 2024), Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Sawo-Lahewa Provinsi Sumatra Utara (KepmenKP 67 Tahun 2024).

Pemaparan disampaikan oleh Bapak M. Riza Kurnia Lubis, Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Utara, dengan moderator Zufriwandi Siregar. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Salahnama Provinsi Sumatra Utara telah ditetapkan seluas 3.806,14 Ha dengan Kategori Taman, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Pini Provinsi Sumatra Utara telah ditetapkan seluas 44,336,01 Ha dengan Kategori Taman dan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Sawo-Lahewa Provinsi Sumatra Utara telah direview serta ditetapkan seluas 29.130,47 Ha dengan Kategori Taman. Ketiga Kawasan Konservasi dikawal pada tahun 2024 dengan beberapa kali rapat dan pertemuan dari Biro Sekjen KKP, tantangannya terutama pada pengelolaan SDM dan anggaran. Saat ini Propinsi Sumatera Utara sedang mengajukan UPTD khusus pengelolaan Kawasan Konservasi. Tahun depan DKP Sumatera Utara tidak lagi mengajukan penetapan Kawasan namun fokus pada penyusunan Rencana Pengelolaan dan implementasi pengelolaan Kawasan Konservasi yang berkelanjutan. Besar harapan dapat terjalin kolaborasi kerjasama berbagai pihak sebagai tindaklanjut pengelolaan kawasan konservasi pasca penetapan.

3. Kepulauan Riau

a. Rapat Kelompok Kerja Persiapan Penetapan Kawasan Konservasi Bintang II (Tambelan)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 30 Agustus 2024 di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. BPSPL Padang masuk ke dalam Kelompok Kerja Zonasi dan Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan berdasarkan SK Gubernur Kepri Nomor 660 Tahun 2024. Saat ini telah terbentuk UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Provinsi Kepulauan Riau melalui Pergub Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Pengelola Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Pertemuan pada tanggal 2 Agustus 2024 membahas profil calon Kawasan Konservasi Bintang Tambelan serta perkembangan data dan informasi pendukung yang diperlukan. Dalam hal ini, USAID Kolektif telah mendukung upaya pengumpulan data di Bintang Tambelan, mulai dari survei biofisik terumbu karang, ekosistem mangrove dan stok karbon, pemetaan partisipatif, survei sosial dan ekonomi, serta neraca sumber daya laut aspek sosial ekonomi. Selain itu, pertemuan ini juga membahas rencana kerja dan tata waktu akselerasi penetapan calon Kawasan Konservasi Bintang Tambelan dan pembagian peran tim Pokja.

Lebih lanjut, pertemuan pada tanggal 30 Agustus 2024 membahas rancangan zonasi Kawasan Konservasi Bintang Tambelan. Kegiatan pengumpulan data telah dilakukan sebelumnya di Tambelan, mulai dari pemetaan partisipatif, survei biofisik, dan survei sosial ekonomi. Pada kesempatan ini, disampaikan mengenai peta habitat perairan dangkal, habitat perairan dalam, fitur konservasi penting,

fitur pemanfaatan kawasan, fitur tekanan perikanan, fitur unit perencanaan, fitur *locked in*, dan fitur biaya. Informasi-informasi tersebut diolah menggunakan Marxan yang akan menunjukkan area area prioritas best solution. Dalam hal ini, lokasi-lokasi untuk Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas (Sub Zona Pariwisata dan Sub Zona Perikanan Berkelanjutan), Zona Lainnya (Sub Zona lalu lintas kapal dan Sub Zona Rehabilitasi Karang) terpetakan.



Gambar 29. Dokumentasi Rapat Pokja Zonasi KK Bintang Tambelan

b. Lokakarya Persiapan Perencanaan Zonasi Kawasan Konservasi Bintang II (Tambelan)

Kegiatan dilaksanakan pada 9 s.d. 10 Agustus 2024 di Hotel CK Convention Centre, Kota Tanjungpinang. Kegiatan ini didasari oleh Surat Undangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 526.3/41/DKP/2024 pada tanggal 8 Agustus 2024.

Lokakarya ini membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung penetapan dan percepatan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan, yaitu mendefinisikan tujuan dan sasaran untuk kawasan konservasi dan jejaring, kriteria biofisik untuk merancang zonasi kawasan konservasi, dan kriteria desain sosial-ekonomi-budaya untuk mendesain zonasi kawasan konservasi. Pada sesi diskusi, diusulkan target konservasi di Kawasan Konservasi, yaitu penyu dan ekosistem terumbu karang. Selain itu, dipertimbangkan ekosistem mangrove yang berada di luar garis pantai atau di wilayah perairan untuk menjadi target konservasi. Selanjutnya dilakukan pembobotan cost features/biaya konservasi yang terdiri dari 12 kriteria pemanfaatan yang berada di kawasan konservasi. Pembobotan dilakukan untuk mengetahui seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan, luas jangkauan dan usaha dalam memperbaiki ancaman.

Dalam pertemuan ini, dilakukan perumusan Berita Acara yang memuat rekomendasi antara lain:

1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan Konservasi di Perairan Bintang Tambelan Provinsi Kepulauan Riau dari aspek biofisik dan aspek sosial, ekonomi dan budaya.
2. Kriteria desain biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya untuk merancang dan membangun jejaring Kawasan Konservasi di Perairan Bintang Tambelan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pembobotan terhadap ancaman dalam rangka mendukung perancangan zonasi Kawasan Konservasi di Perairan Bintang Tambelan Provinsi Kepulauan Riau.
4. Perlu melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai usulan pantai peneluran penyu yang akan diakomodir untuk dipertimbangkan sebagai zona Inti.
5. Mempertimbangkan lokasi Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sebagai area Kawasan Konservasi Maritim (KKM) di Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadi bagian analisis perumusan atau perluasan zonasi Kawasan Konservasi di Perairan Bintang Tambelan Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 30. Dokumentasi Lokakarya Persiapan Perancangan Zonasi KK di Perairan Bintang Tambelan

c. Konsultasi Teknis Kawasan Konservasi Bintang II (Tambelan)

Kegiatan dilaksanakan pada 3 September 2024 di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini didasari oleh Surat Undangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor B/526.3/56/DKP/2024 pada tanggal 2 September 2024.

Pada kesempatan ini, disampaikan Draft Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Bintang Tambelan yang mengacu pada hasil survey pemetaan partisipatif, biofisik, dan sosial ekonomi. Hasil rapat pokja dilakukan dan sudah disepakati untuk Kawasan Konservasi Bintang Tambelan masuk kategori Taman. Selain itu, disampaikan beberapa peta tematik seperti peta habitat perairan dangkal, habitat perairan dalam, fitur konservasi penting, fitur pemanfaatan kawasan, fitur tekanan perikanan, fitur unit perencanaan, fitur locked in, dan fitur biaya. Informasi-informasi tersebut diolah menggunakan Marxan yang akan menunjukkan area-area prioritas best solution untuk pengelolaan target konservasi yang telah ditentukan. Zonasi yang disusun dalam Kawasan Konservasi Bintang Tambelan terdiri dari Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas (Sub Zona Pariwisata dan Sub Zona Perikanan Berkelanjutan), Zona Lainnya (Sub Zona lalu lintas kapal dan Sub Zona Rehabilitasi Karang). Untuk zona inti di Pulau Berdua, sudah dilakukan penyesuaian berdasarkan rapat pokja sebelumnya yang mana sudah terdapat akses menuju pulau yang sebelumnya zona inti mengelilingi pulau.



Gambar 31. Rapat Konsultasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan

d. Konsultasi Publik Kawasan Konservasi Bintang II (Tambelan)

Kegiatan dilaksanakan pada 5 s.d. 13 September 2024 di Kantor Desa Mentebung, Kantor Desa Pulau Pinang, dan Kantor Kecamatan Tambelan. Kegiatan ini didasari oleh Surat Undangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor B/526.3/58/DKP/2024 pada tanggal 3 September 2024. Kegiatan konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan masukan tanggapan atau saran perbaikan dari pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai rencana zonasi yang telah disusun. Dalam hal ini, penyampaian rencana zonasi dilakukan oleh fasilitator yang dibantu oleh tim pemetaan (GIS) untuk merangkum dan mengumpulkan masukan dari masyarakat langsung.

e. Konsultasi Publik Desa Mentebung dan Desa Pulau Pinang

Kegiatan konsultasi publik pertama dilakukan di Desa Mentebung dan Pulau Pinang yang berjarak 8 jam pelayaran dari Pulau Tambelan Besar. Kegiatan dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 pada pukul 14.00 WIB. Dalam hal ini, tim dibagi menjadi 2 tim untuk melakukan konsultasi publik di Desa Mentebung dan Pulau Pinang. Dalam kesempatan ini, tim merangkum setiap masukan atas rencana zonasi yang telah disusun. Beberapa hal penting dan masukan yang diberikan pada konsultasi publik ini antara lain:

1. Zona inti di Pulau Panau perlu diberi akses agar masyarakat dapat menuju ke pulau tersebut dan sebagai gantinya mengusulkan zona inti di sisi utara Pulau Pinangkuning,
2. Sisi barat Pulau Mentebung sebagai subzona pariwisata,
3. Zona inti di Pulau Pinangseratus perlu disesuaikan untuk diberi akses bagi masyarakat menuju kebun di pulau tersebut,
4. Mengusulkan zona inti di sekitar Pulau Tukonganggan,
5. Menyetujui subzona pariwisata di Pulau Sigan dan untuk Pulau Kepayang disesuaikan menjadi subzona perikanan tangkap karena di pesisir dekat pantai terdapat aktivitas nabbe (tradisi penangkapan ikan tradisional) oleh masyarakat,
6. Menyetujui Pulau Anakaur sebagai subzona pariwisata.

f. Konsultasi Publik Desa di Pulau Tambelan Besar

Kegiatan KP selanjutnya dilakukan pada Hari Selasa dan Rabu, 10 dan 11 September 2024 yang mana peserta dari 5 Desa/Kelurahan di Pulau Tambelan Besar dan Desa Pengikik. Kawasan konservasi di sekitar Pulau Tambelan Besar terdiri dari Kelurahan Teluk Sekuni, Desa Kukup, Desa Kampung Hilir, Desa Batu Lepuk, dan Desa Kampung Melayu. Sementara Desa Pengikik yang berjarak sekitar 97 km dari Pulau Tambelan Besar tetap dilibatkan untuk menyampaikan saran dan masukan mengenai KK di Tambelan. Beberapa hal penting dalam kegiatan konsultasi publik ini adalah:

1. Zona inti di Pulau Bedua perlu diberi akses bagi masyarakat yang memiliki lahan disana,
2. Mengusulkan subzona pariwisata di Pulau Kera dan Pulau Betunda,
3. Pengelolaan di kawasan konservasi mengikutsertakan dan mengkoordinasikan masyarakat di setiap desa,
4. Mengusulkan zona perikanan tangkap disekitar Pulau Benua,
5. Desa Pengikik mendukung kawasan konservasi dan berharap perairan disekitar Desa Pengikik dapat dipertimbangkan menjadi kawasan konservasi karena memiliki nilai konservasi yang tinggi sekaligus ancaman yang tinggi dari armada perikanan tangkap berskala besar,
6. Menyetujui rancangan subzona pariwisata di sekitar Pulau Uwi dan Pulau Genting,
7. Zona inti disekitar Pulau Bumin perlu diberi akses menuju pulau,
8. Penegakan hukum dan pengawasan yang melibatkan masyarakat serta diberi pembinaan serta keaktifan aparat pengawasan di dalam kawasan konservasi,
9. Zona inti di Pulau Tambelan Besar perlu diberikan akses,
10. Menyetujui rancangan subzona pariwisata di Pulau Nangka,
11. Mengusulkan sisi utara Pulau Mendara menjadi subzona perikanan berkelanjutan,
12. Mengusulkan Pulau Lintang, sisi utara Pulau Lintang, Pulau Tamban menjadi subzona pariwisata,
13. Mengusulkan sisi selatan Pulau Kepala Tambelan, sisi selatan Pulau Menggirang Besar dan Pulau Menggirang Kecil menjadi subzona pariwisata,
14. Mengusulkan Teluk Lumpat di Pulau Tambelan Besar sebagai zona inti.

Umumnya masyarakat Tambelan setuju dengan rancangan kawasan konservasi dan zonasi yang telah disusun. Namun, pada zona inti yang mengelilingi pulau, terdapat pertanyaan masyarakat

apakah zona tersebut dapat dilintasi dengan perahu dayung untuk menuju pulau mengingat peruntukan zona inti termasuk no take and no go. Selama ini masyarakat menuju pulau menggunakan perahu dayung/sampan (tanpa motor) untuk menepi ke pulau dan mengangkut hasil kebun menuju perahu motor yang dijangkarkan pada lokasi tertentu. Prinsipnya masyarakat menyetujui terhadap rancangan zona inti yang telah disusun berdasarkan kajian ilmiah, namun keberatan jika tidak dapat mengakses pulau yang menjadi lahan kebun mereka, sehingga perlu adanya penyesuaian kembali.



Gambar 32. Konsultasi Publik Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan

g. Rapat Pokja Evaluasi Hasil Konsultasi Publik I Perencanaan Zonasi Kawasan Konservasi Bintang Tambelan

Kegiatan dilaksanakan pada 19 September 2024 di Ruang Rapat Kerapu, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan hasil Konsultasi Publik I.

Berdasarkan hasil Konsultasi Publik I, Pulau Sedua Besar dan Pulau Sedua Kecil mendapat masukan untuk menjadi subzona pariwisata, sebagian besar usulan zona (zona inti, zona pemanfaatan terbatas, subzona pariwisata, subzona perikanan berkelanjutan, subzona rehabilitasi) yang telah disusun oleh tim Pokja disetujui oleh masyarakat, masukan sarannya terdapat lebih kepada akses ke zona inti ataupun pada saat mereka berkebun masih bisa menangkap ikan di sekitarnya. ada juga penambahan zona/subzonanya, pengurangan, dan juga ada yang diganti lokasinya. hasil penyesuaian tersebut terdapat pengurangan luasan tetapi pengurangan luasan tersebut tidak signifikan yang semula total luasan adalah 1.015.254,66 Ha menjadi 1.010.632,34 Ha dengan rincian zona yang baru adalah Zona Inti 2.227,52 ha (0,22%), Zona Pemanfaatan Terbatas 998.976,22 ha (98,85%), dan Zona Lainnya 9.428,60 ha (0,93%). Perubahan yang dilakukan sesuai dengan permintaan masyarakat baik itu penambahan, pengurangan, dan penggantianannya sebagai berikut:

- Pulau Bedua yang semula zona inti menutupi seluruh pulau, saat ini sudah disesuaikan dan dikurangi zona intinya pada bagian utara pulau, disisakan pada bagian selatan serta menambahkan alur antara Pulau Lipih dan Pulau Bedua;
- Selanjutnya pada Zona Inti 05 dan Pulau Penyemuk yang menutup pulau sudah disesuaikan untuk alur masuk menuju pulau;
- Penambahan Zona Inti (Zona Inti 10) pada ujung selatan Pulau Tambelan;
- Zona Inti Pulau Mentebung dikurangi hampir 50%;
- Menghapus Zona Inti di Pulau Tukonkarang;
- Membuka akses Zona Inti di Pulau Pinangsertur di bagian selatan;
- Menambah Zona Inti di Pulau Pinangkuning;
- Subzona Pariwisata antara Pulau Genting dan Pulau Mandara luasan dikurangi;
- Pada Pulau Nangka luasan Subzona Pariwisata juga dikurangi;
- Penambahan Subzona Pariwisata di Pulau Menggirang Besar dan Pulau Menggirang Kecil;
- Penambahan Subzona Pariwisata di Pulau Pinang;
- Mengurangi Subzona Pariwisata di Pulau Mentebung; dan

- Mengurangi luasan Zona Lainnya di antara Pulau Tiyangnyaru dan Pulau Penggegah.

Kemudian, sesi diskusi menghasilkan poin-poin berikut:

- Menjadi catatan pada daerah Pengikik sebelumnya memberikan saran untuk daerah tersebut dimasukkan dalam Kawasan Konservasi, tapi pada penyusunan Kawasan Konservasi saat ini daerah tersebut tidak masuk dalam alokasi pengusulan, sekiranya perlu ada justifikasi sebagai bahan tanggapan pada saat dilaksanakan Konsultasi Publik II;
- Akses yang dimohonkan oleh warga untuk masuk ke pulau khususnya pada zona inti sudah diakomodir, karena pulau tersebut merupakan kebun milik masyarakat dan perlu adanya akses lalu lintas;
- Terdapat perbedaan luasan antara lokasi pencadangan dan lokasi yang telah ditetapkan dalam RZWP3K, hal ini perlu segera ada kesepakatan guna luasan yang dicantumkan dalam 2 dasaran tersebut memiliki perbedaan yang cukup banyak. Direktorat KEBP menyarankan menggunakan luasan yang telah ditetapkan pada RZWP3K agar proses pengusulan bisa segera terlaksana.



Gambar 33. Dokumentasi Rapat Pokja Evaluasi Hasil Konsultasi Publik I Perencanaan Zonasi Kawasan Konservasi Bintang Tambelan

h. Penyampaian serta Penyerahan Dokumen Zonasi Final Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan

Kegiatan dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang.

Pada kesempatan ini, dilakukan Penyampaian serta Penyerahan Dokumen Zonasi Final Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan dari Kelompok Kerja (POKJA) Kawasan Konservasi Bintang Tambelan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kepulauan Riau. Dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau mendukung dalam penetapan Kawasan Konservasi ini yang mana beliau telah menandatangani Surat Usulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Harapannya kawasan konservasi dengan Kategori Taman ini dapat bermanfaat dan juga mendorong sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis Dokumen Rencana Zonasi Bintang Tambelan dari Camat Tambelan mewakili Kelompok Kerja kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Surat usulan Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan beserta link dokumen pendukung sudah dikirim melalui email Dinas Kelautan dan Perikanan kepada email KKP per tanggal 30 September 2024.



Gambar 34. Dokumentasi Penyampaian serta Penyerahan Dokumen Zonasi Final Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan

i. Evaluasi Teknis Penetapan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi dan Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Evaluasi Teknis Penetapan Usulan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada Surat Undangan Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Nomor B.2894/DJPKRL.5/TU.330/X/2024 pada tanggal 9 Oktober 2024. Kegiatan dilakukan untuk membahas mengenai usulan kawasan konservasi yang telah diajukan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 11 Oktober 2024.

Kegiatan Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan didasarkan pada Undangan Kepala Biro Hukum Nomor B.2054/SJ.4/TU.330/XI/2024 tanggal 21 November 2024. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024 di Ruang Rapat Biro Hukum. Dalam hal ini, kegiatan membahas rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan. Luas Kawasan Konservasi Bintang Tambelan yang akan ditetapkan dan tertuang di rancangan Kepmen adalah seluas 843.609,30 hektar.

j. Penetapan Kawasan Konservasi Bintang II (Tambelan)

Kawasan Konservasi Bintang II telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Bintang II Provinsi Kepulauan Riau. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2024. Luas kawasan konservasi secara keseluruhan seluas 843.609,30 hektar yang terdiri dari zona inti dengan luas 1.467,46 hektar, zona pemanfaatan terbatas seluas 842.093,01 hektar, dan zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona rehabilitasi seluas 48,83 hektar.

k. Survei Pemetaan Partisipatif Kawasan Konservasi Batam

Tim BPSPL Padang melakukan pendampingan percepatan penetapan kawasan konservasi di perairan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara pada hari Selasa s.d. Kamis, 5 s.d 7 November 2024. Tim melakukan pengumpulan data pemetaan partisipatif di Pulau Petong, Pulau Abang, dan Pulau Nguan, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan jenis alat tangkap yang digunakan adalah pancing, jaring, bubu, berkarang (metode tradisional dengan cara menjelajah pesisir pantai saat kondisi surut) dan beberapa nelayan juga mempunyai kelong ikan dingkis (*Siganidae*) di Pulau Nguan. Dari informasi yang didapatkan menunjukkan bahwa nelayan memiliki pekerjaan sampingan seperti membawa kapal penumpang dan mengantar jemput anak-anak sekolah yang berada di pulau-pulau tersebut.

Target tangkapan dan alat tangkap yang bervariasi antara satu pulau dengan pulau lainnya dengan area tangkapannya hampir sama. Jenis ikan yang menjadi target tangkapan seperti ikan kerapu merah, gulama, ikan amoi, ikan tamban, mentimun, kerisi, dan beberapa lobster dan bulu babi. Terdapat informasi dari beberapa nelayan yang pernah melihat mamalia laut seperti lumba-lumba dan penyu yang masih sering terlihat di Pulau Petong, Pulau Abang, dan Pulau Nguan. Dari hasil wawancara dengan nelayan tersebut selanjutnya nelayan di arahkan untuk menunjukkan area tangkapan pada sebuah peta yang sudah disiapkan agar informasi yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengolahan dan analisis untuk diperoleh gambaran rencana kegiatan yang perlu dilakukan selanjutnya.



Gambar 35. Dokumentasi Survei Pemetaan Partisipatif KKD Batam

4. Riau

a. Rapat Koordinasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Rupert Utara

Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2024 melalui aplikasi Zoom dengan turut dihadiri oleh Direktorat KEBP, BPSPL Padang, DKP Provinsi Riau, dan LKKPN Pekanbaru. Kawasan Konservasi (KK) Rupert Utara merupakan salah satu Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Riau yang diinisiasi oleh Pemerintah Riau melalui Pencadangan KK Rupert Utara melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.565/II/2019 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan luas 15.547 Hektar.

Pada kesempatan ini, Direktur KEBP melalui Katimja Penataan Kawasan konservasi Bapak Amerh Hakim menyatakan bahwa KK Rupert Utara ini dapat dikelola oleh Pemda seperti contoh di Nusa Penida Prov. Bali dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti pernyataan Gubernur Riau tidak keberatan untuk mengelola Kawasan ini yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, melaksanakan proses-proses penetapan Kawasan sesuai dengan Permen KP No. 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Dit. KEBP juga akan melakukan koordinasi dengan KSNT PPKT terkait pengelola KSNT dan peluang pengelolaan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah sesuai aturan dan perundangan yang berlaku.

Pada tahun ini dialokasikan anggaran Tugas Pembantuan untuk percepatan penetapan KK Rupert Utara melalui Dinas KP Riau sebesar 250 juta, dan diharapkan tahun 2024 sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. BPSPL Padang berkomitmen untuk berkolaborasi dalam Upaya pengelolaan Kawasan konservasi di Riau dan membantu dalam penetapan KK Rupert Utara, melalui penyediaan SDM monitoring sumberdaya, pemetaan dan perencanaan kawasan konservasi.

b. FGD Pementukan POKJA Kawasan Konservasi Rupert Utara

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 18 Juli di Ruang Rapat Terbuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini, alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi Rupert Utara sudah sesuai. Dan sudah dilakukan kajian awal tentang Alokasi Ruang untuk Kawasan Konservasi di Rupert Utara. Adapun Rupert Utara merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu. Lebih lanjut, disampaikan juga salah satu tahapan untuk penetapan Kawasan konservasi adalah pembentukan Kelompok Kerja. Kelompok Kerja ini nanti akan bersama sama dalam pengelolaan Kawasan Konservasi dari usulan penetapan maupun nanti dalam proses penyusunan rencana pengelolaan. Pokja juga ikut serta dalam penyusunan dokumen awal sampai Dokumen Final. Sementara itu, target konservasi yang teridentifikasi pada tahun 2018 lalu adalah pesut. Untuk tahapan penetapan perlu kajian lebih lanjut terkait habitat yang menjadi target Kawasan Konservasi.



Gambar 36. Dokumentasi FGD Pembentukan Pokja Kawasan Konservasi Rupert Utara

c. Survei dan Konsultasi Publik I Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Rupert Utara

Kegiatan dilaksanakan pada 26 s.d. 30 Agustus 2024 di Pulau Rupert, Kabupaten Bengkalis. Adapun lingkup kegiatan survei adalah pengambilan data biofisik dan sosial ekonomi ke beberapa desa yang ada di Rupert Utara.

Survei sosial ekonomi dilaksanakan selama dua hari di tujuh desa, yaitu Desa Tanjung Medang, Desa Tanjung Punak, Desa Putri Sembilan, Desa Suka Damai, Desa Titik Akar, Desa Teluk Rhu, dan Desa Kadur. Pada dasarnya, masyarakat dan para nelayan mendukung dengan adanya rencana pengelolaan kawasan konservasi ini, dengan harapan kedepannya hewan-hewan laut yang berada diperairan rupert dapat terjaga dan terlindungi. Selain itu Nelayan juga perlu mendapatkan publikasi Peta Rencana Zonasi yang disampaikan agar semua nelayan mengetahui area inti yang dilindungi serta lokasi area tangkap maupun area yang dilarang, serta area yang banyak terdapat lumba-lumba, penyu, pesut dan dugong. Sementara itu, survei biofisik dilakukan dengan pengambilan data kualitas air dan pengamatan kemunculan cetacean. Pada hari pertama survei, dijumpai kemunculan sepasang pesut (*Orcaella brevirostris*) dan pada hari kedua ditemukan cetacean yang tidak teridentifikasi.

Konsultasi Publik I dihadiri oleh 24 orang perwakilan nelayan dan perwakilan stakeholder perangkat pemerintahan di Rupert Utara. Pada sesi ini dipaparkan hasil survei untuk menjangkau masukan dari tamu undangan. Dari Konsultasi Publik I ini didapatkan hasil sepemahaman dan kesepakatan bersama yaitu dengan membatasi sebagian dari Pulau Babi yang menjadi zona ini untuk dilakukan pembatasan aktivitas tertentu, dengan penanda tanganan pengesahan Berita Acara oleh Kabid Kelautan dan Pengawasan DKP Provinsi Riau.



Gambar 37. Dokumentasi Survei dan Konsultasi Publik I Usulan Penetapan KK Rupat Utara

d. Evaluasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Rupat Utara

Kegiatan Rapat Konsultasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Rupat Utara Provinsi Riau didasarkan pada Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Nomor 500.5.5.1/SU/DKP-BKP/X/2024/0185 tanggal 21 Oktober 2024 perihal Pendampingan staf pada Linsek RTRWP Riau dan Konsultasi Teknis Kawasan Konservasi Rupat Utara yang dihadiri oleh Direktorat KEBP, BPSPL Padang, DKP Riau dan Direktorat Perencanaan Ruang Laut. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas DKP Provinsi Riau, Yurnalis Basri, S.Si., M.Si. Beliau menyampaikan terimakasih atas sambutan dari Direktorat KEBP dan support selalu kepada DKP Riau dalam proses percepatan penetapan Kawasan Konservasi Rupat Utara dan Kawasan Konservasi Perikanan Bengkalis. Harapannya dalam tahun ini dapat berjalan lancar menuju Konsultasi Publik II dan mendapatkan Usulan Gubernur sampai ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian yang menjadi salah satu poin dalam proses penetapan KK Rupat Utara yaitu terkait Hak Pengelolaan Kawasan Konservasi pasca ditetapkan oleh Menteri, apakah akan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau menjasi Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang dikelola oleh Pusat.

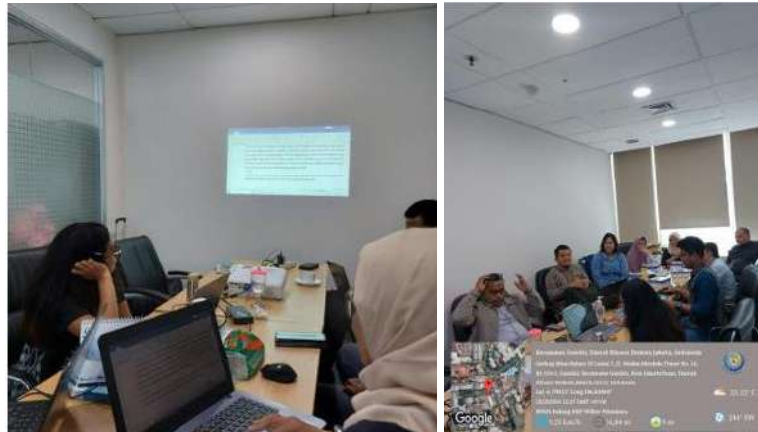
Kemudian dilanjutkan sambutan perwakilan dari Dit. KEBP, Rusdatus Sholihah, S.Pi beliau menyambut baik atas kedatangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan Pendampingan dari BPSPL Padang. Beliau mengucapkan terimakasih banyak dan mengapresiasi atas pencapaian dan respon cepat DKP Provinsi Riau dalam melakukan proses percepatan penetapan KK Rupat Utara dan KK Perikanan Bengkalis.

Kegiatan selanjutnya dilakukan pemaparan oleh Koordinator Kelautan DKP Provinsi Riau Aprilla Yunita, S.Pi., M.Si. Berdasarkan hasil survey lapangan dan analisis Tim Ahli bahwa Luas Rencana Zonasi KK Rupat Utara yaitu 13.49% atau 177 Ha dari Luas Sebaran Habitat Penting sekitar 1314 Ha dengan target konservasi area spawning dan feeding ground pesut, dugong dan lumba-lumba serta mangrove yang berada di depan garis pantai atau area laut. Untuk kondisi lamun sudah sangat jarang ditemukan namun lokasi eksisting yang sekarang akan dijadikan sebagai zona rehabilitasi. Adapun untuk Kawasan Konservasi Perikanan Terubuk Bengkalis ada sedikit masukan terkait alur masuk Pelabuhan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No.196 Tahun 2022. Kemudian menyesuaikan untuk jalur lalu lintas kapal yang awalnya polygon menjadi polyline.

Seluruh saran dan masukan dalam kegiatan konsultasi teknis adalah sebagai berikut dan tertuang dalam Berita Acara:

- Usulan penetapan zona inti akan dibuat beberapa skenario rancangan zonasi sesuai dengan kajian Tim ahli dan pemetaan partisipatif untuk dibahas pada konsultasi publik.
- Luasan Kawasan Konservasi sudah mengikuti pola dalam Dokumen RZ KSNT Pulau Rupat.

- Akan ditambahkan zona rehabilitasi sesuai dengan kondisi eksisting dan potensi Kawasan Konservasi.
- Zona inti agar dipastikan melindungi minimal 10% dari luas sebaran habitat penting.
- Perlu penyesuaian batas Kawasan Konservasi sesuai garis pantai RBI 2021.
- Kewenangan Pengelolaan Kawasan Konservasi agar disampaikan dalam Surat Usulan Gubernur.



Gambar 38. Dokumentasi Evaluasi Teknis Penetapan KKD Rupert Utara

e. Konsultasi Publik II Kawasan Konservasi Rupert Utara

BPSPL Padang mengikuti pendampingan kegiatan Konsultasi Publik II pada tanggal Jum'at, 7 Desember 2024 di Gedung Pertemuan Kantor Camat Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang dihadiri Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau, Dinas Perikanan Kab. Bengkalis, Bappeda Provinsi Riau, TNI AL (Posal) Tanjung Medang, Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) KSOP Tanjung Medang, Distrik Navigasi Tanjung Medang, Camat Rupert Utara, Kepala Desa Sukadamai, Tanjung Medang, Titi Akar, Perwakilan Nelayan, Walhi Provinsi Riau, & Perwakilan Nelayan Tanjung Medang, Sukadamai dan Titi Akar.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang DKP Provinsi Riau, M Hassanullutfi, S.STP yang menyampaikan terimakasih atas kehadiran Tim POKJA Kawasan Konservasi Rupert Utara. Melalui Konsultasi Publik ini merupakan salah satu tahapan yg dilakukan sebelum usulan penetapan Kawasan Konservasi Rupert Utara, DKP Riau berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti BPSPL Padang, Poltek KP Dumai dan stake holder lainnya dalam penyusunan dokumen usulan penetapan ini sehingga harapannya dalam tahun ini dapat berjalan lancar mendapatkan Usulan Gubernur syukur syukur dapat ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sambutan dari Bapak Hendrsiman, S.ST Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian BPSPL Padang menyampaikan bahwa sebagai salah satu Intervensi Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu memperluas Kawasan Konservasi Laut, saat ini luas perairan Indonesia 3,3 jt km², 30% dibidik jadi Kawasan Konservasi atau 990 ribu km². Harapannya dengan usulan penetapan Kawasan Konservasi Rupert Utara seluas 13.771,53 Ha dapat berkontribusi sekitar ± 1.39 Ha terhadap memperluas Kawasan konservasi. Kemudian Beliau bahwa yang menjadi salah satu poin dalam proses penetapan KK Rupert Utara yaitu terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi pasca ditetapkan oleh Menteri, apakah akan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau menjadi Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang dikelola oleh Pusat.

Kemudian dilanjutkan sambutan perwakilan dari Kasi Trantib Kecamatan Rupert Utara. Beliau menyampaikan bahwa Kec. Rupert Utara memiliki 8 desa dengan mata pencaharian nelayan,

pekebun, dan pariwisata. Rupat Utara merupakan daerah dengan potensi pariwisata pantai yang unggul di Provinsi Riau. Adanya penetapan Kawasan Konservasi Rupat Utara diharapkan dapat membantu kesejahteraan nelayan dengan adanya kelestarian yang dihasilkan dari KK. Kegiatan selanjutnya dilakukan pemaparan oleh Koordinator Kelautan DKP Provinsi Riau Ibu Aprilla Yunita, S.Pi., M.Si. Berdasarkan hasil survey lapangan, analisis Tim Ahli dan Konsultasi Teknis dengan Direktorat Konservasi Biota dan Ekosistem Perairan terdapat 2 Alternatif Peta Rencana Zonasi. Kemudian dilakukan diskusi dan penandatanganan kesepakatan Peta Rencana Zonasi oleh Tim POKJA.

Seluruh saran dan masukan dalam kegiatan konsultasi publik 2 adalah sebagai berikut dan tertuang dalam Berita Acara:

- Seluruh Pokja yang hadir menyepakati luas Rencana Zonasi KK Rupat Utara untuk zona inti yaitu 22.26% atau 250,39 Ha dari Luas Sebaran Habitat Penting sekitar 1125,02 Ha dengan target konservasi area spawning dan feeding ground pesut, dugong dan lumba-lumba serta mangrove yang berada di depan garis pantai atau area laut.
- Rencana Zonasi terdiri dari Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas, Zona Lainnya sesuai peruntukkan kawasan yaitu Zona Perlindungan Lamun, Zona Perlindungan Mangrove dan Zona Tambat Labuh/Zona Lainnya.
- Setelah ditetapkan harapannya langsung dipasang tanda batas atau rambu rambu khususnya pada zona inti supaya nelayan mengenali keberadaan seluruh zona inti dan tidak melanggar kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- Tindaklanjut pasca Konsultasi Publik II ini yaitu menyerahkan Laporan revisi Usulan Penetapan dan Rencana Zonasi kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam proses mendapatkan Usulan Gubernur.



Gambar 39. Dokumentasi Konsultasi Publik II Kawasan Konservasi Rupat Utara

5. Jambi

a. FGD Usulan Penetapan Kawasan Konservasi

Kegiatan dilaksanakan pada 13 Agustus 2024 di Aula Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Pada saat itu, KKPD di Provinsi Jambi masih dalam tahap pencadangan dan untuk penetapannya perlu dilakukan pembaruan data melalui survey biofisik. Pencadangan kawasan konservasi pada RZWP3K Provinsi Jambi didasarkan pada Perda kabupaten, seperti Suaka Perikanan di Pantai Desa Dualap dan Mendahara Lestari. Dijelaskan bahwa berdasarkan alokasi ruang kawasan konservasi dalam Perda No. 20 Tahun 2019, Provinsi Jambi memiliki alokasi sebanyak 7 kawasan konservasi, namun karena ada 2 kabupaten maka penetapan dilakukan melalui 2 proses (SK). Dijelaskan pula Kawasan Konservasi yang ada di Perairan Darat (suaka atau lubuk larangan). Saat ini, sudah dibentuk Pokja melalui Keputusan Gubernur Jambi No. 1045/KEP.GUB/DKP-2.2/2023.



Gambar 40. Dokumentasi FGD Usulan Penetapan Kawasan Konservasi

b. Survei Biofisik dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tim BPSPL Padang melakukan pendampingan penetapan kawasan konservasi perairan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Penyuluh Perikanan BPPSDM BRPPUPP Palembang, Perangkat Kecamatan Seberang Kota, dan Universitas Jambi pada Selasa s.d. Jumat, 5 s.d. 8 November 2024 dan Rabu s.d. Kamis, 20 s.d. 21 November 2024.

Tim melakukan pengumpulan data biofisik di Calon Kawasan Konservasi Seberang Kota. Data yang dikumpulkan meliputi informasi jenis mangrove, biota, pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi, informasi Kawasan Konservasi Kerang Darah yang telah ditetapkan Bupati Tanjung Jabung Barat (Perda 12 tahun 2013), dan pengambilan sampel air laut di beberapa titik pengamatan.

Berdasarkan hasil pengamatan, mangrove yang masuk dalam zona kawasan konservasi didominasi oleh jenis *Sonneratia* spp. (Pedada). Jenis alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan umumnya adalah Sondong, Togok, Trawl, Belat, Rawai, dan Bubu/Jebak. Jenis biota yang terdata meliputi Kerang Darah, Udang Ketak, Ketam/Siput Isap, Belangkas, Pari, dan ikan ekonomis lainnya. Selain itu juga diperoleh informasi terkait adanya habitat atau sarang buaya. Alat tangkap lainnya yang digunakan oleh nelayan setempat adalah rawai dan jaring. Pengoperasian alat tangkap dan kegiatan perikanan oleh masyarakat umumnya di kawasan perairannya. Sementara itu, di daerah mangrove tidak banyak pemanfaatan selain untuk pemasangan belat dan mencari umpan rawai. Hasil tangkapan umumnya langsung dibawa ke ibukota kabupaten (Kuala Tungkal) atau tidak ada pengumpul setempat. Jenis-jenis tangkapan meliputi udang ketak, kepiting, ketam, kerang/lokan, ikan pari, ikan duri, ikan senangin, ikan tirusan dan ikan ekonomis lainnya. Selain itu diperoleh informasi adanya kemunculan pesut di perairan calon kawasan konservasi.

Terdapat Unit Pengembangan Budidaya Air Payau (UPBAP) yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dikelola masyarakat terletak di Dusun Bahagia, Kecamatan Seberang Kota. UPBAP direncanakan berfokus pada budidaya pembesaran ketam dan kerang darah. Selain pengumpulan data biofisik, tim juga mengumpulkan data sosial ekonomi melalui wawancara terhadap masyarakat yang hidup di sekitar Calon Kawasan Konservasi Seberang Kota dan nelayan yang lokasi mencari ikannya di sekitar calon kawasan konservasi.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa nelayan memiliki target tangkapan dan alat tangkap yang bervariasi antara satu desa dengan desa lainnya. Pada desa yang dekat dengan kawasan konservasi umumnya bekerja sebagai petani dan sebagian kecil memiliki tambak bandeng.

Sebagian besar tambak tersebut tidak beroperasi akibat adanya akresi atau peningkatan sedimentasi. Hasil tangkapan nelayan umumnya dijual langsung ke pasar ikan di Kuala Tungkal sebagai ibukota kabupaten. Berdasarkan hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa area penangkapan nelayan meliputi daerah Calon Kawasan Konservasi Seberang Kota hingga perairan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Masyarakat mulai mengembangkan pembuatan permen dari buah mangrove serta ditemukan pemanfaatan ruang laut berupa alat tangkap belat dan budidaya kerang darah yang berada di Calon Kawasan Konservasi Seberang Kota di perbatasan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Kepemilikan alat tangkap tersebut sebagian besar oleh masyarakat Provinsi Riau. Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengolahan dan analisis untuk diperoleh gambaran rencana kegiatan yang perlu dilakukan.



Gambar 41. Dokumentasi Survei Biofisik dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

c. Pra Konsultasi Teknis Kawasan Konservasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kegiatan Pra Konsultasi Teknis dilaksanakan pada Kamis, 12 Desember 2024 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Direktorat KEKP. Berdasarkan hasil Pra Konsultasi terkait dokumen awal penetapan Kawasan Konservasi Seberang Kota bersama tim KKP:

1. Target konservasi jangan terlalu banyak dan yang menjadi target adalah biota yg benar ditemukan di lapangan;
2. Peta zonasi (zona inti dan zona pemanfaatan belum tergambar khususnya untuk zona pemanfaatan);
3. Luasan target konservasi belum tergambar; dan
4. Perlu analisa zona inti (tolok ukur) sebagai bahan evaluasi dan monitoring tahunan.

Berdasarkan hasil Pra Konsultasi, target konservasi untuk Calon Kawasan Konservasi Seberang Kota direncanakan adalah kerang darah, kepiting bakau, dan mangrove.



Gambar 42. Dokumentasi Pra Konsultasi Teknis Kawasan Konservasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

6. Sumatra Selatan

a. Rapat Pembahasan Awal Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi di Provinsi Sumatra Selatan

Kegiatan dilaksanakan pada 10 September 2024 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Selatan, Kota Palembang dan secara daring melalui Zoom. Pertemuan ini turut melibatkan OPD lingkup Sumatra Selatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 349/KPTS/DISLUTKAN/2024 tanggal 29 Mei 2024, BPSPL Padang merupakan anggota Pokja Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah Provinsi Sumatra Selatan. Sebelumnya, Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Maspari, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir dan perairan sekitarnya telah dicadangkan sebagai Kawasan Konservasi berdasarkan Perda Provinsi Sumatra Selatan Nomor 2 Tahun 2020. Luas Kawasan Konservasi Pulau Maspari yang telah dicadangkan yaitu 976,03 Ha.

Berdasarkan hasil diskusi, pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Pulau Maspari telah memperoleh dukungan dari anggota Pokja dan OPD terkait. Proses tersebut perlu memerhatikan target konservasi, karakteristik sumber daya yang terdapat di lokasi, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Untuk sementara, jadwal kegiatan lanjutan yang telah direncanakan adalah Rapat Pokja 2 (19 September 2024), Konsultasi Teknis (3 Oktober 2024), Rapat Pokja 3 (8 Oktober 2024), Konsultasi Publik (28 Oktober 2024).



Gambar 43. Dokumentasi Rapat Pembahasan Awal Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi

b. Rapat Pembahasan Dokumen Awal Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi di Provinsi Sumatra Selatan

Kegiatan dilaksanakan pada 30 September 2024 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Selatan, Kota Palembang dan secara daring melalui Zoom. Kegiatan ini didasari oleh adanya Surat Dinas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 523/711/V/Dislutkan/2024 tanggal 24 September 2024.

Pada kesempatan ini, dipaparkan profil Pulau Maspari beserta potensi target konservasi yang ada di pulau tersebut. Sementara itu, OPD yang terlibat juga memberikan masukan, khususnya terkait penentuan target konservasi, kesesuaian peta rencana zonasi, hingga metode survei yang digunakan. Masukan tersebut telah dicatat oleh tenaga ahli, yang menanggapi bahwa desain zonasi kawasan akan didukung dengan analisis marxan dan batas luar kawasan konservasi yang diakomodir adalah sesuai dengan pencadangan yang termuat pada Perda RZWP3K Provinsi Sumatra Selatan.



Gambar 44. Dokumentasi Rapat Pembahasan Dokumen Awal Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi ke-2

c. Konsultasi Teknis Kawasan Konservasi Pulau Maspari

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang mengikuti Konsultasi Teknis Calon Kawasan Konservasi di Pulau Maspari, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Dinas dari Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Nomor B.2754/DJPKRL.5/KP.440/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dan Surat Dinas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 523/730/V/Dislutkan/2024 tanggal 3 Oktober 2024. Konsultasi Teknis bertempat di Ruang Rapat Kawaluso Lt 9 Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan dan secara daring melalui zoom meeting pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan peserta yang berasal dari Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PU BMTR Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan, BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Biro Hukum, Setda Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, BKSDA Sumatera Selatan, BRIN Wilayah Sumatera Selatan, dan Tenaga Ahli dari Universitas Sriwijaya.

Kegiatan Konsultasi Teknis dipimpin dan dibuka oleh PIC Penetapan Kawasan Konservasi Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Cora Mustika. Penyampaian sambutan dari Kepala Bidang PRL, PUD, dan PSDKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Imron. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyusunan Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Maspari. Kegiatan telah berjalan dengan rangkaian pembentukan pokja, rapat pokja pembahasan awal dan rapat pokja pembahasan Dokumen Awal. Rangkaian kegiatan dilakukan dengan berkoordinasi kepada KKP sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penetapan kawasan konservasi memiliki tujuan untuk melindungi laut dan sumber daya. Diharapkan Dokumen Final dapat diterima dengan baik dan dapat dilanjutkan ke Konsultasi Publik dan ditetapkan oleh MKP.

Saran dan tanggapan terhadap dokumen:

- bagaimana data biofisik? data luasan terumbu karang? (tanggapan: telah dilaksanakan survei pada Juli 2024 dan pengumpulan data citra)

- bagaimana data pendaratan penyu? dimana daerah penyu bertelur dan bersarang? bagaimana ketentuan dalam RTRW? (tanggapan: sesuai data dilapangan saat survei dan data BPSPL Padang diketahui daerah penyu mendarat sesuai pada peta)
- saran agar pada bagian daratan ada SK Gubernur untuk pencadangan perlindungan penyu (tanggapan: akan didiskusikan di daerah)
- data ikan karang belum detail
- data mangrove belum detail
- pada zona pemanfaatan terbatas tidak ada alokasi zona budidaya? (tanggapan: tidak ada usulan zona budidaya dan arus yang relatif kuat membuat KJA rusak. Sebelumnya DKP Provinsi Sumatera Selatan pernah budidaya KJA sekitar tahun 2019 dan rusak)
- metode apa yang digunakan dalam penentuan zonasi? (tanggapan: menggunakan marxan)
- titik koordinat dan shp perlu disampaikan
- penyesuaian layout peta sesuai Kepdirjen 41/2021
- zona pemanfaatan terbatas perlu melihat eksisting di lokasi dan kebutuhan kedepan
- belum ada dasar hukum pada dokumen awal, saran dari Biro Hukum, Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk ditambahkan (tanggapan: dasar hukum dapat diambil dari paparan Dit. KEBP)
- pada saat Konsultasi Publik masyarakat diundang
- mangrove yang berada di darat bagaimana? apakah sama seperti penyu? (tanggapan: selama ada di RTRW bisa dimasukkan)
- apakah ada bangunan yang akan meluas ke perairan, bagaimana jika ada investor di Pulau Maspari yang akan memohonkan tambang pasir? apakah mempengaruhi kawasan konservasi? (tanggapan: ketentuan pemanfaatan di kawasan konservasi untuk pertambangan mengikuti Permen KP 31/2020. Hanya ada 1 alokasi zona pertambangan untuk pasir di RZWP3K Sumatera Selatan yang berada di atas Sungai Musi dan sangat jauh dari lokasi Pulau Maspari. Jika ada investor yang memohonkan pertambangan di Pulau Maspari bisa ditolak permohonannya kecuali kegiatan PSN dan kepentingan pengelola).

Rumusan Berita Acara Konsultasi Teknis yaitu:

- Nama kawasan konservasi yang diusulkan dalam pertemuan ini yaitu Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan Pulau Maspari Provinsi Sumatera Selatan,
- Luas kawasan konservasi yang diusulkan yaitu seluas 976,032 Ha yang telah sesuai dengan materi teknis RZWP3K Sumatera Selatan,
- Luas kawasan telah sesuai dengan alokasi Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2040 yaitu 976,032 Ha,
- Target konservasi berupa ekosistem terumbu karang, mangrove, penyu, dan ikan karang,
- Kawasan Konservasi Pulau Maspari Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 3 zona, yaitu zona inti dengan luas 269,571 Ha, zona pemanfaatan terbatas dengan luas 689,912 Ha, dan zona lain dengan luas 16,545 Ha,
- Luas ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi yaitu 83,171 Ha dan di zona inti 75,68 Ha,
- Dipertimbangkan untuk mencadangkan wilayah daratan pada pantai untuk membangun *hatchery* penyu.



Gambar 45. Dokumentasi Konsultasi Teknis Kawasan Konservasi Pulau Maspari

d. Konsultasi Publik Kawasan Konservasi Pulau Maspari

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang mengikuti Konsultasi Publik Dokumen Awal Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan Pulau Maspari, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 523/824/V/Dislutkan/2024 tanggal 13 November 2024. Konsultasi Publik bertempat di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan secara daring melalui zoom meeting pada tanggal 18 November 2024 dengan peserta yang berasal dari Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PU BMTR Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan, BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Biro Hukum, Setda Provinsi Sumatera Selatan, BKHIT Sumatera Selatan, Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, BKSDA Sumatera Selatan, BRIN Wilayah Sumatera Selatan, UPP Kelas III Sungai Lumpur, Tenaga Ahli dari Universitas Sriwijaya, Kades Sungai Lumpur, Tokoh Masyarakat, dan LSM Banyu Biru.

Masukan, tanggapan, atau saran terhadap dokumen:

- Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa pada pilar lingkungan diharapkan tidak hanya sebatas jadi dokumen, tapi akan banyak bentuk program ke level kegiatan dan masuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sehingga tidak akan kesulitan 5 tahun kedepan dalam pelaksanaan programnya.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa target penyu, karang, mangrove, dan ikan karang. Mohon untuk ikan karang didetailkan apa saja? Zona budidaya mohon dialokasikan. Beberapa waktu lalu KJA pernah diujicobakan, jikalau di kawasan konservasi bisa dikembangkan KJA maka diperlukan area budidaya untuk wisatanya seperti pengembangan budidaya minat khusus. Dulu pernah dikembangkan budidaya kerapu lumpur, bawal, kakap putih. Usulan luasan 30-50 Ha.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menanyakan terkait kondisi eksisting dan sumber daya alam disana bagaimana?

- Dinas PU BMTR Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa kawasan konservasi seharusnya diatur dalam tata ruang, bagaimana pengaturan rencana tata ruang di kawasan konservasi ini. Terkait ruang di darat yang masih termasuk kegiatan konservasi diarahkan untuk diakomodir di indikasi program, tidak dapat digambarkan secara langsung karena skalanya terlalu kecil.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan tidak hadir.
- Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan untuk mempertimbangkan zona budidaya.
- Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa banyak pasir disana, di Pulau Maspari tidak masuk Wilayah Pertambangan sehingga tidak boleh mengajukan izin pertambangan di lokasi tersebut.
- Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa Zona Pelabuhan menjadi Zona Labuh. Saran ada bantuan alat bantu navigasi. Bagaimana kajian hukumnya? apa dampak apabila ada pelanggaran disana?
- Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa tidak banyak informasi yang bisa disampaikan.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan tidak hadir.
- Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa tidak berperan banyak dalam proses penetapan kawasan konservasi, tapi sesuai tupoksi akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait Pulau Maspari.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan tidak hadir.
- BPBD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa perlu berkoordinasi dengan BPBD
- Kabupaten Ogan Komering Ilir agar bisa dilihat daerah mana yang berpotensi bencana. Jika sudah diketahui dimana wilayah bencana bisa diberi papan informasi.
- Biro Hukum, Setda Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa setelah Perda 2020 sudah masuk substansi rencana penetapan Kawasan Konservasi Pulau Maspari, di UUCK RZWP3K wajib diintegrasikan dengan RTRWP. Pada saat usulan tahapan untuk Perda revisi sudah tahap akhir di Bina Bangda Kemendagri, masukan saran bisa diakomodir untuk ranah ATR BPN. Bisa dituangkan dalam indikasi program.
- BKIHT Sumatera Selatan mendukung penetapan kawasan konservasi ini, hal yang berkaitan dengan tupoksi karantina adalah adanya komoditas yang dilalulintaskan tidak sesuai dan perlu pelepasliaran seperti benih bening lobster dan kepiting bakau, saat ini pelepasliaran dilaksanakan di provinsi lain, jika sudah ditetapkan maka dapat dilepasliarkan di Provinsi Sumatera Selatan.
- Dinas Perikanan Kab. Ogan Komering Ilir tidak hadir.
- Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir mendukung penuh penetapan Kawasan Konservasi Pulau Maspari. Pentingnya sinkronisasi terkait tata ruang dan diakomodir di kabupaten. Jika untuk pariwisata, maka akan didukung untuk promosinya, jika ada potensi pendapatan daerah dan bagi hasilnya dari pendapatan, serta jika ada investornya. Bappeda akan mengkoordinasikan dengan OPD terkait dari sisi konservasi dan ekonomi.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir mendukung penuh kegiatan pariwisata dengan harapan akan meningkatkan daya tarik pariwisata untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir mendukung penetapan kawasan konservasi.
- Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir mendukung penetapan kawasan konservasi.
- Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang menyampaikan bahwa pada survei terumbu karang, belum mengambil data ikan karang yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu

karang. Hasil tangkap nelayan tradisional perlu dilengkapi karena terkait target ikan karang. Target konservasi untuk ikan karang, perlu dipilih satu jenis ikan karang misal yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga kedepannya bisa diukur populasi dan dampak pengelolaannya. Belum ada data terkait kunjungan wisawatan dan aktivitas yang dilakukan wisatawan di sana. Belum melihat skenario-skenario saat Konsultasi Publik ini dan proses analisisnya menggunakan metode apa? Fitur konservasi dan pemanfaatan penghalangnya seperti apa? Mangrove sebaiknya tidak masuk dalam target konservasi karena masih di luar garis pantai, mangrove bisa dimasukkan dalam target pengelolaan. Layout peta perlu menyesuaikan dengan Kepdirjen PRL 41/2021. Mohon kerja sama seluruh pihak dalam menginformasikan kepada masyarakat mengenai alokasi dan ketentuan zona di kawasan konservasi.

- BKSDA Sumatera Selatan mendukung penetapan kawasan konservasi di Sumatera Selatan. Belum disampaikan kategori kawasan konservasi. Perlu konsistensi mengenai tujuan penetapan kawasan konservasi pada dokumen awal.
- BRIN Wilayah Sumatera Selatan tidak hadir.
- UPP Kelas III Sungai Lumpur mendukung penetapan kawasan konservasi dengan harapan dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat kedepan. Terkait dengan tupoksi pelayaran, jika dijadikan objek wisata maka banyak pengunjung yang akan datang, maka alur pelayaran perlu dikaji kembali guna keselamatan.
- LSM Banyu Biru menyampaikan bahwa kegiatan budidaya KJA tidak bisa dilaksanakan sepanjang tahun karena kuatnya arus dan gelombang di sekitar pulau, hanya pada musim – musim tertentu. Terumbu karang yang rusak hampir mengelilingi seluruh pulau. Umumnya nelayan datang ke pulau untuk beristirahat dan beberapa mengambil telur penyu yang tergambarkan pada zona inti. Jika pengambilan data pada bulan tertentu tidak dapat mewakili data di Pulau Maspari secara keseluruhan.
- Camat Tulung Selapan tidak hadir.
- Kades Simpang Tiga Jaya tidak hadir.
- Kades Pantai Harapan tidak hadir.
- Kades Sungai Lumpur mendukung penetapan kawasan konservasi. Perlu sama-sama saling menjaga laut dan sumber dayanya. Transportasi dari Sungai Lumpur menuju ke Pulau Maspari siap disediakan.
- Tokoh Masyarakat menyepakati bahwa penyu dan ikan yang ada disana dianggap penduduk asli sehingga perlu untuk dilindungi. Harapan dari penetapan ini dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar.
- Ketua Jurusan Prodi Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya mendukung penetapan kawasan konservasi. Siap berkolaborasi kedepannya baik mahasiswa maupun dosen terkait kondisi biofisik yang ada di Pulau Maspari.

Rumusan Berita Acara Konsultasi public yaitu:

1. Nama kawasan konservasi yang diusulkan dalam pertemuan ini yaitu Kawasan Konservasi Perairan Pulau Maspari di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
2. Luas kawasan konservasi yang diusulkan yaitu seluas 976,032 Ha yang telah sesuai dengan materi teknis RZWP-3-K Provinsi Sumatera Selatan dan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2040.
3. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi bahwa Kawasan Konservasi Perairan Pulau Maspari termasuk dalam kategori Kawasan Konservasi Taman.

4. Target konservasi berupa ekosistem terumbu karang, mangrove, penyu dan ikan karang.
5. Kawasan Konservasi Perairan Pulau Maspari Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 3 zona yaitu: zona inti dengan luas 269,571 Ha, zona pemanfaatan terbatas dengan luas 689,912 Ha, dan zona lain dengan luas 16,545 Ha.
6. Rencana kawasan konservasi perairan Pulau Maspari seluas 976,032 Ha sudah diakomodir di dalam Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044. Sedangkan untuk rencana kawasan konservasi wilayah daratan Pulau Maspari yang diusulkan pada Berita Acara Konsultasi Teknis di Jakarta tanggal 8 Oktober 2024 pada point 7 tidak dapat digambarkan dalam pola ruang namun akan diakomodir ke dalam indikasi program di Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044.
7. Zona inti yang ditetapkan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi yaitu sebesar (minimal) 10% dari luas ekosistem dan/atau luas habitat target konservasi yang ditetapkan sebagai zona inti dalam kategori Taman.



Gambar 46. Dokumentasi Konsultasi Publik Kawasan Konservasi Pulau Maspari

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.UBA] Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan Rincian Output (RO) [2362.UBA.001] Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 24. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 4

No	Komponen	Pagu (Rp)	Total Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.UBA.001.051] Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	150.000.000,00	14.040.000,00	132.373.967,00	88,2
Total		150.000.000,00	14.040.000,00	132.373.967,00	88,2

Realisasi anggaran rincian output [2362.UBA.001] adalah 88,2%. Komponen ini terdampak blokir penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp.14.040.000,00.

IKU. 5. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)

Kegiatan inisiasi penyusunan draft Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja di

lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih Lembaga/badan/ organisasi untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama dapat dilakukan dengan kementerian dan Lembaga pemerintah non kementerian. Pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha/ industri/ perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Capaian indikator ini dihitung dari inventarisasi dan penjumlahan draft kerja sama yang disusun/difasilitasi penyusunannya di wilayah kerja BPSPL Padang untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon 1.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian Target IKU 5 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian IKU 5

IKU 5. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	1	2	200 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP	-

Capaian IKU ini pada 2024 adalah 2 Kesepakatan dengan persentase capaian 200% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP yang didukung dengan inisiasi Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Padang dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Syiah Kuala dan Fakultas Perhotelan Universitas Negeri Padang.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124YukyltbQ54o6c8dyvyOEOrL5wcKQy>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU ini tidak terdapat pada tahun 2023 sehingga tidak terdapat perbandingan capaian antara tahun 2023 dan 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 26. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 5 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Konvensi dan Kerjasama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	5	5	5	5	5	Pusat

Dalam hal ini, indikator kinerja Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 27. Perbandingan Capaian Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi (Kesepakatan)	1	2	2	2

Berdasarkan perbandingan capaian antara kedua unit kerja, BPSPL Padang telah melampaui target dalam hal inisiasi Kerja Sama Konservasi. Sementara itu, BPSPL Pontianak mencapainya sesuai target. Perbedaan realisasi antara BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak juga dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing unit kerja.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU ini didukung oleh koordinasi dengan calon mitra, dalam hal ini adalah Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala. Sepanjang tahun 2024, BPSPL Padang telah melaksanakan pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama secara *hybrid* antara luring dan daring. Dengan dilaksanakan koordinasi berbasis daring, masing-masing pihak dapat mengikuti pembahasan lebih fleksibel. Maka dari itu, pencapaian IKU ini sangat terbantu dengan penggunaan aplikasi Zoom yang dapat memfasilitasi pertemuan berbasis daring.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada penggunaan aplikasi Zoom dalam pembahasan Perjanjian Kerja Sama secara daring dengan Universitas Syiah Kuala. Selain itu, pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra konservasi.

1. Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Syiah Kuala

a. Inisiasi dan Prakarsa Kerja Sama

Inisiasi Perjanjian Kerja Sama dimohonkan oleh Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala Nomor 1144/UN11.1.10.1/TU/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

b. Pembahasan

Pembahasan draft Naskah Kerja Sama antara BPSPL Padang dengan FKP Universitas Syiah Kuala dilaksanakan pada 25 Januari 2024, 30 Januari, 2024, 2 Februari 2024, dan 26 Juni 2024. Kemudian, Draft Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui Surat Kepala BPSPL Padang Nomor B.1553/BPSPL.1/TU.210/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.



Gambar 47. Dokumentasi Pembahasan Draft PKS Bersama Tim Sekretariat DJPKRL

c. Penandatanganan

Setelah melalui penyesuaian, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Padang dengan FKP USK tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Melalui Dukungan Penguatan Sumber Daya Manusia, Kajian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang dengan masa berlaku 2024-2027 yang diselenggarakan pada 5 September 2024 di Ruang Rapat Dekanat FKP USK.



Gambar 48. Dokumentasi Penandatanganan PKS dengan FKP Universitas Syiah Kuala

2. Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Pariwisata dan Pergotelan (FPP) Universitas Negeri Padang

a. Inisiasi dan Prakarsa Kerja Sama

Inisiasi Kerja Sama dilakukan dengan penajakan awal melalui pertemuan Zoom pada 7 Agustus 2024. Pada kesempatan tersebut, BPSPL Padang menyampaikan profil dan kegiatan BPSPL Padang serta kebutuhan organisasi yang dapat didukung/dikolaborasikan dengan Universitas Negeri Padang seperti pengembangan kelompok masyarakat di pesisir baik di dalam Kawasan konservasi perairan dan sekitarnya ataupun pengembangan wisata bahari berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang.

b. Pembahasan

Pembahasan konsep dan draft Naskah Kerja Sama antara BPSPL Padang dengan FPP Universitas Negeri Padang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024 dan 27 September 2024. Kemudian draft usulan Perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui Surat Kepala BPSPL Padang Nomor

B.2407/BPSPL.1/KS.329/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Pembahasan oleh Bagian Kerja Sama dan Data, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilaksanakan pada 6 s.d. 7 November 2024. Sebagai tindak lanjut dari catatan yang dihasilkan dari pembahasan tersebut, Naskah Final Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Padang dengan FPP Universitas Negeri Padang disampaikan kepada Kepala BPSPL Padang melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor B.6459/DJPKRL.1/TU.210/XI/2024 tanggal 14 November 2024.

c. Penandatanganan

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Padang dengan FPP Universitas Negeri Padang dilaksanakan di Ruang Rapat Selat Bunga Laut, Kantor BPSPL Padang pada tanggal 2 Desember 2024. Judul Kerja Sama yang ditandatangani adalah “Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang” dengan masa berlaku tahun 2024-2027.



Gambar 49. Dokumentasi Penandatanganan PKS dengan FPP Universitas Negeri Padang

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung oleh alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.PEC] Kerja Sama. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan Rincian Output kegiatan tersebut.

Tabel 28. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 5

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.PEC.001] Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	70.000.000,00	68.126.978,00	97,3
Total		70.000.000,00	68.126.978,00	97,3

Realisasi anggaran pada KRO [2362.PEC] adalah 97,3%.

IKU. 6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)

Bantuan konservasi merupakan bantuan penyediaan sarana dan prasarana konservasi yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan/atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi, diberikan kepada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan, pengawasan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan

Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024. Adapun pencapaian IKU ini dihitung dari jumlah kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai petunjuk teknis tersebut.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKU 6 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian IKU 6

IKU 6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
3	3	3	100	-

Pada tahun 2024, capaian IKU ini adalah tiga kelompok dengan persentase capaian 100% yang didukung oleh penyaluran bantuan konservasi kepada tiga kelompok masyarakat sebagaimana berikut.

Tabel 30. Penerima Bantuan Konservasi Tahun 2024

No	Nama Kelompok	Lokasi	Nilai Bantuan	Nomor dan Tanggal BAST	Item Bantuan
1	Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang	Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat	Rp100.910.070,00	B.1045/BPSPL.1/PRL.440/V/2024 tanggal 4 Mei 2024	1. Mesin tempel: 1 Unit, 2. Genset V-Gen 3000 Watt: 1 Unit, 3. Papan Nama: 1 Unit, 4. WC Portable: 1 Unit, 5. Senter Kepala: 3 Unit, 6. Pelampung: 10 Unit, 7. Tenda: 1 Unit, 8. Kamera Olympus TG-6: 1 Unit, 9. Printer: 1 Unit.
2	Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving	Desa Carocok Anau Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat	Rp98.670.000,00	B.1451/BPSPL.1/PRL.440/VI/2024 tanggal 9 Juni 2024	1. Kamera Underwater TG-7 + Housing PT-059: 1 Set, 2. BCD Cressi Patrol: 2 Set, 3. Diving Set 2 Regulator Cressi MC9 XS Compact Pro: 2 Set, 4. Tabung Scuba Amscud 80 Cuft: 2 Set, 5. Mask Cressi Perla: 2 Set, 6. Snorkel Cressi Mexico: 2 Set,

No	Nama Kelompok	Lokasi	Nilai Bantuan	Nomor dan Tanggal BAST	Item Bantuan
					7. Long Wetsuit Cressi Fast 3 mm: 2 Set, 8. Fin OH Cressi Thor: 2 Set, 9. Long Boot Cressi Patriot 5 mm: 2 Set.
3	Lembaga Ekowisata Pulo Aceh	Dusun I Gampong Bugop Kemukiman Pulau Breueh Selatan, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh	Rp100.005.000,00	B.2122/BPSPL.1/PRL.440/IX/2024 Tanggal 6 September 2024	Pondok Wisata: 1 Unit

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PaHoP4_CYIOs_ByWAru0EKj1wyOGdIUe

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2023, BPSPL Padang telah menyalurkan bantuan konservasi kepada 3 kelompok, yaitu Kelompok Poseidon Diver Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 30 Maret 2023, Kelompok Banyu Biru di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 21 Juni 2023, dan Pokmaswas Hiu Macan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 26 Juli 2024. Maka dari itu, tidak terdapat kenaikan capaian antara tahun 2023-2024 karena memiliki realisasi yang sama.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 31. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 6 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut	20	5	5	5	5	Pusat

Dalam hal ini, indikator kinerja Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 32. Perbandingan Capaian Bantuan Konservasi yang Diserahkan dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan (Kelompok)	3	3	2	2

Berdasarkan perbandingan capaian antara dua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak telah menyalurkan bantuan konservasi kepada kelompok masyarakat sesuai target. Dalam hal ini, kedua unit kerja memiliki persentase capaian 100%.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKU ini didukung dengan dilakukannya identifikasi calon kelompok penerima bantuan yang menyeluruh sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi. Tim pelaksana juga telah menyiapkan form seleksi dalam rangka memperoleh kelompok yang benar-benar sesuai. Melalui tahapan identifikasi, tim BPSPL Padang dapat memahami lingkup kegiatan yang diusung oleh kelompok secara menyeluruh hingga mengidentifikasi kebutuhan sarana/prasarana yang diajukan kelompok. Selain itu, tahapan identifikasi serta verifikasi yang menyeluruh juga dapat menghasilkan kelompok yang benar-benar sesuai dengan persyaratan yang dimandatkan dalam Petunjuk Teknis. Jika kelompok yang terpilih sebagai penerima bantuan tersebut betul-betul layak dan sesuai, diharapkan bantuan pun dapat dimanfaatkan dan mendukung pengembangan upaya konservasi kelompok di wilayahnya. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan KOMPAK, tahapan pengadaan barang jasa merupakan tahapan krusial yang dapat mengancam keberhasilan kegiatan secara tepat waktu. Untuk ke depannya, tim dapat mengupayakan pencegahan permasalahan dalam tahapan pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pemantauan secara menyeluruh dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat pada setiap tahapan penyaluran bantuan konservasi. Hal tersebut mendukung efisiensi anggaran dan waktu yang dibutuhkan.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU ini dapat ditunjang oleh kegiatan koordinasi dan pelaporan progress perkembangan penyaluran bantuan dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Peraliran dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Pelaporan yang tertib dan sesuai dapat mendukung aspek akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.

Pada tahun 2024, kegiatan pendukung IKU 6 antara lain sebagai berikut.

a. Verifikasi Usulan Bantuan Konservasi Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang

Dalam rangka penyaluran bantuan konservasi, BPSPL Padang melaksanakan verifikasi usulan bantuan terhadap Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang di Kabupaten Pesisir Selatan pada Jumat, 23 Februari 2024.

Berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan administrasi Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang telah lengkap dan memenuhi syarat. Namun demikian, terdapat penyesuaian usulan bantuan yang disampaikan karena menyesuaikan dengan Petunjuk Teknis dan aktivitas kelompok. Usulan bantuan yang disepakati adalah mesin tempel, senter infrared, kamera, generator listrik, panel surya, pelampung, laptop, printer, tenda, dan plang nama. Usulan ini akan menjadi acuan untuk proses selanjutnya.



Gambar 50. Dokumentasi Verifikasi Usulan Bantuan Konservasi Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang

b. Penetapan Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang sebagai Penerima Bantuan Konservasi Tahun 2024

Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang yang beralamat di Desa Sungai Pinang, Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2024 melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Nomor B.814/BPSPL.1/PRL.440/IV2024 tanggal 1 April 2024.

c. Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang

Serah terima bantuan konservasi kepada Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang diselenggarakan di Pandan View Mandeh Resort and Resto, Pesisir Selatan pada Selasa, 14 Mei 2024.



Gambar 51. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang

d. Verifikasi Usulan Bantuan Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving

Verifikasi usulan bantuan konservasi Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving dilaksanakan pada 9 Mei 2024. Berdasarkan hasil verifikasi, usulan bantuan yang disepakati adalah kamera bawah air, regulator, Buoyancy Compensator Device (BCD), tabung SCUBA, masker, snorkel, *wetsuit*, *fin open heel*, dan *long boot*.

e. Penetapan Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving sebagai Penerima Bantuan Konservasi Tahun 2024

Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving yang beralamat di Desa Cerocok Anau Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2024 melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Nomor B.1219/BPSPL.1/PRL.440/V2024 tanggal 22 Mei 2024.

f. Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving

Serah terima bantuan konservasi kepada Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving dilaksanakan di Pesisir Selatan pada Senin, 3 Juni 2024.



Gambar 52. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving

g. Verifikasi Usulan Bantuan Kelompok Lembaga Ekowisata Pulo Aceh

Verifikasi usulan bantuan konservasi Kelompok Lembaga Ekowisata Pulo Aceh dilaksanakan pada 1 Juli 2024. Berdasarkan hasil verifikasi, usulan bantuan yang disepakati adalah pondok wisata.

h. Penetapan Kelompok Lembaga Ekowisata Pulo Aceh sebagai Penerima Bantuan Konservasi Tahun 2024

Kelompok Lembaga Ekowisata Pulo Aceh yang beralamat di Dusun I Gampong Gugop Kemukiman Pulau Breueh Selatan, Kabupaten Aceh Besar telah ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2024 melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Nomor B.1745/BPSPL.1/PRL.440/VII2024 tanggal 18 Juli 2024.

i. Serah terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Lembaga Ekowisata Pulo Aceh

Serah terima bantuan konservasi kepada Lembaga Ekowisata Pulo Aceh dilaksanakan di Dusun I Gampong Gugop, Kabupaten Aceh Besar pada 6 September 2024.



Gambar 53. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok LEPA

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 6 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.QEH] Bantuan Kelompok Masyarakat dengan Rincian Output (RO) [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 33. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 6

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.QEH.001.051] Pemberian Bantuan KOMPAK	361.000.000,00	360.352.832,00	99,8
Total		361.000.000,00	360.352.832,00	99,8

Realisasi anggaran komponen [2362.QEH.001.051] adalah 99,8%. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan.

IKU. 7. Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Kelompok)

Masyarakat di kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencarian baru adalah masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencarian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Capaian IKU ini dihitung dari inventarisasi dan penjumlahan masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencarian baru di wilayah kerja BPSPL Padang.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKU 7 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 34. Perbandingan Target dan Capaian IKU 7

IKU 7. Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Orang)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	30	45	150 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP	-

Capaian IKU ini adalah 45 orang dengan persentase capaian 150% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP yang didukung dengan keterlibatan masyarakat yang didukung pengembangan mata pencahariannya. Anggaran pendukung kegiatan ini sempat mengalami blokir. Namun demikian, dalam perkembangannya blokir tersebut telah dibuka yang disertai dengan perubahan Klasifikasi Rincian Output

pendukung kegiatan. Dari 45 orang masyarakat yang difasilitasi pengembangan mata pencahariannya, 12 orang di antaranya (26,67%) berjenis kelamin perempuan.

Adapun kegiatan pendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi:

1. Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir Mendukung Pengelolaan Ekowisata di Kawasan Konservasi Perairan yang diselenggarakan pada 8 s.d. 11 Oktober 2024 di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keterlibatan 24 orang masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah; dan
2. Bimbingan Teknis Penguatan Keberlanjutan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Budi Daya Rumput Laut yang diselenggarakan pada 6 November 2024 di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan keterlibatan 21 orang masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ePO9-XNeJZIW-0yuvYv5NQVHWRavMVdH>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tidak terdapat perbandingan capaian pada tahun 2023-2024. Pada tahun 2023, IKU ini tidak digunakan dalam pengukuran kinerja karena anggaran pendukungnya terdampak blokir hingga akhir tahun.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 35. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 6 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut	20	5	5	5	5	Pusat

Dalam hal ini, indikator kinerja Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 36. Perbandingan Capaian Fasilitas Pengembangan Mata Pencarian Baru dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Orang)	30	45	60	70

Ditinjau dari capaian Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru pada kedua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak telah mencapainya melampaui target. BPSPL Padang memiliki persentase capaian di atas 120%, sementara BPSPL Pontianak memiliki persentase capaian 116,67%.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian Indikator Kinerja ini didukung oleh penyampaian materi yang menyeluruh, sesi diskusi yang interaktif, dan partisipasi aktif dari peserta bimbingan teknis. Selain itu, BPSPL Padang juga menyediakan fasilitator yang membantu peserta selama kegiatan bimbingan teknis berlangsung.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan bimbingan teknis budi daya rumput laut yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada kegiatan tersebut, masyarakat yang dilibatkan merupakan masyarakat lokal sehingga pelibatannya tidak memerlukan biaya perjalanan.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan berikut.

1. Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir Mendukung Pengelolaan Ekowisata di Kawasan Konservasi Perairan

Kegiatan ini dilaksanakan di Imelda Resort, Kota Padang pada 8 s.d. 9 Oktober 2024 dan di Kawasan Ekowisata Penyu Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan pada 10 s.d. 11 Oktober 2024. Adapun tujuan dari bimbingan teknis ini adalah untuk mendukung pemanfaatan Kawasan Konservasi dalam kegiatan ekowisata/wisata bahari. Bimbingan teknis ini melibatkan 24 orang masyarakat dari 13 kelompok konservasi di lingkup wilayah kerja BPSPL Padang.

Materi yang disampaikan pada bimbingan teknis ini meliputi:

- Urgensi Kawasan Konservasi Perairan dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau Kecil yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Umum BPSPL Padang, Fahrur Rozi, S.H.,
- Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Sumatra Barat yang disampaikan oleh Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat, Wandu Afrizal, S.Pi., M.Si.,

- Ekowisata Berbasis Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disampaikan oleh akademisi dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang, Dr. Retnaningtyas Susanti, S.Ant., M.Sc.,
- Manajemen Organisasi Kelompok Masyarakat yang disampaikan oleh praktisi pemberdayaan masyarakat dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Yuafriza,
- Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Sumber Daya Pesisir dan Laut yang disampaikan oleh Tim Fasilitator BPSPL Padang.



Gambar 54. Dokumentasi Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir Mendukung Pengelolaan Ekowisata di Kawasan Konservasi Perairan

2. Bimbingan Teknis Penguatan Keberlanjutan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Budi Daya Rumput Laut

Kegiatan ini diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rentang waktu 5 s.d. 7 November 2024 dengan rangkaian kegiatan berupa pemetaan potensi pemanfaatan di sekitar Kawasan konservasi Selat Bunga Laut, identifikasi kebutuhan pengembangan melalui FGD, dan bimbingan teknis. Kegiatan ini melibatkan 21 orang masyarakat di sekitar Kawasan konservasi Selat Bunga Laut dari Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).

Materi yang disampaikan pada bimbingan teknis ini meliputi:

- Teknis Budidaya Rumput Laut yang disampaikan oleh Yuwana Puja dari BPBL Lampung,
- FGD Identifikasi Penguatan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Konservasi Selat Bunga Laut yang dipandu oleh fasilitator BPSPL Padang.



Gambar 55. Dokumentasi Bimbingan Teknis Penguatan Keberlanjutan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Budi Daya Rumput Laut

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 7 awalnya didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.REA] Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem dengan Rincian Output (RO) [2362.REA.003] Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan. Namun demikian, KRO tersebut mengalami blokir. Dalam perkembangannya, terjadi pembukaan blokir dan kegiatan ini memiliki KRO dan RO pendukung yang berbeda. Saat ini IKU 7 didukung oleh KRO [2362.SCC] Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan dengan RO [2362.SCC.002] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 37. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 7

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.SCC.002.051] Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi	200.000.000,00	194.605.775,00	97,3
Total		200.000.000,00	194.605.775,00	97,3

Realisasi anggaran komponen [2362.SCC.002.051] adalah 97,3% karena sempat terkendala oleh blokir anggaran. Komponen ini memiliki pagu senilai Rp200.000.000,00 yang bersumber dari rupiah murni senilai Rp100.000.000,00 dan bersumber dari PNBP senilai Rp100.000.000,00.

IKU. 8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja kerja BPSPL Padang adalah Jenis ikan yang diintervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Capaian IKU ini dihitung dari inventarisasi dan penjumlahan jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang.

Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah yang dilaksanakan, melalui:

- Pendataan jenis ikan dilindungi/terancam punah dengan target jenis: sidat, teripang, penyu, karang, ikan belida, terubuk, ikan bilih dan arwana,
- Perbaikan habitat/pemulihan populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan dengan target jenis karang
- Penyadartahuan/edukasi dan sosialisasi keanekaragaman hayati perairan dilindungi/terancam punah serta Penanganan biota laut dilindungi/terancam punah dengan target jenis biota laut dilindungi.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKU 8 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 38. Perbandingan Target dan Capaian IKU 8

IKU 8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
10	8	11	137,5 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerja KKP	10

Capaian IKU ini adalah 11 jenis ikan dilindungi yang didukung pengelolaannya dengan persentase capaian 137,5% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerja KKP. Jenis ikan tersebut meliputi jenis sidat, teripang, penyu, karang, belida, terubuk, bilih, arwana, *cetacean*, hiu paus dan pari sungai raksasa. Adapun kegiatan pendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini secara garis besar meliputi:

1. penyediaan data informasi jenis ikan dilindungi/terancam punah meliputi jenis sidat, terubuk, teripang, penyu, karang, belida, bilih, karang dan arwana;
2. rehabilitasi populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah meliputi jenis karang;
3. respon cepat penanganan biota dilindungi/terancam punah meliputi jenis penyu, *cetacean*, hiu paus dan pari sungai raksasa; dan
4. sosialisasi biota dilindungi/terancam punah di Provinsi Jambi, Sumatra Selatan dan Kepulauan Riau.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X0rRTKYvH0Nz7e3qR0ac5aRijiqiNrJi>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2024, terdapat peningkatan capaian dari tahun sebelumnya sebesar 9,09% yang didukung dengan pelaksanaan penanganan biota dilindungi pari sungai raksasa dan arwana yang tidak terealisasi pada tahun 2023. Selain itu, pada tahun 2023 juga terdapat kegiatan penanganan jenis dugong yang tidak terealisasi pada tahun 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 39. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 8 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan	6	10	14	18	20	Pusat

Dalam hal ini, indikator kinerja Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 40. Perbandingan Capaian Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi (Jenis)	8	11	7	8

Ditinjau dari capaian Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi pada kedua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak telah mencapainya melampaui target. BPSPL Padang memiliki persentase capaian di atas 120%, sementara BPSPL Pontianak memiliki persentase capaian 114,29%. Persentase capaian BPSPL Padang lebih tinggi karena didukung oleh adanya penanganan jenis ikan terdampar meliputi jenis *cetacean*, hiu paus dan pari sungai raksasa yang merupakan capaian tambahan.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya pencapaian IKU 8 tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Dalam pendataan sidat, penyu, belida, terubuk, dan ikan bilih, tim BPSPL Padang dibantu oleh enumerator sehingga diperoleh pendataan *time series*. Pada jenis karang, pendataan juga dibantu oleh Kelompok Masyarakat di Aceh Barat Daya, Pesisir Selatan, dan Bintan. Selain itu, dukungan dari pihak lain juga terdapat pada kegiatan respon cepat penanganan biota terdampar. Pada kegiatan respon cepat, BPSPL Padang kerap berkolaborasi dengan Kelompok Masyarakat, Dinas, LSM, dan stakeholder setempat lainnya. Sementara itu, pada kegiatan yang membutuhkan survei lapangan secara langsung, seperti monitoring *coral stock center*, pendataan sidat, pendataan arwana, dan monitoring teripang, tim pelaksana juga melakukan perencanaan dan persiapan yang mengantisipasi adanya kemungkinan cuaca buruk. Tim survei juga membekali diri dengan peralatan yang memadai untuk survei menyesuaikan dengan data yang dibutuhkan dan tipe kegiatan yang dilakukan. Antisipasi tersebut diperlukan untuk memastikan keselamatan tim dan kesesuaian data yang terkumpul. Tanpa adanya pertimbangan tersebut, pelaksanaan kegiatan dapat terhambat dan berimplikasi pada kualitas pendataan. Selama proses pelaksanaan kegiatan, BPSPL Padang telah mengantisipasi terjadinya hal-hal yang diduga dapat menghambat capaian sehingga tidak ditemukan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam penyeteroran data dari enumerator berbasis daring. Selain itu, terjalannya kerja sama dan komunikasi aktif dengan stakeholder lain juga dilakukan untuk penanganan jenis ikan terdampar di lokasi yang terkendala jarak dan akses.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU 8 dapat ditunjang oleh kegiatan supervisi yang perlu dilakukan secara rutin dan menyeluruh kepada tenaga enumerator. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar kualitas data yang dikumpulkan dapat terjaga. Dalam hal kegiatan penanganan, koordinasi dan komunikasi aktif dengan *stakeholder* lain juga

penting agar dapat menjangkau lokasi keterdamparan yang terkendala jarak dan akses. Berikut adalah kegiatan pendukung keberhasilan capaian IKU 8.

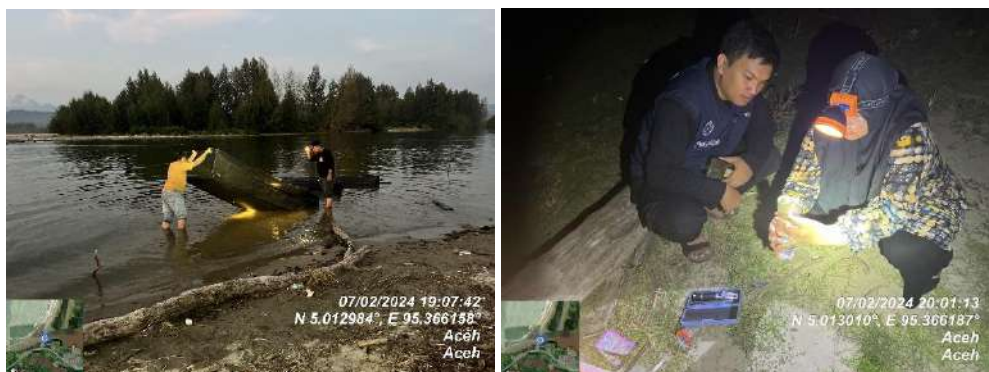
1. Sidat

a. Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Jaya

Pendataan sidat di Kabupaten Aceh Jaya dilaksanakan di Kecamatan Indra Jaya selama sebelas bulan yang dimulai pada bulan Januari hingga Desember atau lebih tepatnya 60 hari dengan dibantu oleh dua tenaga enumerator. Dalam kurun waktu tersebut, pendataan dilakukan setiap bulan gelap yaitu tanggal 25 s.d. 3 pada kalender hijriah yang dilakukan selama 4 s.d. 6 hari setiap bulannya menyesuaikan dengan kondisi. Adapun metode yang dilakukan adalah survei langsung menggunakan alat tangkap bubu jaring yang memiliki frame besi dengan dimensi Tinggi 50 cm, Lebar 100 cm, Panjang 300 cm yang dilakukan mulai pukul 18.00 dan dicek secara berkala setiap satu jam sekali hingga pukul 24.00 atau sebanyak 6 kali pengangkatan.

Hasil pendataan sidat stadia *glass eel* pada tahun 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Jaya didapatkan hasil sebanyak 3 individu sidat stadia *glass eel* yang berhasil terdata di sepanjang tahun. Seluruh sidat tersebut terdata pada tanggal 3 November 2024 penanggalan masehi pada pukul 22.00 WIB atau bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal penanggalan hijriah.

Terkait kondisi perairan, suhu rata-rata yang diperoleh adalah 24,25°C sepanjang tahunnya dengan nilai suhu yang paling sering keluar adalah 24,25°C. Sementara itu, salinitas rata-rata yang diperoleh adalah 9,22 ppt sepanjang tahunnya dengan nilai paling sering muncul 5 ppt. Adapun pH air rata-rata sepanjang tahun didapatkan nilai 7,96 dengan nilai yang paling sering didapatkan yaitu 7,6.



Gambar 56. Dokumentasi Supervisi Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Jaya



Gambar 57. Sidat Stadia Glass Eel yang Terdata di Aceh Jaya

Pendataan sidat di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh telah dilaksanakan selama tiga tahun dengan lokasi muara, metode dan alat tangkap yang sama. Berdasarkan hasil

pendataan tersebut, terjadi penurunan yang sangat signifikan sebagaimana disajikan pada table berikut.

Tabel 41. Rekapitulasi Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Jaya

Bulan	Tahun Pendataan		
	2022	2023	2024
Januari	12	9	0
Februari	0	31	0
Maret	4	24	0
April	0	0	0
Mei	5	53	0
Juni	13	221	0
Juli	15	0	0
Agustus	2	814	0
September	2	0	0
Oktober	2	44	0
November	3	0	3
Desember	0	2	0
Total	58	1198	3

Didapatkan 1.198 Individu pada Pendataan di Tahun 2023 dengan puncak kemunculan terjadi pada bulan Agustus dengan 814 Individu tertangkap. Sedangkan pada Agustus 2024 tidak didapatkan individu *glass eel* di lokasi pendataan dan hanya 3 Individu di 1 tahun penuh pendataan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil tersebut yaitu faktor alam seperti muara, arus dan ruaya sidat itu sendiri. Namun faktor sumber daya manusia/enumerator juga perlu dilakukan evaluasi agar data yang dihasilkan dapat lebih akurat.

b. Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Besar

Pendataan sidat di Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan di Muara Beureunut, Kecamatan Seulimeum. Metode yang dilakukan adalah pengumpulan data terkait potensi sidat pada stadia *glass eel* menggunakan tiga alat tangkap bubu ukuran 3 m x 1 m x 50 cm yang dilaksanakan setiap triwulan untuk mengetahui puncak kemunculan sidat. Pendataan telah dilaksanakan pada 9 s.d. 10 Maret 2024, 7 s.d. 8 Mei 2024, 5 s.d. 6 Juli 2024, dan 1 s.d. 3 Desember 2024. Pengambilan data sidat dilakukan mulai dari Pukul 18.00-24.00 WIB dengan pengecekan alat tangkap setiap 1 jam.

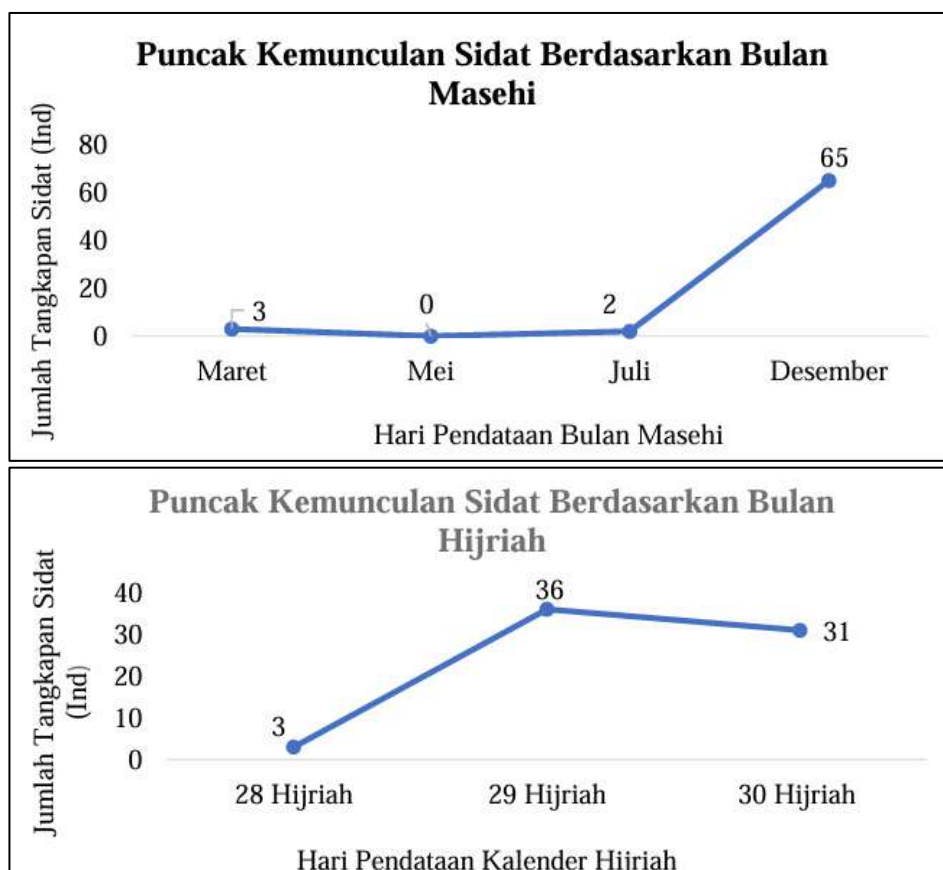


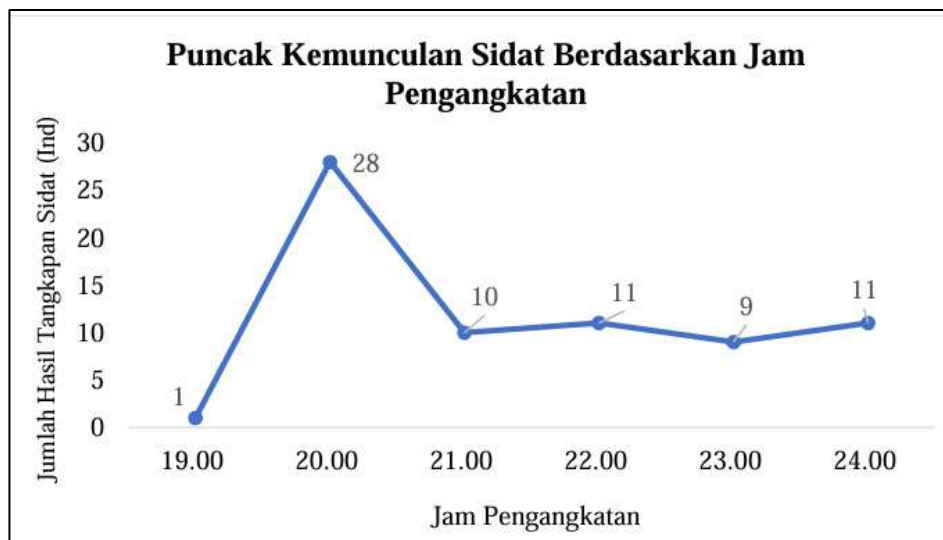
Gambar 58. Dokumentasi Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Besar



Gambar 59. Hasil Tangkapan Sidat Stadia Glass Eel di Aceh Besar

Berdasarkan hasil pendataan tahun 2024 diperoleh hasil tangkapan sidat stadia *glass eel* sebanyak 70 individu dengan rincian 3 individu pada bulan Maret, 0 individu pada bulan Mei, 2 individu pada bulan Juli dan 65 individu pada bulan Desember. Adapun puncak kemunculan sidat stadia *glass eel* berdasarkan bulan masehi yaitu pada bulan Desember dengan jumlah 65 individu sedangkan berdasarkan kalender hijriah puncak kemunculan terjadi pada tanggal 29 hijriah dengan total 36 individ dan puncak kemunculan sidat ditinjau berdasarkan jam pengangkatan terjadi pada Pukul 20.00 WIB dengan total 28 individu.





Gambar 60. Hasil Pendataan Sidat Stadia Glass Eel di Aceh Besar

Berdasarkan pengambilan data pengukuran kualitas air diperoleh suhu disekitar lokasi pendataan berkisar antara 24°C-29°C, Ph 7,8-8, dan salinitas 0-30 ppt.

Hasil pendataan Tahun 2024 menunjukkan bahwa Muara Sungai Beureunuet, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar kurang memiliki potensi jenis sidat stadia *glass eel* karena kemunculan sidat sangat sedikit. Berdasarkan pengamatan melalui dokumentasi yang diambil oleh drone muara sungai menunjukkan perubahan morfologi yang signifikan setiap Triwulannya. Pada Triwulan IV (TW IV), mulut muara terlihat lebih terbuka lebar dan dalam dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya pada TW I (tidak dilakukan pengambilan dokumentasi via drone) TW II dan TW III, yang menandakan adanya perubahan alami pada struktur muara yang semakin lebar dan dalam pada TW IV.

c. Pendataan Sidat di Kabupaten Pesisir Selatan

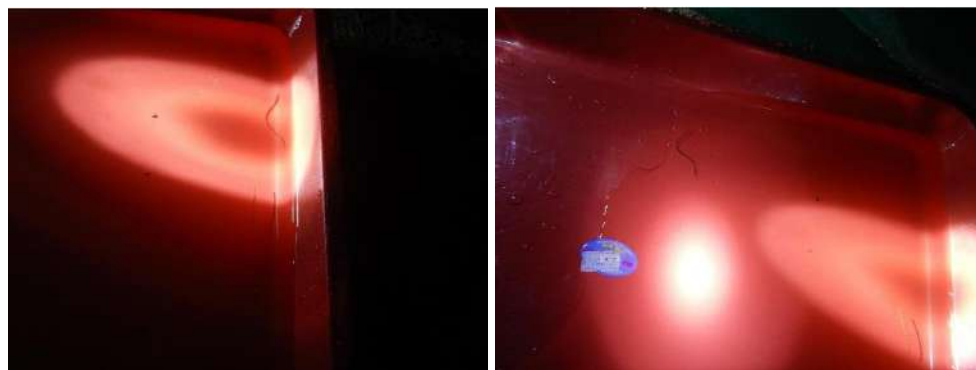
Pendataan ikan sidat stadia glass eel dilakukan pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2024 atau tanggal 27 – 30 Rabi'ul Akhir yang bertepatan pada saat bulan gelap. Pendataan ikan sidat dilakukan pada malam hari, tepatnya sejak kondisi air laut mengalami pasang naik. Hal ini sebagaimana tertuang di pedoman pendataan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Apendiks CITES. Lokasi pendataan sidat stadia glass eel dilakukan di Muara Karang Taungguak dan Muara Bukit Tapat, Nagari Sungai Pinang di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Gambar 1). Kegiatan pendataan sidat dilakukan di lokasi tersebut berdasarkan surat Kepala BPSPL Padang nomor B.2391/BPSPL.1/PRL.420/X/2024 perihal Permohonan Perubahan Lokasi Kegiatan Pendataan Jenis Sidat atas pertimbangan keselamatan tim bahwa lokasi Sungai Batang Antokan merupakan habitat esensial buaya muara.

Pendataan sidat dilakukan menggunakan 2 (dua) jenis alat tangkap, yaitu bubu yang diletakkan sejajar badan Sungai dengan mulut bubu menghadap muara sungai atau arah arus laut datang serta alat tangkap seser. Alat tangkap bubu dibuat dari jaring halus yang dibentuk menjadi kubus dengan ukuran 2 meter x 1 meter x 1 meter. Alat tangkap dipasang di muara pada saat mulai gelombang pasang dengan jumlah 3 bubu pada Muara Karang Taungguak dan 1 bubu pada Muara Bukit Tapat. Pemasangan alat tangkap bubu dilakukan mulai pukul 01.00 hingga 05.00 WIB, mempertimbangkan

kondisi pasang naik yang tepat pada malam hari terjadi pada jam tersebut. Adapun pengecekan dilakukan secara berkala setiap 20 menit sekali.



Gambar 61. Pendataan Sidat di Pesisir Selatan



Gambar 62. Sidat Stadia Glass Eel yang Terdata

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, kelimpahan glass eel di Muara Karang taungguak selama kurun waktu 3 malam berturut-turut sebanyak 2 ekor, sedangkan kelimpahan glass eel yang diperoleh di Muara Bukit Tampak tidak dapat ditemukan. Kelimpahan rata-rata glass eel di Muara Karang Taungguak adalah 0,66 ekor/malam, sedangkan kelimpahan rata-rata glass eel di Muara Bukit Tampak adalah 0 ekor/malam.

Luas area penangkapan di Muara Karang Taungguak dihitung dengan mengalikan jumlah alat tangkap (3) x jarak antar alat tangkap (0,5 meter) x lebar permukaan area penangkapan (10 meter), sehingga luas area penangkapan di Muara Karang Taungguak yaitu 15 meter persegi (m^2). Luas area penangkapan di Muara Bukit Tampak dihitung dengan mengalikan jumlah alat tangkap (3) x jarak antar alat tangkap (0,2 meter) x lebar permukaan area penangkapan (3 meter), sehingga luas area penangkapan di Muara Bukit Tampak yaitu 1,8 meter persegi (m^2).

Tabel 42. Kepadatan Benih Sidat

	Karang Taungguak	Bukit Tampak
Kelimpahan Total dalam 3 Malam	2 ekor	0 ekor
Kelimpahan Rata-Rata per Malam	1 ekor/malam	0 ekor/malam
Luas Area Penangkapan	15 m ²	1,8 m ²
Kepadatan Rata-Rata per Meter Persegi per Malam	1 ekor/m ² /malam	0 ekor/m ² /malam

Adanya penurunan hasil pendataan benih sidat pada tahun 2024 di Sumatra Barat juga diikuti dengan penurunan tren hasil pendataan benih sidat di beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah kerja BPSPL Padang lainnya yang melakukan pendataan Sidat yakni di Aceh. Sebagaimana pada pertemuan Workshop Evaluasi Implementasi RAN Konservasi Ikan Sidat di Semarang pada 7 November 2024, di mana berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi bahwa pada bulan Oktober hingga awal November 2024 jumlah sidat stadia glass eel berkurang dari waktu sebelumnya. Di samping itu, pada forum yang sama Profesor Haryono dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan bahwa diduga terjadinya perubahan pola atau pergeseran waktu optimal puncak ruaya sidat di perairan Indonesia yang diakibatkan perubahan iklim global yang sebelumnya terjadi pada Oktober hingga April yaitu pada tanggal 25 - 30 bulan qomariah (bulan gelap), namun hal ini tentunya memerlukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan pendataan kualitas air di lokasi, bahwa Ikan sidat masih dapat beradaptasi dengan suhu lingkungan 25°C hingga 28°C yang merupakan suhu optimal untuk laju pertumbuhan ikan sidat (Matsui 1982 dalam Herianti 2005). Nilai pH dan oksigen terlarut yang diperoleh di lokasi pendataan masih dalam keadaan normal untuk kehidupan organisme perairan apabila mengacu pada KepMen LH No. 51 Tahun 2004 untuk baku mutu parameter kualitas perairan air laut pada organisme perairan.

2. Teripang

Pendataan teripang di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan pada 3 s.d. 6 Maret 2024. Adapun metode yang digunakan adalah wawancara terkait pemanfaatan teripang dan survei sebaran teripang. Responden pada wawancara adalah pengepul dan nelayan teripang. Berdasarkan hasil wawancara, teripang yang paling banyak dikumpulkan adalah teripang gamat/kacang, pulut, dan karang dengan rata-rata per hari terkumpul kurang dari 10 kg atau sebulan mencapai 50 kg. Harga jual teripang tertinggi, yaitu jenis gamat, mencapai Rp950.000,00/kg dan tertinggi adalah teripang pulut dan karang seharga Rp350.000,00/kg. Untuk menangkap teripang, nelayan menyelam secara manual pada kedalaman 4 s.d. 7 meter dan menggunakan kompresor hingga kedalaman 10 s.d. 15 meter tanpa bantuan alat tangkap. Penangkapan dilakukan sepanjang tahun.

Lebih lanjut, survei sebaran teripang dilaksanakan dengan metode jelajah di tujuh titik survei, yaitu Simakakkang, Pulau Siburu, Putotogat, Jati, Taitaiumatsiteut bagian luar, Simobuk, dan Taitaiumatsiteut bagian dalam. Adapun panjang lintasan di tujuh lokasi survei tersebut berkisar antara 300-900 meter dengan kedalaman 3 s.d. 20 meter. Penyelaman dilakukan selama 3 malam bersama nelayan lokal. Hasil pendataan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini dan akan dianalisis lebih lanjut.

Tabel 43. Hasil Survei Sebaran Teripang di Pulau Sipora

No	Lokasi	Hasil Survei
1	Simakakkang	Ditemukan 6 ekor teripang dari jenis <i>Thelenota anax</i> , <i>Stichopus</i> spp., dan <i>Holothuria edulis</i>
2	Pulau Siburu	Ditemukan 14 ekor teripang dari jenis <i>Bohadschia marmorata</i> , <i>Stichopus</i> spp., <i>Holothuria atra</i> , dan <i>Holothuria edulis</i>
3	Putotogat	Ditemukan 10 ekor teripang dari jenis <i>Bohadschia marmorata</i> , <i>Stichopus</i> spp., dan <i>Holothuria atra</i>
4	Jati	Ditemukan 8 ekor teripang dari jenis <i>Bohadschia marmorata</i> , <i>Stichopus</i> spp., dan <i>Holothuria atra</i>
5	Taitaiumatsiteut bagian luar	Ditemukan 37 ekor teripang dari jenis <i>Stichopus</i> spp., <i>Pearsonothuria graeffei</i> , <i>Holothuria fuscocinerea</i> , <i>Bohadschia vitiensis</i> , <i>Bohadschia marmorata</i> , dan <i>Holothuria atra</i>
6	Simobuk	Ditemukan 15 ekor teripang <i>Pearsonothuria graeffei</i> , <i>Bohadschia vitiensis</i> , <i>Bohadschia marmorata</i> , dan <i>Holothuria atra</i>
7	Taitaiumatsiteut bagian dalam	Ditemukan 9 ekor teripang dari jenis <i>Stichopus</i> spp., <i>Pearsonothuria graeffei</i> , dan <i>Bohadschia vitiensis</i> .



Gambar 63. Dokumentasi Pendataan Teripang di Pulau Sipora, Kabupaten Kep. Mentawai

Berdasarkan pendataan teripang yang telah dilakukan di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat disimpulkan berikut:

- Responden baik dari nelayan maupun pengepul teripang menerangkan bahwa teripang yang sering dimanfaatkan di Pulau Sipora antara lain berasal dari jenis *Stichopus* spp., *Bohadschia* spp., *Actinopyga echinities*, *Thelenota anax*, dan *Holothuria atra*. Musim penangkapan teripang umumnya bergantung pada fase bulan timbul.
- Penangkapan dilakukan pada malam hari dengan rata-rata hasil tangkapan sebanyak <25 ekor. Daerah penangkapan tersebar di perairan sekitar Pulau Sipora antara lain, yaitu perairan Pulau Taitaiumatsiteut, Awer, Kerait, Simobuk, Goisooan, Betumonga, Batu Hitam, Lampu Merah, dan Lampu Putih.
- Harga teripang berbeda tiap jenisnya yang berkisar antara Rp350.000 – Rp1.200.000. Teripang yang ditangkap kemudian dijual ke pengepul di Desa Tuapejat, Pulau Sipora dan Sikakap, Pulau Pagai Utara. Kemudian, alur perdagangan berlanjut ke Medan dan Padang.
- Teripang yang ditemukan di tujuh lokasi pendataan perairan Pulau Sipora terdiri dari jenis *Thelenota anax*, *Stichopus ocellatus*, *Stichopus quadrifasciatus*, *Stichopus horrens*, *Holothuria edulis*, *Bohadschia marmorata*, *Holothuria atra*, *Stichopus* sp., *Stichopus herrmanni*, *Pearsonothuria graeffei*, *Holothuria fuscocinerea*, dan *Bohadschia vitiensis*.
- Nilai kepadatan teripang tertinggi ditemukan pada Track 5 (Taitaiumatsiteut bagian dalam) dengan nilai 0,056 sedangkan kepadatan terendah terdapat pada Track 4 (Jati) dengan nilai 0,004.
- Sebanyak lima dari tujuh lokasi pendataan memiliki keanekaragaman jenis teripang kategori sedang sedangkan dua lainnya masuk kategori rendah. Nilai H' pada Track 5 paling tinggi di antara lintasan lainnya dengan nilai 1,87 karena ditemukan 37 individu dari 8 spesies teripang. Track 2 menjadi lokasi pendataan dengan kategori keanekaragaman jenis paling rendah dengan nilai 0,90.
- Sebaran individu antar jenis yang merata ditemukan pada Track 1 (Simakakkang), Track 7 (Taitaiumatsiteut bagian dalam), Track 5, dan Track 4 ditandai oleh nilai indeks keseragaman (E) mendekati 1. Sementara itu, nilai E mendekati 0 yang menggambarkan sebaran individu antar jenis kurang merata atau ada dominasi jenis, yaitu terdapat di Track 2 (Pulau Siburu), Track 3 (Putotogot), dan Track 6 (Simobuk).

3. Penyu

a. Pendataan Penyu di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pendataan pendaratan penyu dilaksanakan di Pantai Buggeisiata, Desa Betumonga, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pendataan dilaksanakan pada musim peneluran penyu, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, dan Desember dengan sistem *shifting* pada setiap malam dibantu oleh tenaga enumerator. Adapun pendataan aktivitas pendaratan, jejak, dan sarang dilaksanakan melalui patroli malam. Kegiatan ini didukung oleh Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Padang dengan Yayasan Penyu Indonesia.



Gambar 64. Dokumentasi Pendataan Penyu di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Hasil pendataan menunjukkan bahwa penyu yang mendarat adalah penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*) dan penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*). Tabulasi data pendaratan penyu di Site Desa Betumonga disajikan pada tabel berikut.

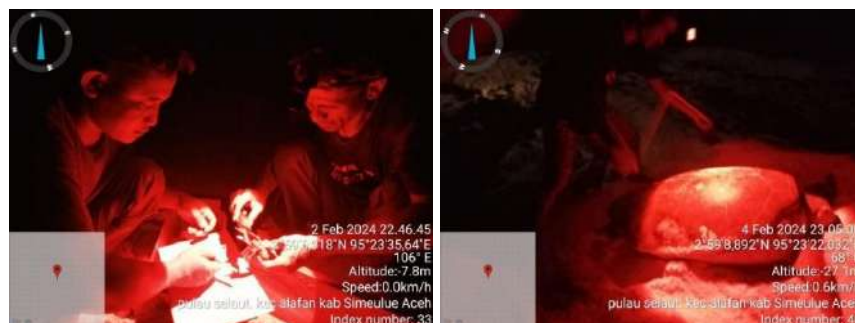
Tabel 44. Tabulasi Data Pendaratan Penyu di Desa Betumonga, Kab. Kep. Mentawai

Bulan	Σ Penyu	Jenis Penyu		Σ Sarang	Σ Telur	Σ Telur yang Direlokasi	Σ Telur yang Menetas	Σ Tukik yang Dilepaskan
		L	B					
Januari	3	-	3	3	299	299	-	-
Februari	5	3	2	5	527	527	314	311
Maret	2	2	-	2	270	270	373	373
Desember	6	-	6	6	604	604	Prediksi Menetas 2025	

Berdasarkan hasil pendataan, total sarang yang ditemukan adalah 16 sarang penyu dengan jumlah telur sebanyak 1.700 butir dengan jumlah 831 ekor tukik yang telah dirilis dengan rincian 430 ekor tukik penyu belimbing dan 401 ekor tukik penyu lekang. Tukik ini merupakan penetasan dari pendaratan bulan Desember tahun 2023. Adapun penyu yang dilakukan pendataan periode Januari s.d. Maret tahun 2024 diprediksi akan menetas dalam masa inkubasi 65 hari untuk penyu belimbing dan 55 hari untuk penyu lekang pada bulan maret, sedangkan pendataan pada Desember tahun 2024 diprediksi menetas pada Februari tahun 2025.

b. Pendataan Penyu di Pulau Salaut Besar, Kabupaten Simelue

Pendataan penyu di Pulau Salaut Besar berlangsung pada Januari, Februari, November, dan Desember, yang mana juga didukung oleh Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan Penyu Indonesia. Sama halnya dengan pendataan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pendataan dilaksanakan dengan sistem *shifting* pada setiap malam dibantu oleh tenaga enumerator.



Gambar 65. Dokumentasi Pendataan Penyu di Pulau Salaut Besar

Hasil pendataan menunjukkan bahwa penyu yang mendarat adalah penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*). Tabulasi data pendaratan penyu di Site Pulau Salaut Besar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 45. Tabulasi Data Pendaratan Penyu di Pulau Salaut Besar, Kab. Simeulue

Bulan	Σ Penyu	Jenis Penyu		Σ Sarang	Σ Telur	Σ Telur yang Direlokasi	Σ Telur yang Menetas	Σ Tukik yang Dilepaskan
		Hijau	Belimbing					
Januari	54	43	11	29	2.896	1.266	1.950	1.950
Februari	50	49	1	34	3.159	1.429	2.227	2.227
November	83	74	9	43	725	725	Prediksi menetas 2025	
Desember	71	48	23	57	2.282	1.864	Prediksi menetas 2025	

Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 158 sarang penyu bertelur ditemukan di Pulau Salaut Besar yang mana 54 di antaranya dilakukan relokasi ke sarang semi alami (ex-situ). Pada 158 sarang tersebut, terdapat 9.062 butir telur. Hasil peneluran pada bulan Januari hingga Februari, 4.121 ekor tukik penyu hijau dan 56 ekor tukik penyu belimbing telah berhasil menetas dan dilepasliarkan ke perairan Pulau Salaut Besar.

4. Karang

a. Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di KKPD Aceh Barat Daya

Pendataan dan monitoring terumbu karang di Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan di perairan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Aceh Barat Daya, Kecamatan Susoh. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dengan metode rehabilitasi berupa meja transplantasi dan *coral tree nursery*.

Pada tanggal 24 dan 25 Januari 2024, dilakukan pendataan dan monitoring terhadap sebanyak 30 meja transplantasi dan 4 *Coral Tree Nursery*. Adapun hasil analisa terhadap pendataan karang hasil transplantasi menunjukkan pertumbuhan karang branching sangat pesat, dengan jumlah koloni cabang rata-rata di atas 20 cabang dengan tingkat *Survival Rate* sekitar 65%. Selain pendataan dan monitoring terhadap hasil transplantasi karang, tim juga melakukan pemantauan pemutihan karang menggunakan metode survey cepat pada sebelah utara Pulau Pusong, dengan cara tim melakukan penyelaman pada kedalaman 5-15 meter dan mengamati kondisi ekosistem terumbu karang yang sehat dan mengalami pemutihan. Adapun hasilnya ditemukan beberapa karang di rak meja *Coral Stock Center* (CSC) jenis *Acropora* branching dan karang *submassive* di sekitar ekosistem terumbu karang telah mengalami pemutihan, sekitar 1 % di area yang diamati.



Gambar 66. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Aceh Barat Daya

Pendataan dan monitoring pada tanggal 5 dan 6 Maret 2024, dilakukan penambahan media CSC berupa rangkaian paralon 2 unit berukuran diameter 1 inch dengan tulisan CSC dan KKP pada kedalaman sekitar 7 meter di lokasi 10 media / rak meja transplantasi karang yang memiliki karang hasil transplantasi sudah sangat besar untuk dijadikan anakan / F1. Jumlah transplantasi karang yang ditambahkan pada media baru tersebut berjumlah 60 pcs karang *Acropora* sp. Adapun hasil analisis terhadap pendataan karang hasil transplantasi menunjukkan pertumbuhan karang *branching* sangat

pesat, dengan jumlah koloni cabang rata-rata di atas 30 cabang dengan tingkat *Survival Rate* sekitar 70% (sekitar 40% terjadi coral bleaching pada kedalaman 5 meter).

Pada tanggal 28 – 29 September 2024, dilakukan monitoring tutupan karang pada 3 stasiun pengamatan yang pernah diambil datanya pada tahun 2023. Data diambil oleh kelompok ODC yang sekaligus menjadikan bahan untuk skripsi salah satu dari penyelam. Metode yang digunakan dalam monitoring adalah menggunakan *underwater photo transect* (UPT) sepanjang 50 meter transek permanen yang telah dipasang, dilakukan pengambilan ulang gambar pada kedalaman sekitar 5-7 meter. Kemudian diambil pula data ikan karang dan mega bentos sebagai data pelengkap dalam kegiatan monitoring.

Berdasarkan hasil pemantauan, disimpulkan hal sebagai berikut:

- Rak Transplantasi Karang (2022-2024): Pada tahun 2022, dari 10 rak model meja paralon, 90% rak masih utuh dengan tingkat kelangsungan hidup sekitar 90%, meskipun ada kendala pada ikatan kabel ties yang berkualitas kurang baik. Sebagian besar kerusakan disebabkan oleh gelombang kuat dan pertumbuhan karang yang berlebihan. Pada tahun 2023, rak transplantasi mengalami kerusakan 60%, terutama akibat anchoring (buang jangkar) dari perahu.
- Kondisi Karang di Lokasi Monitoring: Dari tiga lokasi monitoring di Pulau Pusong (koordinat 1, 2, dan 3), kondisi terumbu karang didominasi oleh *Dead Coral with Algae* (DCA), dengan persentase lebih dari 60% di sebagian besar stasiun. Hanya sekitar 6,93% hingga 20,26% yang merupakan karang hidup (HC), menunjukkan bahwa rehabilitasi terumbu karang di kawasan ini masih membutuhkan upaya lebih intensif. Stasiun dengan persentase karang hidup terendah menunjukkan adanya kerusakan yang lebih signifikan akibat faktor lingkungan seperti gelombang dan sedimentasi.

b. Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di KKPD Aceh Besar

Pendataan dan monitoring terumbu karang di Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan di perairan sekitar Pulau Tuan, Ujung Pancu, Kecamatan Peukan Bada. Kegiatan ini dilakukan berkolaborasi dengan Ocean Diving Club (ODC) Universitas Syiah Kuala. Penurunan rak transplantasi *Coral Stock Centre* (CSC) dan rangkaian paralon dengan diameter 1 inci pada kedalaman sekitar 6 meter bertuliskan USK dan module rak meja sebanyak 2 unit, dengan total fragment transplantasi karang berjumlah 60 *pieces* dengan rincian 38 *pieces* berada di 2 meja transplantasi dan 28 *pieces* berada di tulisan USK. Jenis karang yang ditanam adalah *Acropora branching*.



Gambar 67. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Aceh Besar

Pendataan dan monitoring persentase tutupan karang di hari kedua dilakukan dengan metode *Underwater Photo Transect* (UPT) menggunakan frame dan roll meter sejauh 50 meter, sebanyak 2 stasiun transek yang dipasang permanen menggunakan kabel pancing. Berdasarkan hasil monitoring tutupan karang, kondisi terumbu karang di Aceh Besar juga didominasi oleh *Dead Coral with Algae* (DCA), dengan persentase lebih dari 70% di beberapa stasiun. Karang hidup (HC) hanya terdeteksi

sekitar 5,73% hingga 15,67% di stasiun-stasiun yang dipantau, mencerminkan kondisi yang membutuhkan perhatian dalam hal pengelolaan dan pemulihan.

c. Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Kabupaten Pesisir Selatan

Monitoring dan pemeliharaan *coral stock center* dilaksanakan di Perairan Batu Kajang, Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun model rehabilitasi yang dilakukan adalah metode rak besi dan beton sejumlah 66 unit (51 unit beton dan 15 unit besi) dengan jumlah bibit karang yang ditanam 306 pieces pada rak beton dan 240 pieces pada rak besi. Pada tahun 2024, pendataan dijadwalkan dengan frekuensi tiga kali dalam setahun.



Gambar 68. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Pesisir Selatan.

Kegiatan monitoring dan pemeliharaan CSC melalui pembersihan meja/rak penanaman dan substrat bibit karang telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali pada tahun 2024, di mana monitoring tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan CSC pada tahun 2023. Pengukuran kualitas perairan yang dilakukan pada monitoring CSC Pesisir Selatan tahun 2024 berada dalam baku mutu untuk pertumbuhan hewan karang, sehingga kondisi perairan di Pantai Batu Kajang masih sesuai untuk mendukung pertumbuhan anakan karang. Adapun parameter salinitas memiliki kisaran nilai 30 – 34 ppt, pH kisaran 7,9 - 8,1, suhu permukaan laut berkisar 29 - 30°C, dan oksigen terlarut berada pada kisaran 5,6 – 8,1 mg/L yang menunjukkan kondisi perairan relatif pada kisaran toleransi hewan karang untuk dapat bertahan hidup.

Berdasarkan hasil monitoring, diperoleh rata-rata luasan penambahan pertumbuhan anakan karang pada meja besi adalah 2,80 cm² dan tingkat kelangsungan hidup karang (*survival rate*) sebesar 76,33%. Rata-rata luasan penambahan pertumbuhan anakan karang pada meja beton adalah 29,59 cm² dan tingkat kelangsungan hidup karang (*survival rate*) sebesar 63%. Rata-rata luasan penambahan pertumbuhan anakan karang pada meja besi baru adalah 18,07 cm² dan tingkat kelangsungan hidup karang (*survival rate*) sebesar 96%. Di samping itu, juga terjadi rekrutmen karang secara alami yang terdiri dari jenis *Acropora* spp. dan *Pocillopora verrucosa*.

d. Rehabilitasi Terumbu Karang

BPSPL Padang telah melaksanakan survei identifikasi lokasi rehabilitasi terumbu karang di dua lokasi, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat dan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Survei di Pasaman Barat dilaksanakan pada 1 s.d. 4 Mei 2024, sementara survei di Bintan dilaksanakan pada 6 s.d. 9 Mei 2024.



Gambar 69. Dokumentasi Survei Identifikasi Lokasi Rehabilitasi Terumbu Karang di Pasaman Barat

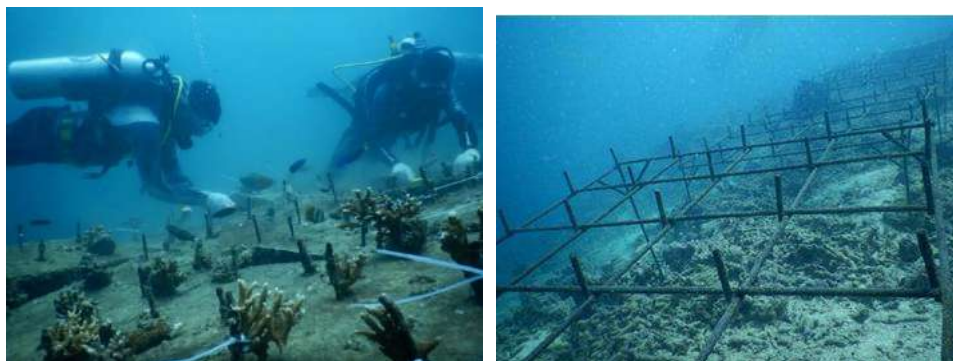


Gambar 70. Dokumentasi Survei Identifikasi Lokasi Rehabilitasi Terumbu Karang di Bintan

Dalam perkembangannya, kegiatan rehabilitasi terumbu karang dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Bintan.

- **Rehabilitasi Terumbu Karang di Kabupaten Pesisir Selatan**

Kegiatan dilaksanakan di Perairan Batu Kajang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat berkolaborasi dengan Andespin Deep West Sumatera dan Yayasan Minang Bahari. Media transplantasi yang digunakan adalah 10 rak/meja dengan dimensi 100 x 100 cm. penanaman anakan karang dilakukan sebanyak 25 anakan karang untuk setiap meja/rak besi. Total anakan karang yang ditransplantasi pada media yang baru ditanam ini berjumlah 250 fragmen pada rak/meja besi.



Gambar 71. Dokumentasi Rehabilitasi Karang di Pesisir Selatan

- Rehabilitasi Terumbu Karang di Kabupaten Bintan

Kegiatan dilaksanakan di Perairan Pantai Dugong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau berkolaborasi dengan Pokdarwis Bintan Neemo. Media transplantasi yang digunakan adalah empat unit rak/meja besi berdimensi 100 x 100 cm dengan tinggi sekitar 50 cm dan 100 cm sebanyak 4 unit, 5 media *coral tree*, dan 9 media obor. Penanaman anakan karang dilakukan di masing-masing media dengan total anakan karang yang ditransplantasi berjumlah 244 fragmen pada seluruh media. Jenis anakan karang yang ditanam sebanyak 2 genera, yaitu genus *Acropora* dan *Pocillopora*.



Gambar 72. Dokumentasi Rehabilitasi Karang di Bintan

Berdasarkan hasil monitoring dan pemeliharaan, diperoleh Tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) transplantasi karang di CSC Bintan pada periode pengamatan hingga bulan Desember 2024 mencapai 98,68%. Adapun tingkat pertumbuhan rata-rata tinggi karang hingga bulan Desember sebesar sebesar $3,29 \pm 2,89$ cm.

5. Ikan Belida

a. Pendataan di Kabupaten Tebo, Jambi

Pendataan ikan belida di Kabupaten Tebo, Jambi dilaksanakan dalam kurun waktu Januari hingga Desember dibantu oleh enumerator dengan waktu pendataan 300 hari. Alat tangkap yang utama digunakan adalah perangkap (tempilar/tembilar). Supervisi Pendataan Belida di Kabupaten Tebo telah dilakukan sebanyak 3 kali pada Bulan Januari, Juni, dan September untuk menjelaskan mengenai teknik pendataan dan kebutuhan data serta memastikan pendataan berlangsung sesuai Petunjuk Teknis.



Gambar 73. Dokumentasi Supervisi Pendataan Belida di Kabupaten Tebo



Gambar 74. Belida yang Terdata di Kab. Tebo

Jenis ikan Belida yang teridentifikasi di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi hanya Belida Sumatera (*Chitala cf. hypselonotus*). Ikan Belida di Kabupaten Tebo terdata sebanyak 3 ekor sepanjang tahun 2024. Kelimpahan rata-rata per unit usaha ikan Belida hasil pendataan oleh enumerator di Kabupaten Tebo selama 300 hari dalam setahun di Sungai Batang Tebo sejumlah 0 ekor/trip, di Danau Sungai Duo sejumlah 0 ekor/trip (1 ekor/3 trip), dan 240 hari di Sungai Alai sejumlah 0 ekor/trip. Sementara itu, frekuensi keterdapatan ikan Belida di Kabupaten Tebo yaitu Ikan *Chitala cf. hypselonotus* di Sungai Batang Tebo pada 0 stasiun selama 300 hari dalam setahun adalah 0% dan di Danau Sungai Duo pada 1 stasiun yaitu stasiun 3 sebesar 25% serta di Sungai Alai selama 240 hari pada 0 stasiun.

b. Pendataan di Kabupaten Bungo, Jambi

Pendataan belida di Kabupaten Bungo dilakukan dengan pendataan langsung dan survei sosial ekonomi dengan didampingi Penyuluh Perikanan, Dinas dan masyarakat nelayan setempat. Di Kabupaten Bungo, alat tangkap yang digunakan umumnya jaring (pukat/gillnet) dan rawai/pancing. Survei Potensi Belida di Kabupaten Bungo dilaksanakan sebanyak 2 kali pada Bulan Februari dan Juni.



Gambar 75. Dokumentasi Survei Sebaran Belida di Kabupaten Bungo



Gambar 76. Dokumentasi Belida yang Terdata di Kabupaten Bungo

Jenis ikan Belida yang teridentifikasi di Kabupaten Bungo adalah Belida Sumatera (*Chitala cf. hypselonotus*) yang terdata sebanyak 5 ekor. Berdasarkan wawancara dengan responden masyarakat dan nelayan, bahwa umumnya ikan Belida masih ditemukan dari stadia anakan, dewasa, dan indukan di masing-masing lokasi, namun keberadaannya di alam semakin menurun. Kelimpahan rata-rata per unit usaha ikan Belida hasil pendataan di Kabupaten Bungo sejumlah 0 ekor/trip (namun diperoleh data 5 ekor Belida yang tertangkap oleh masyarakat atau nelayan setempat sebelum pendataan). Frekuensi keterdapatan ikan Belida di Kabupaten Bungo yaitu Ikan *Chitala cf. hypselonotus* dari data sampel yang tertangkap oleh warga/nelayan dan tidak ditemukan saat pendataan langsung.

c. Pendataan di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan

Pendataan ikan belida di Muara Enim, Sumatra Selatan dilaksanakan dalam kurun waktu Januari hingga Desember dibantu oleh enumerator dengan waktu pendataan 300 hari. Alat tangkap yang digunakan nelayan umumnya berupa perangkap, jaring insang, dan pancing. Supervisi Pendataan Ikan Belida dilakukan sebanyak 3 kali pada bulan Januari, Juni, dan September untuk untuk menjelaskan mengenai teknik pendataan dan kebutuhan data serta perkembangan pendataan.



Gambar 77. Dokumentasi Supervisi Pendataan Belida di Kabupaten Muara Enim



Gambar 78. Dokumentasi Belida yang Terdata di Muara Enim

Jenis ikan Belida yang teridentifikasi pada kegiatan Supervisi Pendataan Ikan Belida di Kabupaten Muara Enim adalah jenis Belida Jawa (*Notopterus notopterus*). Ikan Belida Jawa yang terdata dalam satu tahun selama 300 kali pengambilan data sejumlah 144 ekor ikan dimana 45 ekor tertangkap di Sungai Belida yang terdiri dari 1 ekor anakan, 42 ekor dewasa, dan 2 ekor indukan, sedangkan 99 ekor tertangkap di Lebak/Kanal Ulak Baru yang terdiri dari 13 ekor anakan, 82 ekor dewasa, dan 4 ekor indukan. Kelimpahan ikan Belida di Sungai Belida berada pada kisaran 0 ekor per 3 hektar dengan waktu pengambilan data selama 145 hari dalam setahun. Jumlah ikan Belida yang ditemukan selama pendataan di Sungai Belida berjumlah 45 ekor dengan luas daerah 30.000 m². Sedangkan Kelimpahan ikan Belida di Lebak/Kanal Ulak Baru berada pada kisaran 1 ekor per 7 hektar dengan waktu pengambilan data selama 170 hari dalam setahun. Jumlah ikan Belida yang ditemukan selama pendataan di Lebak/Kanal Ulak Baru berjumlah 99 ekor dengan luas daerah 2.400 m². Hasil perhitungan jumlah individu jenis ikan *Notopterus notopterus* yang tertangkap di Sungai Belida sebanyak 45 ekor selama 145 hari dalam setahun diketahui nilai kelimpahan relatifnya 100 %. Jenis ikan *Notopterus notopterus* yang tertangkap di Lebak/Kanal Ulak Baru sebanyak 99 ekor selama 170 hari dalam setahun diketahui nilai kelimpahan relatifnya 100%.

d. Survei Potensi Sebaran Ikan Belida di Sumatra Selatan

Survei Potensi Sebaran Ikan Belida dilakukan di 3 (tiga) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Banyuasin. Ketiga kabupaten merupakan lokasi prioritas pendataan berdasarkan Kepdirjen PKRL Nomor 2 Tahun 2024.



Gambar 79. Belida yang Terdata di Kabupaten Ogan Ilir



Gambar 80. Belida yang Terdata di Kota Prabumulih



Gambar 81. Belida yang Terdata di Kabupaten Banyuasin

Pendataan dilakukan dengan survei langsung di alam dan survei wawancara yang mengacu pada juknis pendataan. Survei langsung di alam dilakukan di lokasi sungai utama, anak sungai, dan genangan air lainnya. Lokasi potensial dalam kegiatan Survei Potensi Sebaran Ikan Belida untuk Kabupaten Ogan Ilir di beberapa sungai dan pasar yaitu Sungai Kelekar, Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara; Sungai Kelakar, Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu; Pasar Indralaya, Kelurahan Indralaya Mulia, Kecamatan Indralaya; Sungai Kelekar, Kelurahan Indralaya Raya, Kecamatan Indralaya; Sungai Ogan, Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan; Sungai Ogan, Kelurahan Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja; Lebak Panjang, Desa Siring Alam, Kecamatan Tanjung Raja; Sungai Rengas, Kelurahan Muara Kuang, Kecamatan Muara Kuang; dan Sungai Gutuk, Desa Tanah Abang Ulu, Kecamatan Muara Kuang. Lokasi potensial di Kota Prabumulih yaitu Sungai Lematang, Kelurahan Payuputat, Kecamatan Prabumulih Barat; Sungai Senuling, Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah; Sungai Rambang, Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah; Pasar Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Utara; Sungai Lematang, Kelurahan Payuputat, Kecamatan Prabumulih Barat; Sungai Senuling, Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah; Sungai Rambang, Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah; dan Pasar Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Utara. Lokasi potensial di Kabupaten Banyuasin berada pada 1 Kecamatan Rantau Bayur yaitu Sungai Kemanyan, Desa Tebing Abang; Sungai Tudakan, Desa Tebing Abang; Kambang, Desa Tebing Abang; Sungai Musi, Desa Tebing Abang dan Desa Lebung; Sungai Rasau, Desa Lebung; dan Sungai Kosambi, Desa Lebung. Alat tangkap yang digunakan nelayan umumnya berupa perangkap, jaring insang, dan pancing. Penggunaan alat tangkap berdasarkan pada alat tangkap lokal yang sering digunakan oleh nelayan.

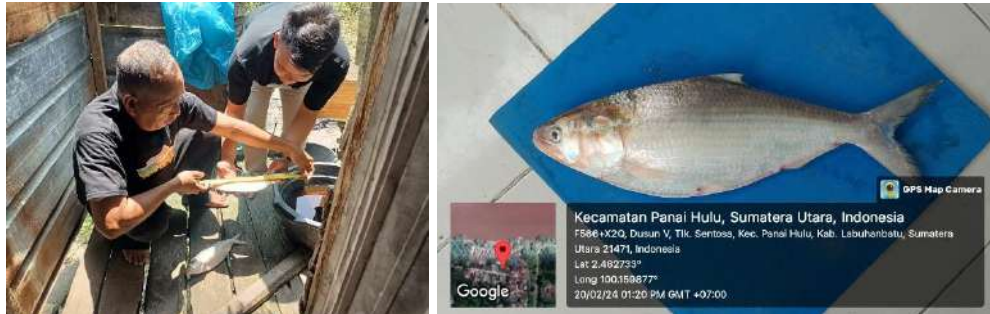
6. Terubuk

a. Pendataan di Sumatra Utara

Di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, pendataan terubuk jenis *Tenualosa ilisha* dilaksanakan sepanjang tahun dibantu oleh tenaga enumerator. Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah pendekatan Length Based-Spawning Potential Ratio (LB-SPR) yang dapat menggambarkan status eksploitasi stok perikanan, yang secara umum dapat mengacu kepada kriteria yang ditetapkan oleh NOAA Fisheries dalam Badaruddin (2013) sebagai berikut.

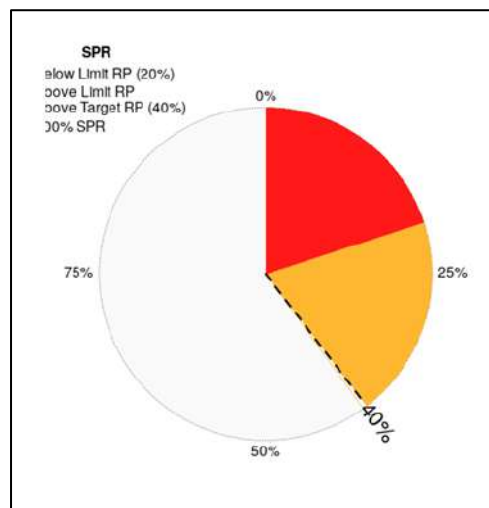
SPR	< 30%	30 – 50%	> 50%
Status Eksploitasi	Merah	Kuning	Hijau
	Over-exploited	Fully-exploited	Under-exploited

Gambar 82. Status Eksploitasi Perikanan Berdasarkan Nilai SPR



Gambar 83. Dokumentasi Supervisi Pendataan Terubuk di Labuhan Batu

Nilai SPR perikanan terubuk di Labuhan Batu diestimasi sebesar 40% yang berarti bahwa status eksploitasi ikan terubuk dalam kondisi Fully exploited, yang berarti populasi ikan berada dalam kondisi yang relatif baik dan dapat dianggap berkelanjutan, dimana ikan yang tertangkap sudah matang gonad. Nilai SPR di atas 30% menunjukkan bahwa kapasitas reproduksi ikan masih cukup untuk mendukung rekrutmen yang memadai. Pengelolaan dapat dilanjutkan dengan praktik penangkapan yang ada, tetapi tetap perlu dilakukan pemantauan untuk memastikan bahwa kondisi tetap stabil.



Gambar 84. SPR Terubuk Labuhan Batu

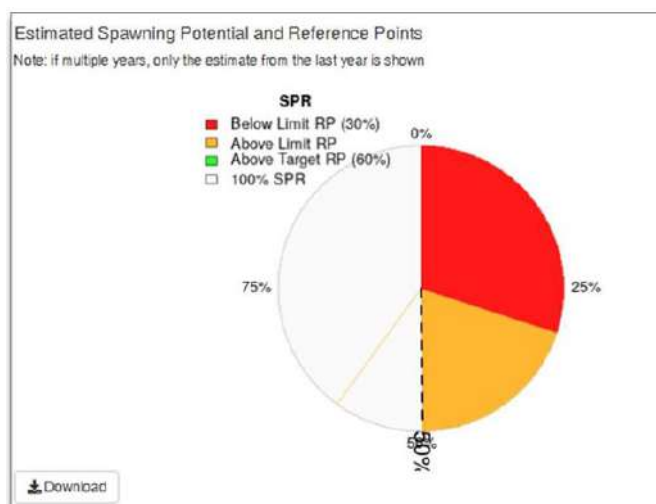
b. Pendataan di Riau

Di Bengkalis dan Siak, Provinsi Riau pendataan terubuk jenis *Tenualosa macrura* dilakukan pada fase bulan gelap (27, 28, 29, 30) dan bulan terang (13, 14, 15, dan 16) penanggalan hijriah dengan dibantu oleh tenaga enumerator. Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah pendekatan Length Based-Spawning Potential Ratio (LB-SPR) yang dapat menggambarkan status eksploitasi stok perikanan, yang secara umum dapat mengacu kepada kriteria yang ditetapkan oleh NOAA Fisheries dalam Badaruddin (2013).



Gambar 85. Dokumentasi Supervisi Pendataan Terubuk di Kabupaten Bengkalis

Nilai SPR perikanan terubuk diestimasi sebesar 50%, yang berarti bahwa status eksploitasi ikan terubuk dalam kondisi fully-moderately exploited, yaitu sudah berada diatas batas minimal nilai SPR yang ditetapkan (30%), namun pemanfaatannya belum lestari (masih di bawah 60% dari target SPR untuk pemanfaatan berkelanjutan). NOAA mensyaratkan nilai SPR diatas 60% untuk pemanfaatan yang lestari. Nilai SPR di tahun 2024 menunjukkan status tangkap jenuh menandakan bahwa masih terjadi aktivitas penangkapan terhadap ikan terubuk yang siap memijah. Meskipun nilai SPR di tahun 2024 membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun dari kurva selektivitas alat tangkap didapatkan indikasi masih terjadi penangkapan yang tinggi pada ukuran kurang dari 25 cm.



Gambar 86. SPR Terubuk Riau

7. Ikan Bilih

Pendataan ikan bilih berfokus di Danau Singkarak yang berlokasi di Kabupaten Solok dan Tanah Datar. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan pendataan yang disertai dengan supervisi enumerator pendataan ikan bilih. Adapun lokasi pendataan yang ditetapkan antara lain Nagari Sumpur, Muara Pingai dan X Koto Singkarak sedangkan jenis alat tangkap yang digunakan antara lain jala (sungai dan danau), jaring dan bagan. Pendataan dilaksanakan dari bulan Januari hingga Desember 2024 selama 8 hari pendataan per bulan.



Gambar 87. Dokumentasi Supervisi Pendataan Ikan Bilih di Danau Singkarak

Ukuran rata-rata ikan bilih yang tertangkap memiliki panjang 6,82 cm dengan rentang ukuran antara 4,5 – 12,1 cm. Adapun berat rata-rata ikan yang tertangkap adalah 3,06 gram dengan rentang berat antara 0,6 – 17,2 gram. Ikan bilih yang paling banyak tertangkap memiliki panjang total pada rentang 6,3 – 6,8 cm dengan frekuensi tangkapan 30,56% sedangkan berat ikan bilih yang paling banyak tertangkap memiliki berat pada rentang 0,6 – 3 gram dengan frekuensi tangkapan 59,94% dengan rerata ukuran ikan bilih betina lebih besar dibanding ikan bilih jantan. Nilai rerata ukuran maksimum dari keseluruhan ikan ialah pada bulan Juni dengan panjang total sebesar 7,17 cm dan berat 3,51 gram, sedangkan ukuran terkecil diperoleh pada bulan Maret dengan 6,60 cm dan berat 2,91 gram. Nilai perbandingan Panjang dan berat ikan bilih yang didapatkan 2,62 yang mana nilai tersebut < 3 (lebih kecil dari 3) sehingga jenis pertumbuhan ikan bilih adalah allometrik negatif, yaitu pertumbuhan panjangnya lebih cepat dibandingkan pertumbuhan beratnya. Perhitungan nilai CPUE (Catch per Unit Effort) dari ke tiga alat tangkap yang menangkap ikan bilih, alat tangkap bagan memiliki nilai CPUE paling tinggi yaitu 2,47 Kg/trip diikuti jaring insang sebesar 1,56 Kg/trip sedangkan yang paling rendah adalah alat tangkap jala yaitu 1,09 Kg/trip.

Berdasarkan data yang dikumpulkan sejak Maret 2023 sampai Desember 2024, terjadi penurunan yang cukup signifikan baik dari ukuran ikan maupun jumlah hasil tangkapan ikan. Ukuran rata-rata ikan yang tertangkap pada tahun 2023 yaitu 7,79 cm dengan berat 4,46 gram, menjadi menjadi 6,82 cm dengan berat 3,06 gram pada tahun 2024. Begitupun rentang ukuran yang tertangkap dari 5,3 -12 cm pada tahun 2023 menjadi 4,5 – 12,1 cm pada tahun 2024 dan rentang berat dari 1-12 gram pada tahun 2023 menjadi 0,6 – 17,2 gram pada tahun 2024. Begitupun hasil tangkapan ikan pada seluruh alat tangkap terjadi penurunan sebesar 43-49%. Untuk alat tangkap bagan terjadi penurunan dari 5,02 Kg/trip menjadi 2,47 Kg/trip, alat tangkap jala dari 2,48 Kg/trip menjadi 1,09 Kg/trip, dan alat tangkap jaring dari 3,56 Kg/trip menjadi 1,56 Kg/trip. Namun terjadinya penurunan hasil tangkapan tersebut belum dapat dijadikan acuan tren karena dipengaruhi berbagai faktor yang perlu dikaji lebih lanjut seperti perubahan musim dan iklim, terjadinya bencana alam seperti letusan gunung Marapi yang membawa sedimen melalui sungai tempat ikan bilih memijah, kenaikan ketinggian danau, penumpukan sampah, dan faktor lainnya.

8. Arwana

Pendataan arwana direncanakan di tiga provinsi, yaitu Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan. BPSPL Padang telah melaksanakan survei potensi dan pendataan arwana di Kabupaten Sarolangun, Jambi, Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim, Sumatra Selatan, dan Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

a. Survei Potensi Arwana di Kabupaten Sarolangun, Jambi

Survei potensi arwana di Kabupaten Sarolangun, Jambi, tepatnya di Kawasan Konservasi Perairan Arwana Kutur, dilaksanakan pada Maret dan Oktober 2024. Pendataan dilakukan melalui pemantauan atau pengamatan langsung pada habitat ikan arwana di alam serta pengumpulan data sekunder berupa kualitas perairan dan kuesioner wawancara masyarakat.



Gambar 88. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Sarolangun

Berdasarkan hasil pendataan dengan metode perhitungan langsung, tidak diperoleh data atau tidak terlihat ikan arwana yang muncul ke permukaan air. Hal ini dimungkinkan karena kondisi perairan yang sangat keruh akibat adanya aktivitas pertambangan emas di hulu dan sekitar sungai. Selain itu, masyarakat sekitar juga sudah tidak menangkap Arwana dan sudah tidak ada lagi yang berprofesi sebagai nelayan. Alat tangkap yang dapat ditemukan di sekitar lokasi hanya Tajur, yaitu alat tangkap tradisional dengan mekanisme seperti pancing yang dipasang di tepi sungai dengan umpan anak ikan. Pada awal tahun 2022, seorang masyarakat setempat yang memasang Tajur di sekitar zona penyangga kawasan konservasi tidak sengaja memperoleh seekor indukan Arwana dengan ukuran 60 - 70 cm. Berdasarkan dokumentasi, arwana tangkapan yang tidak sengaja tertangkap pada tahun 2022 jenis ikan Arwana yang teridentifikasi adalah Arwana Kalimantan (*Scleropages formosus*) dengan varian Arwana Silver Jambi/Green/Pino/Piano. Kelimpahan/kepadatan, komposisi ukuran dan rasio jenis kelamin ikan Arwana yang tertangkap saat survei pendataan di Kabupaten Sarolangun tidak dapat dihitung dan diketahui karena sampel yang terakhir ditemukan pada tahun 2022 tersebut sudah mati.

Data lain yang telah dikumpulkan adalah Kondisi Perairan (Kecerahan, pH, dan Suhu), kondisi Antropogenik, dan Ancaman terhadap Spesies. Kondisi perairan di Kawasan Konservasi Perairan Arwana Kutur, pada nilai kecerahan berkisar 4 - 13 cm, pH pada kisaran 5,75 - 6,26, dan suhu pada 28 - 30°C. Kondisi Antropogenik yang teramati adalah Pembukaan/Perubahan Lahan atau Pembangunan Infrastruktur (Pertanian/Perkebunan/ Penambangan) berupa pertambangan emas di bagian hulu dan tepi sungai di sekitar kawasan konservasi. Ancaman terhadap spesies yang ditemui adalah adanya predator dan/atau ikan introduksi dan invasif dan kerusakan habitat. Terdapat perbedaan yang signifikan dari kondisi perairan pada saat penetapan dan pengembangan pengelolaan kawasan konservasi dan saat pendataan dilakukan, dimana secara visual kondisi perairan sudah tampak coklat keruh dan aktivitas pertambangan yang semakin meningkat. Data persepsi masyarakat dihimpun melalui wawancara atau pengisian kuesioner dengan responden sebanyak 9 orang masyarakat di sekitar lokasi Kawasan Konservasi Perairan Kutur, terutama di Desa Moenti dan Desa Mersau, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Poin pertanyaan yang disampaikan meliputi biodata responden, potensi ikan Arwana, teknik penangkapan, kondisi habitat

dan sebaran, pola pemasaran, ancaman, dan partisipasi masyarakat. Saat ini tingkat kepatuhan masyarakat terhadap status perlindungan penuh ikan Arwana berdasarkan Kepmen KP Nomor 1 Tahun 2021 sudah baik mengingat masyarakat setempat sudah tidak melakukan penangkapan ikan Arwana. Akan tetapi di sisi lain masih banyak kegiatan penambangan emas yang meskipun dilakukan di daerah hulu dan sekitar kawasan konservasi sehingga efeknya dapat mempengaruhi kondisi perairan dan ekosistem di sekitarnya.

b. Survei Pendataan Arwana di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan

Survei pendataan arwana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan dilaksanakan pada 3 Mei 2024 dengan metode wawancara kepada nelayan yang pernah mendapatkan ikan arwana maupun yang pernah melihat ikan arwana di sungai tempat nelayan tersebut memancing ikan. Berdasarkan hasil survei di lapangan melalui wawancara kepada dua orang nelayan di Desa Burai mengenai ikan Arwana, didapatkan informasi bahwa ikan Arwana sudah tidak pernah terlihat lagi sejak tahun 2008. Pada tahun tersebut pun hanya terlihat 1 ikan Arwana Hijau pada bulan September yang berukuran lumayan besar dengan berat sekitar 4 kg yang ditangkap menggunakan waring pada waktu siang hari di Sungai Kelekar. Ikan Arwana tersebut diambil dan direncanakan akan dijual di Kota Palembang dengan harga 5 juta untuk 1 ekor ikan Arwana dengan berat 4 kg. Calon pembeli memang sudah ada dan merupakan penjual ikan Arwana sebagai ikan hias. Namun saat akan diambil oleh penjual, ikan Arwana tersebut mati. Nelayan juga pernah melihat anakan Arwana pada tahun 2000an tapi saat itu tidak ditangkap namun langsung dilepas. Nelayan yang ke-dua juga menyampaikan pernah melihat Arwana pada tahun 2000-an namun tidak ditangkap. Berdasarkan informasi nelayan setempat, dari dulu di lokasi survei tidak pernah ada nelayan yang secara khusus menangkap ikan Arwana. Nelayan juga menginformasikan bahwa lokasi sungai ditemukannya ikan Arwana adalah sungai kosong yang tidak terdapat pohon maupun semak-semak dengan dasar perairan lumpur dan air sungai yang jernih, dan juga sungai jernih yang terdapat batang-batang besar dengan dasar perairan tanah. Nelayan mengungkapkan menurunnya populasi ikan Arwana dimungkinkan karena rusaknya habitat dikarenakan limbah yang berasal dari pabrik, maupun penggunaan alat setrum yang merusak lingkungan. Selanjutnya, dilakukan pengukuran kualitas perairan tempat pernah ditemukannya ikan Arwana. Pengukuran yang dilakukan antara lain pH, suhu, dan kecerahan.



Gambar 89. Dokumentasi Survei Pendataan Arwana di Kab. Ogan Ilir

c. Survei Pendataan Arwana di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan

Survei pendataan arwana di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan dilaksanakan pada 13 s.d. 15 Mei 2024. Berdasarkan hasil wawancara kepada Nelayan di Sungai Kelekar, Desa Segayam diketahui bahwa arwana yang lebih dikenal dengan nama lokal tangkeleso ukuran dewasa terakhir kali tertangkap nelayan sekitar tahun 1999 s.d. 2000 menggunakan alat tangkap serundut di habitat sungai yang berarus sedang dan masih terdapat anakan arwana yang ditemukan pada perairan dangkal dengan dasar tanah. Terdapat ancaman terhadap habitat arwana berupa Jumlah Indukan yang sedikit, kerusakan habitat akibat adanya pencemaran yang bersumber dari limbah pabrik dari

hulu sungai yang berdampak pada sepanjang aliran sungai, serta penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan berupa setrum. Lebih lanjut, berdasarkan informasi dari nelayan di Desa Sungai Rotan ikan arwana pernah tertangkap di aliran anak Sungai Lematang dengan menggunakan jaring namun saat ini sudah ditemukan lagi ikan arwana. Tim kemudian melakukan pengambilan titik koordinat lokasi tertangkapnya arwana, pengukuran kualitas air dan aktivitas antropogenik dengan menyusuri sungai menggunakan kapal.



Gambar 90. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Muara Enim

d. Survei Pendataan Arwana di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan

Survei pendataan arwana di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan dilaksanakan pada 13 s.d. 16 Agustus 2024. Survei pendataan arwana di Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumsel diawali dengan koordinasi ke Dinas Perikanan Kab. Musi Banyuasin dengan penyampaian informasi mengenai rencana kegiatan pendataan ikan arwana yang akan dilaksanakan sekaligus permohonan izin lokasi. Berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan Kab. Musi Banyuasin diketahui bahwa ikan arwana dikenal masyarakat lokal dengan nama tangkeleso yang dulu keberadaannya memang ada di perairan umum daratan (PUD) di Kab. Musi Banyuasin namun sekarang sudah hampir mustahil untuk ditemui. Sebagian besar anak sungai, danau, lebak dan PUD di lelang oleh desa. Saat ini Dinas Perikanan Kab. Musi Banyuasin sedang melakukan kajian untuk menunjang ulang pemetaan danau suaka perikanan di Kab. Musi Banyuasin. Harapannya didapatkan data yang baik dalam menentukan zonasi kawasan di PUD untuk menentukan arah penggunaan sumber daya perikanan di perairan tersebut, walaupun dinas kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam penentuan zonasi kawasan konservasi di PUD.

Pendataan ikan arwana di Kab. Musi Banyuasin dilakukan di 6 lokasi danau dan sungai yaitu:

- Danau Cala, Desa Danau Cala, Kec. Lais,
- Sungai Musi, Desa Terusan, Kec. Sanga Desa,
- Sungai Rawas, Desa Terusan, Kec. Sanga Desa,
- Sungai Patas, Desa Terusan, Kec. Sanga Desa,
- Sungai Ampalau, Desa Terusan, Kec. Sanga Desa,
- Sungai Batanghari Leko, Desa Muara Teladan, Kec. Sekayu.

Tim BPSPL Padang juga melakukan penandaan titik koordinat lokasi yang pernah ditemukan ikan arwana. Selain itu, dilakukan juga pengumpulan data sekunder yaitu pengukuran kualitas air berupa parameter suhu, kecerahan, dan pH serta pengamatan aktivitas antropogenik dan ancaman spesies sekitar lokasi tertangkapnya ikan arwana. Tim juga berkesempatan mengumpulkan data dan informasi jenis ikan dilindungi dan/atau tercantum Appendix CITES lainnya yang ditemukan di PUD Kab. Musi Banyuasin. Berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan Kab. Musi Banyuasin, Pendamping Petugas Teknis Kelautan dan Perikanan Kab. Musi Banyuasin, Perangkat Desa tempat lokasi survei, serta nelayan lokal diketahui bahwa ikan belida, ikan blashark, pari sungai raksasa, dan pari sungai pinggir putih masih ditemui tertangkap oleh nelayan menggunakan alat tangkap pancing, jaring, dan

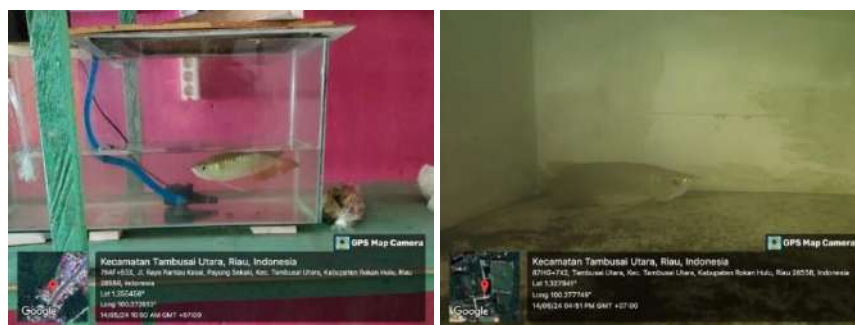
perangkap. Selanjutnya tim melakukan sosialisasi dan memberikan booklet daftar jenis ikan dilindungi dan/atau tercantum Appendiks CITES lainnya.



Gambar 91. Dokumentasi Survei Pendataan Arwana di Kab. Musi Banyuasin

e. Survei Pendataan Arwana di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau

Survei pendataan arwana di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dilaksanakan pada 13 s.d. 17 Mei 2024. Berdasarkan hasil penelusuran, diperoleh informasi bahwa habitat arwana berlokasi di DAS Mahato, Desa Mahato dan Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Di samping itu, terdapat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 169 tahun 2009 tentang Penunjukkan Hutan Produksi Terbatas Mahato Kanan (Rawa Seribu) seluas 3.700 ha sebagai Kawasan Konservasi Ikan Arwana, namun belum efektif karena belum dapat menekan alih fungsi lahan dan masifnya pembukaan lahan sawit. Kawasan konservasi arwana tersebut dikelola oleh HKM Gapoktan Tambusai Utara. Gapoktan ini mendapatkan indukan arwana dengan cara membeli dari masyarakat yang melaksanakan penangkapan, kemudian indukan tersebut dikembangkan di dalam kolam penangkaran milik kelompok. Saat ini kelompok memiliki 10 ekor indukan dan anakan yang berjumlah 17 ekor.



Gambar 92. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Rokan Hulu

f. Survei Pendataan Arwana di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

Survei pendataan arwana di Kecamatan Pujud dan Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan pada 21 s.d. 25 Oktober 2024. Pada kesempatan ini, dilakukan wawancara untuk menggali potensi ikan arwana beserta pemanfaatannya. Pada saat melaksanakan survei menurut hasil wawancara dan penggalian informasi kepada masyarakat, saat ini sudah tidak ditemukan lagi populasi ikan arwana di daerah Danau Napanga yang sebelumnya menjadi habitat ikan arwana. Hal ini disinyalir akibat adanya pencemaran dari buangan limbah pabrik yang berada di sekitar perairan, padahal keberadaan DAS Mahato erat kaitannya dengan penduduk. Menurut responden nelayan, alat tangkap yang paling sering digunakan untuk menangkap arwana adalah jaring atau tangguk. Ketika musim penangkapan, masyarakat membuat kesepakatan tidak tertulis yakni hanya diperbolehkan menangkap ikan berukuran anakan untuk dijual sedangkan indukan akan dilepasliarkan kembali. Bahkan di Danau Napangga dibuat peraturan *temporary closed area*, yang mana dilakukan pembatasan waktu penangkapan pada kurun tertentu. Pada saat pembukaan dan panen, akan

dilakukan kegiatan seremoni yang disaksikan oleh unsur pimpinan daerah. Lebih lanjut, sebagian besar responden menyatakan arwana mulai mengeluarkan anakan pada bulan Oktober s.d. Desember yang juga menjadi musim penangkapan arwana.

9. Respon Cepat Penanganan Jenis Ikan Dilindungi

Sepanjang tahun 2024, tercatat 26 kejadian mamalia/jenis ikan terdampar di wilayah kerja BPSPL Padang. Tabel berikut menyajikan kejadian yang ditangani langsung oleh BPSPL Padang.



Gambar 93. Jenis Biota Terdampar yang Ditangani Tahun 2024



Gambar 94. Lokasi Penanganan Jenis Ikan Terdampar Tahun 2024



Gambar 95. Dokumentasi Penanganan Jenis Ikan Terdampar

10. Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Terancam Punah

Sosialisasi jenis ikan dilindungi dan/atau biota terancam punah telah dilaksanakan di Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi pada 25 April 2024. Pada kesempatan tersebut, disampaikan informasi jenis-jenis ikan dilindungi, terutama di perairan sungai.



Gambar 96. Dokumentasi Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi di Kab. Muaro Jambi

Sosialisasi jenis ikan dilindungi juga dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan pada tanggal 25 April 2024. Selain menyampaikan informasi terkait jenis ikan dilindungi, tim juga melaksanakan pengumpulan informasi mengenai biota dilindungi dan/atau terancam punah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dari peserta yang hadir dimana diketahui jenis ikan Arwana sumatra, Arwana jawa, dan ikan balashark yang masih relatif mudah ditemui.



Gambar 97. Dokumentasi Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi di Kab. Ogan Ilir

Lebih lanjut, sosialisasi perlindungan penyu dilaksanakan di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada 30 Juli 2024. Pada kesempatan ini, disampaikan regulasi perlindungan penyu beserta isu konservasinya. Dalam hal ini, BPSPL Padang juga menghadirkan narasumber dari Yayasan Penyu Indonesia yang menyampaikan program Kerja Sama Konservasi Penyu antara BPSPL Padang dan Yayasan Penyu Indonesia.



Gambar 98. Dokumentasi Sosialisasi Perlindungan Penyu di Kab. Bintan

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 8 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies dengan Rincian Output (RO) [2362.REB.001] Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 46. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 8

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.REB.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	599.923.000,00	596.192.543,00	99,4
2	[2362.REB.001.052] Rehabilitasi Populasi Habitat Kritis Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	137.262.000,00	136.054.948,00	99,1
3	[2362.REB.001.053] Respon Cepat Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah	105.098.000,00	100.048.907,00	95,2
4	[2362.REB.001.054] Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah	57.717.000,00	57.307.615,00	99,3
Total		900.000.000,00	889.604.013,00	98,8

Realisasi anggaran rincian output [2362.REB.001] secara keseluruhan adalah 98,8%. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan penyediaan data jenis sidat, terubuk, penyu, terumbu karang, teripang, belida, ikan bilih, arwana serta penanganan biota dilindungi terdampar. Rincian output ini bersumber dari rupiah murni senilai Rp625.000.000,00 dan bersumber dari PNBP senilai Rp275.000.000,00.

IKU. 9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)

Jenis ikan yang dimaksud pada IKU ini adalah jenis yang dilakukan upaya fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendix CITES dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk appendix CITES, dan/atau *look alike species* dan survei potensi pemanfaatan. Adapun tata cara pemanfaatan jenis ikan mengacu pada Permen KP Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang terancam dalam appendix CITES. Target Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan Pemanfaatan adalah Hiu Appendix, Pari Appendix, Kuda Laut, Napoleon, dan Sidat di wilayah kerja BPSPL Padang.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKU 9 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 47. Perbandingan Target dan Capaian IKU 9

IKU. 9 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
8	5	8	160 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP	-

Capaian IKU ini adalah 8 jenis yang didukung dengan pengelolaan pemanfaatannya dengan persentase capaian 160% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP. Jenis ikan tersebut meliputi jenis hiu, pari, kuda laut, napoleon, sidat, teripang, arwana dan karang lunak. Adapun kegiatan pendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini secara garis besar meliputi:

1. penyediaan data potensi dan status pemanfaatan meliputi jenis hiu, pari, kuda laut, napoleon dan sidat; dan
2. pelayanan perizinan pemanfaatan meliputi jenis hiu, pari, arwana, teripang, napoleon, sidat dan karang lunak.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FZ3GWBh36qpTfdu7p5bh2nJ7BJ-4qckH>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU ini memiliki realisasi capaian yang sama dengan tahun 2023 dengan capaian 8 jenis ikan. Maka dari itu, tidak terdapat kenaikan capaian. Namun demikian, jenis ikan yang dikelola pemanfaatannya memiliki rincian yang berbeda, yang mana pada tahun 2023 tidak terdapat pengelolaan jenis karang lunak namun terdapat pengelolaan jenis ikan belida.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 48. Rincian Target dalam RPJMN yang Berkaitan dengan IKU 9 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan	6	10	14	18	20	Pusat

Dalam hal ini, indikator kinerja Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 49. Perbandingan Capaian Pengelolaan Jenis Ikan yang Dimanfaatkan dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (Jenis)	5	8	4	8

Ditinjau dari capaian Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pada kedua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak telah mencapainya melampaui target dengan persentase capaian melebihi 120%. Adanya capaian yang melebihi target tersebut didukung dengan adanya pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan di masing-masing unit kerja.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya pencapaian IKU 9 tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Dalam pendataan hiu, pari, dan kuda laut, tim BPSPL Padang dibantu oleh enumerator sehingga diperoleh pendataan *time series*. Dalam hal ini, supervisi terhadap enumerator dapat menunjang keberhasilan kegiatan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang sesuai untuk dianalisis lebih lanjut. Sementara itu, dalam lingkup pelayanan, koordinasi dan verifikasi jarak jauh juga dapat mendukung keberlanjutan kegiatan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada perekrutan tenaga enumerator yang kompeten dan mudah diarahkan melalui koordinasi jarak jauh. Selain itu, penggunaan aplikasi e-SAJI dan e-Sultan's juga mendukung kegiatan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan secara sistematis.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU 9 dapat ditunjang oleh kegiatan supervisi yang perlu dilakukan secara rutin dan menyeluruh kepada tenaga enumerator. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar kualitas data yang dikumpulkan tetap terjaga.

a. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kegiatan pelayanan perizinan jenis ikan yang dimanfaatkan dilaksanakan di tujuh provinsi wilayah kerja BPSPL Padang, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sepanjang tahun 2024, BPSPL Padang telah melayani peredaran jenis hiu, pari, arwana, teripang, napoleon, sidat dan karang lunak melalui penerbitan 383 Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN) dan 546 Rekomendasi.

Berikut adalah rekapitulasi pelayanan berdasarkan dari penerbitan SAJI dan rekomendasi.

Tabel 50. Rekapitulasi Pelayanan Jenis Tahun 2024

Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen yang Terbit	Nilai PNPB (Rp)
Rekomendasi	546	391.214.793,00
SAJI Dalam Negeri	383	504.044.292,00
Total	929	895.259.085,00

Untuk menunjang pelayanan prima di lingkup BPSPL Padang, pada tanggal 2 Februari 2023 BPSPL Padang telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (SMM) Registration No: QAIC/ID/11112-A dengan ruang lingkup pelayanan administrasi dalam lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES). Kemudian, pada tanggal 5 April 2024, BPSPL Padang memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Registration No: QAIC/ID/11112-E dengan ruang lingkup yang sama. Dalam hal ini, produk layanan BPSPL Padang berupa SAJI Dalam Negeri dan Rekomendasi juga telah terdaftar dalam sertifikasi ini (Lampiran 2).

b. Pendataan Potensi Jenis yang Dimanfaatkan

- Hiu dan Pari

Pendataan pendaratan hiu dan pari dilaksanakan di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Riau. Pendataan di Aceh dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo di Banda Aceh, Pelabuhan Labuhan Haji di Aceh Selatan, dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Serangga di Aceh Barat Daya. Sementara itu, pendataan di Sumatra Utara dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga. Di Riau, pendataan dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pendataan dilaksanakan dengan dibantu oleh tenaga enumerator selama 12 bulan dengan jumlah hari 25 hari/bulan.

• Pendataan Hiu dan Pari di PPS Kutaraja Lampulo, Banda Aceh

Berdasarkan hasil pendataan, total ikan hiu yang didaratkan di PPS Kutaraja Lampulo selama tahun 2024 berjumlah 1.127 Individu yang terdiri dari 31 Spesies dari 12 Famili sedangkan untuk ikan pari berjumlah 1.233 Individu yang terdiri dari 28 Spesies dari 7 Famili. Total semua individu adalah 2.360 ekor ikan hiu dan pari. Jenis kelamin ikan hiu pari didominasi oleh betina sejumlah 69% dan sisanya adalah jantan. Sedangkan berdasarkan tingkat kedewasaan didominasi oleh ikan hiu pari dewasa sejumlah 81%, remaja 17% dan anakan 2%. Rata-rata harga ikan hiu pari di PPS Kutaraja Lampulo adalah harga untuk produk non-sirip. Pada jenis hiu paling mahal adalah jenis *C. amblyrhynchoides* dan *C. limbatus* sedangkan jenis pari paling mahal adalah *R. australiae* dan *M. gerrardi*. Total kapal yang menangkap ikan hiu pari dan didaratkan di PPS Kutaraja Lampulo berjumlah 30 Armada Kapal dengan wilayah tangkapan di sekitar perairan pesisir Pulo Aceh dan Sabang serta Perairan Laut Andaman.



Gambar 99. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPS Kutaraja Lampulo, Kota Banda Aceh

- **Pendataan Hiu dan Pari di Pelabuhan Labuhan Haji, Aceh Selatan**

Berdasarkan hasil pendataan, Total Hiu Pari yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan pada bulan Januari hingga Oktober Tahun 2024 atau sejumlah 237 hari yaitu 1276 individu dengan Spesies terbanyak yang didaratkan yaitu *Sphyrna lewini* dengan 856 Individu. Jenis Kelamin Hiu Pari Betina jauh mendominasi dengan 99% dibandingkan Jenis Kelamin Hiu Pari Jantan yang hanya berjumlah 1% dari total 1276 Individu. Sedangkan berdasarkan tingkat kedewasaan didominasi oleh hiu pari anakan sejumlah 76%. Rata-rata harga ikan hiu pari di PPP Labuhan Haji adalah harga untuk produk non-sirip. Pada jenis hiu paling mahal adalah jenis *C. punctatum* sedangkan jenis pari paling mahal adalah *R. australiae* dan *M. gerrardi*. Total kapal yang menangkap ikan hiu pari dan didaratkan di PPP Labuhan Haji berjumlah 14 Armada Kapal dengan wilayah tangkapan di WPP 572 atau lebih detailnya di perairan Sinabang.



Gambar 100. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di Pelabuhan Labuhan Haji, Aceh Selatan

- **Pendataan Hiu dan Pari di Ujung Serangga, Aceh Barat Daya**

Berdasarkan hasil pendataan, Total ikan hiu yang didaratkan di PPI Ujung Serangga Kabupaten Aceh Barat Daya selama Tahun 2024 berjumlah 1998 individu yang terdiri dari 25 spesies dan 8 famili sedangkan untuk ikan pari berjumlah 454 individu yang terdiri dari 19 spesies dan 7 famili. Adapun total keseluruhan hiu dan pari berjumlah individu 2452. Jenis kelamin ikan hiu pari didominasi oleh betina sejumlah 55% dan sisanya adalah jantan. Sedangkan Berdasarkan Tingkat kedewasaan didominasi oleh ikan hiu pari anakan sejumlah 42%, dewasa 31% dan remaja 27%. Rata-rata harga ikan hiu dan pari di PPI Ujung Serangga adalah harga untuk produk non sirip. Adapun jenis hiu yang paling mahal adalah *Hemigaleus microstoma* sedangkan pari *Gymnura zonura*. Total kapal yang melakukan penangkapan ikan hiu pari dan didaratkan di PPI Ujung Serangga berjumlah 36 armada dengan wilayah tangkapan di WPP 572 sekitar perairan Aceh Barat Daya, Meulaboh, Simelue, Mentawai, Padang, Sibolga, Sinabang dan Trumon.



Gambar 101. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPI Ujung Serangga, Aceh Barat Daya

- **Pendataan Hiu dan Pari di PPN Sibolga**

Berdasarkan hasil pendataan di Kota Sibolga tahun 2024 terdapat total tangkapan untuk jenis hiu yang berjumlah 7.236 ekor dan pari sejumlah 5.132 ekor. 94,20% dari hasil tangkapan hiu masuk kategori anakan disusul 4,02% usia remaja dan hanya 1,78% dari total keseluruhan yang masuk kategori dewasa. Ini juga sejalan dengan tangkapan pari dimana 86,59% dari hasil tangkapan pari masuk kategori anakan disusul 10,99% usia remaja dan hanya 2,42% dari total keseluruhan yang masuk kategori dewasa. Hal ini mengindikasikan eksploitasi ikan hiu dan pari didominasi oleh rentang ukuran yang belum cukup dewasa untuk ditangkap. Didapat informasi bahwa armada kapal yang menangkap ikan hiu dan pari bahwa biasa nelayan menangkap di Perairan Nias, Perairan Sinabang, Perairan Pulau Banyak, Perairan Pantai Barat Madina dan Perairan Mursala dengan rentang waktu melaut sekitar 30 hari. Dari hasil pendataan dapat dilihat bahwa perbandingan *sex ratio* di tempat pendaratan Sibolga tidak begitu berbeda, jenis kelamin yang lebih mendominasi yaitu betina baik hiu maupun pari. Dari data rata-rata harga jual, ikan pari secara rata-rata lebih mahal daripada rata rata hiu yang tertangkap di Sibolga.



Gambar 102. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPN Sibolga

- **Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Bengkalis**

Berdasarkan hasil pendataan, Terdata sebanyak empat spesies hiu dari dua famili, yaitu famili Carcharidae dan Hemiscyllidae, sedangkan untuk jenis pari, terdata sebanyak sebelas spesies pari dari empat famili, yaitu famili Gymnuridae, Dasyatidae, Mobulidae, dan Rhinidae, Berdasarkan jenis kelamin, Terdata sebanyak 35 ekor jantan dan 40 ekor betina individu hiu dan sebanyak 164 ekor jantan dan 151 ekor betina individu pari. Hasil pendataan hiu didominasi oleh spesies *Scoliodon macrorhynchos*, sedangkan untuk pari didominasi oleh spesies *Pastinachus solocirostris*. Hiu dan pari yang terdata berasal dari Perairan Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis dan tertangkap menggunakan alat tangkap rawai, trammel net, dan gumbang/pengerih. Tren hasil tangkapan hiu dan pari periode Bulan Januari – Desember 2024 di Kabupaten Kepulauan Bengkalis, Provinsi Riau bervariasi dengan tren yang fluktuatif.



Gambar 103. Dokumentasi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Bengkalis

- **Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Hasil pendataan jenis hiu di Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas satu famili yaitu *Carcharhinidae* dan 2 species (*Scoliodon macrorhynchos* dan *Carcharhinus leucas*), keduanya termasuk dalam appendiks II CITES. Hasil pendataan jenis pari di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas tiga famili (*Dasyatidae*, *Gymnuridae* dan *Rhinidae*) dan 7 species yaitu *Gymnura poecilura*, *Himantura undulata*, *Hemirhamphodon akabei*, *Pateobatis uarnacoides*, *Maculabatis gerrardi*, *Rhynchobatus laevis*, dan *Rhynchobatus cooki*. Adapun jenis pari yang masuk dalam appendiks II CITES adalah *Rhynchobatus laevis* dan *Rhynchobatus cooki*. Jenis hiu yang terdata didominasi *Scoliodon macrorhynchos* sementara pari didominasi jenis *Pateobatis uarnacoides*. Hasil tangkapan untuk semua jenis hiu dan pari appendiks II CITES menunjukkan bahwa individu ditangkap sebelum memasuki fase matang gonad. Hal ini menunjukkan bahwa penangkapan hiu dan pari di Kabupaten Kepulauan Meranti belum memperhatikan prinsip – prinsip keberlanjutan sumberdaya perikanan.



Gambar 104. Dokumentasi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Kepulauan Meranti

- **Kuda Laut**

- **Pendataan Kuda Laut di Batam**

Pendataan kuda laut di Batam menggunakan pendataan hasil tangkapan kuda laut nelayan yang dikumpulkan oleh enumerator selama musim tangkap kuda laut, yaitu bulan Maret sampai September selama 16-25 hari pendataan.

Pemanfaatan kuda laut disekitaran perairan Pulau Kasu, Kota Batam didapatkan hasil total penangkapan sebanyak 20.551 ekor dalam 1.777 kali pengambilan dan pada saat pendataan secara umum dalam bentuk segar, hanya sebagian kecil dalam bentuk kering. Berdasarkan data yang diambil potensi musim penangkapan berada pada bulan Mei, Juni dan Juli. Dalam hal ini pada bulan Juni memiliki nilai penangkapan terbanyak yaitu sebanyak 4.927 ekor dalam 276 kali pengambilan dan pemanfaatan terendah pada Bulan April yaitu sebanyak 1.308 ekor dalam 136 kali pengambilan. Stok kuda laut pada selama masa pendataan disekitaran perairan Pulau Kasu, Kota Batam didapatkan hasil total penangkapan sebanyak 20.551 ekor dengan total berat 94.283 gram atau setara dengan 94,28 kg. Hasil tangkapan per unit upaya penangkapan pada bulan pendataan di Kelurahan Kasu, Pulau Batam sekitarnya memiliki nilai yang fluktuatif, yang mana nilai tertinggi berada pada bulan Juni, dan secara aktual dalam pemanfaatannya masih dalam kondisi belum optimal. Pemanfaatan kuda laut sebagai mata pencaharian alternatif nelayan tangkap dikarenakan menyesuaikan kondisi harga pasar yang ada, namun tidak jarang nelayan tangkap ini menjual kepada pengepul yang memiliki potensi harga beli lebih tinggi dan diketahui

jalur distribusi kuda laut secara umum dalam pemanfaatannya masih dilakukan penjualan secara ilegal tanpa menggunakan SAJI (Surat Angkut Jenis Ikan) dan kepemilikan SIPJI (Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan) Perdagangan Dalam Negeri masih terbatas dengan alasan kesulitan memahami regulasi yang ada serta adanya pembatasan perdagangan untuk ekspor, mengingat Kota Batam berada pada daerah perbatasan negara Indonesia.



Gambar 105. Dokumentasi Pendataan Kuda Laut di Batam

- **Pendataan Kuda Laut di Bintan**

Kegiatan pendataan pemanfaatan kuda laut di Desa Sebung Pereh, Kabupaten Bintan dilaksanakan dalam dua tahap: supervisi enumerator (26 Januari 2024) dan survey lapang melalui wawancara dengan nelayan (21 November 2024).

Berdasarkan hasil pendataan, diperoleh data dan informasi sebagai berikut:

- Tidak ada data penangkapan kuda laut di Desa Sebung Pereh karena minat nelayan untuk mencari kuda laut menurun disebabkan hilangnya habitat kuda laut serta harga kuda laut yang semakin menurun.
- Hilangnya habitat kuda laut disebabkan terjadinya pengalihan aktivitas nelayan sekitar yang mengumpulkan *Sargassum* dengan pemanenan langsung dengan cara disabit dan dicabut.



Gambar 106. Dokumentasi Survei Pendataan Kuda Laut di Bintan

- **Napoleon**

- **Pendataan Napoleon di Kabupaten Natuna**

Pendataan napoleon di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau telah dilaksanakan pada 23 s.d. 27 April 2024. Pendataan dilakukan dengan wawancara dan survei lapangan. Pada pendataan tersebut, dilakukan pencatatan nelayan yang aktif dalam pembesaran, pengepul, dan pengumpul

bibit ikan napoleon. Selain itu, tim BPSPL Padang juga melaksanakan sosialisasi lalu lintas jenis ikan *look alike species*.



Gambar 107. Dokumentasi Pendataan Napoleon di Natuna

Berdasarkan pendataan, terdapat jumlah pelaku usaha pemanfaatan napoleon terdiri dari 36 pelaku usaha yang terdapat dalam tahun 2024 yang terdiri dari 27 nelayan pembudidaya, 2 nelayan pembudidaya sekaligus penangkap, 5 nelayan penangkap dan 2 nelayan tidak aktif dalam pembudidayaan napoleon dan telah beralih sepenuhnya menjadi nelayan kerapu. Adapun jumlah ikan napoleon hasil pembesaran (*ranching*) adalah sebanyak 14.955 ekor dan terdapat penurunan sebanyak 7.866 ekor jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun rincian ukuran ikan antara lain:

- ukuran berat < 100 gram: 4.549 ekor,
- ukuran berat 0,1 – 1 kg: 7.627 ekor,
- ukuran berat 1 – 3 kg: 2.750 ekor,
- ukuran berat > 3 kg: 29 ekor.

Kegiatan Napoleon di Kabupaten Natuna merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi nelayan kecil penangkap dan pembesaran (*ranching*) karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan prediksi total harga ikan dalam keramba mencapai Rp. 5.339.100.000 (lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

Terjadinya tren penurunan jumlah ikan berdasarkan usia berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2016 dan 2021-2024. Hal ini disebabkan oleh:

- kehilangan akibat pencurian baik dari ukuran 100 gram hingga ukuran 800 gram;
- penyakit ikan seperti lintah laut yang disebarkan oleh ikan yang dibudidayakan dari perairan Penagi;
- tingkat *survival rate* anakan yang rendah;
- lamanya waktu pembesaran dan modal pangan untuk mencapai ukuran panen yang cukup besar;
- keramba bocor akibat serangan predator di luar keramba seperti ikan buntal;
- adanya persaingan bisnis antara nelayan penangkap di Kabupaten Natuna dengan pemasok ke Kabupaten Kepulauan Anambas secara ilegal untuk ukuran benih yang menyebabkan harga benih menjadi anjlok.

Terkait permasalahan tersebut, diperlukan upaya pengelolaan berupa: pembatasan ukuran benih ikan yang ditangkap; membentuk kawasan taman perikanan; restocking hasil budidaya ke alam; pengendalian penangkapan dan pengembangan kelembagaan pemanfaat.

- **Pendataan Napoleon di Kabupaten Kepulauan Anambas**

Pendataan ikan napoleon di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan pada tanggal 20 s.d. 26 Oktober 2024 yang dilakukan oleh BPSPL Padang, LKKPN Pekanbaru Wilker Anambas,

dan Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pengumpulan data ikan di keramba dilakukan di keramba milik nelayan yang memanfaatkan napoleon dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pengamatan lokasi ditemukan benih ikan napoleon dilakukan di perairan di sekitar Kecamatan Siantan Tengah yang berdasarkan informasi nelayan lokal merupakan habitat benih/*juvenile* ikan napoleon.

Berdasarkan hasil pendataan, terdapat jumlah pelaku usaha atau nelayan yang masih aktif melakukan pemanfaatan ikan napoleon sebanyak 160 nelayan yang tersebar di 7 kecamatan. Jumlah total ikan yang terdapat di dalam keramba sebanyak 41.760 ekor. Adapun rincian ukuran ikan adalah:

- <100 gram: 14.518 ekor,
- 0,1 – 1 kg: 26.897 ekor,
- 1 – 3 kg: 310 ekor,
- >3 kg: 35 ekor.

Alur rantai pasok pemanfaatan ikan napoleon di Kepulauan Anambas berdasarkan rantai pasok perikanan dimulai dari tingkatan nelayan penangkap benih, penangkap benih-pembudidaya, pengumpul pembudidaya, hingga pengumpul-eksportir. Lokasi habitat benih napoleon merupakan perairan dengan tipe habitat dasar *Sargassum* yang tersebar di Kecamatan Palmatak, Siantan Tengah, dan Siantan Timur.



Gambar 108. Dokumentasi Pendataan Napoleon di Kab. Kepulauan Anambas

- Sidat

Pendataan sidat dilaksanakan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Pendataan berlangsung selama satu tahun dari Januari s.d. Desember 2024 dengan dibantu oleh tenaga enumerator.



Gambar 109. Dokumentasi Pendataan Pemanfaatan Sidat di Kabupaten Agam

Berdasarkan pendataan, terdapat 17 ekor *Anguilla bicolor* dan 177 ekor *Anguilla marmorata* di Kabupaten Agam. Data tangkapan sidat dewasa jenis *Anguilla marmorata* tertinggi yakni pada bulan Maret sebanyak 39 ekor dan paling sedikit pada bulan Mei sebanyak 21 ekor dengan kisaran Panjang 69-161 cm dengan kisaran berat 900-11000 gram. Data tangkapan sidat dewasa jenis *Anguilla bicolor* terdapat di bulan November dan Desember dengan jumlah 9 dan 8 ekor dengan kisaran Panjang 37-60 cm dan kisaran berat 350-1800 gram. Berdasarkan analisis pola pertumbuhan sidat untuk jenis *Anguilla marmorata* dan *Anguilla bicolor* dihasilkan secara keseluruhan merupakan pola pertumbuhan alometrik negative artinya laju pertumbuhan Panjang dan berat adalah tidak seimbang di mana laju pertambahan Panjang lebih cepat daripada pertambahan berat dengan karakteristik golongan ikan yang memiliki badan badannya kurang pipih/kurus.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 responden, 80% responden tidak mengetahui aturan terkait perlindungan ikan sidat karena belum mendapatkan informasi baik dari sosialisasi atau media lainnya. Sementara 20% responden lainnya mengetahui aturan tersebut. Saat ini telah terjadi penurunan populasi ikan sidat dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap sidat berupa pancing, panglar, kurao dan bubu. Rata-rata harga jual di tingkat penangkap ikan sidat yaitu Rp35.000,00/kg sementara di tingkat pengepul Rp60.000,00/kg.

Kendala yang dihadapi dalam pendataan dan pemanfaatan sidat antara lain:

- Data yang dihimpun oleh enumerator sebelumnya dan sekarang jauh berbeda. Hal ini dimungkinkan enumerator sebelumnya yang merupakan pengumpul memiliki cakupan pendataan yang luas yang dapat mewakili wilayah Kabupaten Agam sementara enumerator saat ini memiliki cakupan pendataan yang lebih kecil.
- Masih tertangkap jenis ikan sidat *Anguilla marmorata* dengan ukuran larangan tangkap yaitu di atas 5.000 gram sebesar 15%. Edukasi telah dilakukan saat kegiatan pendataan namun terkadang nelayan menganggap tangkapan sidat yang tidak sesuai ukuran sebagai rezeki mereka yang sifatnya penghasilan harian. Hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk memberikan edukasi/sosialisasi lebih lanjut terhadap masyarakat setempat perihal aturan perlindungan ikan sidat.
- Harga jual ikan sidat yang cenderung kecil Rp30.000,00/kg s.d. Rp60.000,00/kg untuk pemanfaatan lokal dan harga ke luar daerah Rp100.000,00, ekspor Rp125.000,00 sehingga memerlukan jumlah banyak dalam satu kali pengiriman ikan sidat agar memperoleh keuntungan karena terdapat komponen biaya lain dalam pengiriman ke luar daerah seperti biaya pengiriman serta PNBP yang dipungut dari instansi-instansi terkait.
- Penurunan kuota yang diberikan oleh Scientific Authority CITES diakibatkan belum adanya realisasi 2 tahun terakhir.
- Pendataan sidat dewasa saat ini belum memiliki Petunjuk Teknis sehingga masih merujuk pada hasil diskusi lisan dan tertulis dengan peneliti dan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, KKP yang telah disetujui.

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 9 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies dengan Rincian Output (RO) [2362.REB.002] Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 51. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 9

No	Komponen	Pagu (Rp)	Total Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.REB.002.051] Penyediaan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	353.798.000,00	17.484.000,00	331.782.264,00	93,8
2	[2362.REB.002.052] Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES	873.402.000,00	19.687.000,00	848.242.695,00	97,1
Total		1.227.200.000,00	37.171.000,00	1.180.024.959,00	96,2

Realisasi anggaran rincian output [2362.REB.002] adalah 96,2%. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pendataan jenis (hiu, pari, kuda laut) dan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan berupa SAJI, SIPJI, dan rekomendasi. Rincian output ini bersumber dari rupiah murni senilai Rp285.000.000,00 dan bersumber dari PNPB senilai Rp1.115.000.000,00. Rincian Output ini berdampak blokir penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp37.171.000,00.

IKU. 10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)

Pemanfaatan air laut selain energi adalah Pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/ekstraksi termasuk yang berasal dari Laut Dalam dengan skala lebih besar dari 50 liter/detik dan/atau berada pada kawasan konservasi serta ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari). Sementara itu, identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah inventarisasi/pengumpulan data dan informasi yang menghasilkan produk dan/atau jasa, yang akan didorong proses perizinannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan atas kebenaran dokumen dan data pengurusan perizinan air laut selain energi. Verifikasi ini dilakukan apabila terdapat permohonan di OSS. Capaian IKU ini diperoleh dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKU 10 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 52. Perbandingan Target dan Capaian IKU 10

IKU 10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	1	1	100	-

Capaian IKU ini adalah 1 Dokumen dengan persentase capaian 100% yang didukung dengan identifikasi dan verifikasi pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE).

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LtnzblNrcnk0g8jKV15a71_V5bjml_XN

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU ini tidak terdapat pada tahun 2023 sehingga tidak terdapat perbandingan capaian antara tahun 2023 dan 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang juga tidak termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 53. Perbandingan Capaian Pemanfaatan ALSE yang Diidentifikasi dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi (Dokumen)	1	1	1	1

Berdasarkan perbandingan capaian antara dua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak telah mencapai Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi sesuai target, yaitu 1 Dokumen. Dalam hal ini, kedua unit kerja melaksanakan sosialisasi dan identifikasi/verifikasi pemanfaatan ALSE.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKU ini didukung dengan identifikasi dan sosialisasi pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE). Hingga saat ini, belum terdapat Petunjuk Teknis terkait identifikasi pemanfaatan ALSE. Dalam hal ini, Direktorat Jasa Kelautan telah menyelenggarakan sosialisasi dan menyusun panduan izin pemanfaatan ALSE. Ke depannya, koordinasi lanjutan dengan Direktorat Jasa Kelautan dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada penggunaan aplikasi Zoom yang dapat digunakan tim pelaksana untuk mengikuti sosialisasi pemanfaatan ALSE secara daring. Dengan adanya aplikasi Zoom, sosialisasi tersebut dapat menjangkau dan meningkatkan pemahaman seluruh anggota tim pelaksana tanpa membutuhkan biaya yang banyak untuk menghadirkan seluruh tim secara luring.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh sosialisasi dan identifikasi pelaku usaha pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE). Kegiatan Sosialisasi dan Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan terutama bagi pelaku usaha pemegang izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang sudah terbit dengan Skala lebih dari 50 (lima puluh) liter/detik dan/atau berada pada

Kawasan Strategi Nasional, Kawasan Strategi Nasional Tertentu, Kawasan Konservasi serta ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 (tiga puluh) hari. Berdasarkan PP 85 Tahun 2021 terdapat dua kategori untuk perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang Menghasilkan Produk 2,5% per tahun dari Nilai Produksi (ekstraksi) dan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan) yaitu Rp 0,25 /m³ per tahun.

1. Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Kota Dumai

Identifikasi di Kota Dumai dilaksanakan pada 28 s.d. 29 Maret 2024 dengan melakukan beberapa pengecekan indikator seperti Jumlah Pipa, Intake Air Bahang, Jumlah Pompa Intake Air Bahang, Kapasitas Intake Air Bahang (m³), Jumlah Pipa Intake RO (*Reverse Osmosis*), Jumlah Pompa Intake RO, Kapasitas Intake RO (m³), Jumlah Outfall Air Bahang, Jumlah Outfall RO, Jumlah Flowmeter, Jumlah Tangki Hasil RO, Kapasitas Tangki Hasil RO dan Koordinat lokasi keberadaan pemanfaatan Air laut selain energi. Berdasarkan pemantauan tersebut, teridentifikasi tujuh pelaku usaha yang memanfaatkan ALSE dan menghasilkan produk. Adapun kendala yang ditemukan adalah terdapat perusahaan yang masih dalam pengurusan izin dasar PKKPRL sehingga belum dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha pemanfaatan ALSE. Hal-hal tersebut akan dikonsultasikan kembali pada saat Sosialisasi Pemanfaatan ALSE.



Gambar 110. Dokumentasi Identifikasi Pelaku Usaha Pemanfaatan ALSE di Kota Dumai

2. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan ALSE di Dumai

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) dilakukan pada Hari Selasa, 21 Mei 2024. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) dilakukan secara daring dan luring. Pelaksanaan kegiatan secara daring dilakukan melalui zoom meeting, sedangkan pelaksanaan kegiatan secara luring dilakukan di Hotel The Zuri, Kota Dumai, Provinsi Riau.

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut meliputi:

- Materi Teknis Pengaturan Perairan Pesisir/Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Riau dalam RTRW Provinsi Riau 2023-2043 yang disampaikan oleh Zulmasri, S.T., M.Si. selaku Subkoordinator Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.
- Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Kelautan yang disampaikan oleh Iqbal Suhaimi Gultom, S.I.K. selaku Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Kelautan, Direktorat Jasa Kelautan, KKP.
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang disampaikan oleh Endang Setia Budi, S.Sos. selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Direktorat Pelayanan Perizinan Non Industri Kedeputan Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM.



Gambar 111. Dokumentasi Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan ALSE di Dumai

3. Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang

Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) dilakukan pada hari Senin sampai Rabu tanggal 12– 14 Agustus 2024. Kegiatan ini dilakukan di Kabupten Bintan yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Taluk Sebong, dan di Kota Tanjungpinang satu kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Bestari Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 112. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang

Dari 6 (enam) pelaku usaha yang teridentifikasi, 3 (tiga) pelaku usaha sudah terbit KKPRL nya dan sisanya 1(satu) pelaku usaha masih dalam pengurusan, 2 pelaku usaha belum mengurus KKPRL sama sekali. Harapan kedepan para pelaku usaha baik yang sudah ataupun belum memiliki izin dasar PKKPRL di wilayah kerja BPSPL Padang khususnya di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dan sekitarnya dapat mentaati aturan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

4. Verifikasi Teknis dan Verifikasi Lapangan Perizinan Berusaha ALSE

Selama tahun 2024, BPSPL Padang telah mengikuti kegiatan verifikasi teknis dokumen sebanyak 17 kali dengan rincian 13 Perizinan reklamasi dan 4 kali perizinan ALSE terhadap 10 subyek hukum yang terdiri 3 subyek hukum permohonan perizinan berusaha ALSE dan 7 subyek hukum perizinan pelaksanaan reklamasi yang tersebar di 3 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Bila melihat perbandingan data tahun 2023 dan tahun 2024 kegiatan verifikasi dokumen perizinan berusaha sektor jasa kelautan terdapat peningkatan jumlah kegiatan verifikasi teknis dokumen sebanyak 5 kali yang terdiri dari 2 permohonan terkait verifikasi teknis perizinan pemanfaatan air laut selain energi (ALSE) dan 3 permohonan untuk perizinan pelaksanaan reklamasi. Verifikasi teknis dokumen dilaksanakan oleh tim perizinan dari Direktorat Jasa Kelautan dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dimana UPT BPSPL Padang berperan memberi masukan dan pendampingan bersama OPD Lingkup provinsi dalam hal pengumpulan data dan

informasi lapangan serta pelaku usaha sebagai pemohon dan Kementerian/Lembaga lainnya yang berkepentingan terhadap objek verifikasi teknis.

Tabel 54. Rekapitulasi Verifikasi Teknis Dokumen Perizinan ALSE di Wilayah Kerja BPSPL Padang

No	Tanggal Verifikasi Dokumen	Nama Subjek Hukum Pemohon	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kapasitas ALSE m ³ /jam	Klasifikasi Peruntukan
1	29 Agustus 2024	PT Intibenua Perkasa	Riau	Dumai	Lubuk Gaung	160	Untuk Keperluan Proses Pengolahan Air Produk dan Pendingin Kondensor
2	7 Oktober 2024	PT Musim Mas	Kepulauan Riau	Batam	Kabil	676	Untuk keperluan boiler, utilitas dan proses produksi
3	14 Oktober 2024	PT Intibenua Perkasatama	Riau	Dumai	Lubuk Gaung	160	Untuk Keperluan Proses Pengolahan Air Produk dan Pendingin Kondensor
4	24 Oktober 2024	PT Agro Murni	Riau	Dumai	Lubuk Gaung	160	Untuk Keperluan Boiler, Utilitas dan Proses Produksi

Tabel 55. Subjek Hukum yang Dilakukan Verifikasi Lapangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan ALSE

No	Tanggal	Subjek Hukum	Provinsi	Kab/Kota	Surat Arahan	Hasil Verifikasi
1	10 Oktober 2024	PT Musim Mas	Kepulauan Riau	Batam	Surat Direktur Jasa Kelautan Nomor B. 2346/DJPKRL.4/PRL.340/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024	- Terdapat 2 pompa pengambilan air laut yang telah terpasang; - Terdapat 1 rumah pompa yang telah terpasang dengan 2 unit pompa di dalamnya. Selain itu akan ditambah lagi 1 rumah pompa lagi dengan 2 unit pompa di dalamnya; - Kapasitas 2 unit pompa yang telah terpasang masing-masing 320 m³/jam dan pompa tambahan

No	Tanggal	Subjek Hukum	Provinsi	Kab/Kota	Surat Arah	Hasil Verifikasi
						sebanyak 2 unit yang juga memiliki kapasitas 320 m³/jam; • Terdapat 5 unit SWRO yang sudah terpasang dan direncanakan penambahan 3 unit SWRO; • Flowmeter untuk inlet direncanakan akan terpasang pada bulan Oktober 2024. Saat ini flowmeter yang telah terpasang digunakan untuk mengukur air laut yang tidak memenuhi kualitas yang ditetapkan (<i>rejected water</i> SWRO); • Saat ini terdapat sumber air bersih dan air baku yang berasal dari PT Pertamina Energi Terminal (PET) dan PT Air Batam Hilir (ABH). Kapasitas penggunaan air bersih dari ABH dan PET sebesar 82.280 m³/bulan; • Air hasil pengolahan SWRO merupakan sumber utama untuk keperluan produksi dan domestik perkantoran. Penggunaan air tawar dari 2 penyedia tersebut sebagai tambahan apabila diperlukan; • Terdapat 15 plant di Site A dan Site B yang menggunakan air

No	Tanggal	Subjek Hukum	Provinsi	Kab/Kota	Surat Arahan	Hasil Verifikasi
						bersih/air baku. Selain itu, air juga digunakan untuk boiler yang diperlukan pada proses produksi; • Tidak ada aktivitas penjualan air kepada pihak lain
2	16 Oktober 2024	PT Inibenua Perkasatama	Riau	Dumai	Surat Direktur Jasa Kelautan No. B.2550/DJPKRL.4/TU.330/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024	• Terdapat 2 pompa <i>intake</i> pengambilan air laut yang telah terpasang di dermaga B, masing-masing berkapasitas 200 m³/jam • Terdapat 1 unit SWRO yang sudah terpasang • Flowmeter pengambilan air laut telah terpasang di site C • Saat ini terdapat sumber air bersih yang berasal dari PDAM, dengan kapasitas penggunaan air bersih rata-rata 500 m³/jam • Air hasil pengolahan SWRO merupakan salah satu sumber air untuk keperluan produksi dan domestik perkantoran • Dalam kegiatan produksi air hasil SWRO digunakan untuk 2 unit penyulingan (<i>refinery</i>). Selain itu, air juga digunakan untuk 2 boiler yang diperlukan pada proses produksi • Tidak ada aktivitas

No	Tanggal	Subjek Hukum	Provinsi	Kab/Kota	Surat Arahan	Hasil Verifikasi
						penjualan air kepada pihak lain
3	31 Oktober 2024	PT Argo Murni	Riau	Dumai	Surat Direktur Jasa Kelautan Nomor: B.2710/DJPKRL.4/PRL.340/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024	• Terdapat 2 pompa intake pengambilan air laut yang telah terpasang di dermaga, masing-masing berkapasitas 160 m³/jam • Terdapat 1 unit SWRO dan 1 Unit BWRO yang sudah terpasang • Flowmeter pengambilan air laut telah terpasang di pipa intake sebelum bak <i>clarifier</i> • Saat ini terdapat sumber air bersih yang berasal dari PDAM, dengan kapasitas penggunaan air bersih rata-rata 30 m³/hari yang digunakan untuk keperluan domestik perkantoran. • Air hasil pengolahan SWRO digunakan dalam kegiatan proses produksi yang meliputi cooling tower, refinery plant dan fraksinasi. Selain itu air juga digunakan untuk umpan boiler. • Tidak ada aktivitas penjualan air kepada pihak lain

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung oleh alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2363.PBW] Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan Rincian Output kegiatan tersebut.

Tabel 56. Realisasi Rincian Output Pendukung IKU 10

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2363.PBW.002] Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	100.000.000,00	98.033.999,00	98
Total		100.000.000,00	98.033.999,00	98

Realisasi anggaran pada KRO [2362.PEC] adalah 98%. Keseluruhan rincian output ini bersumber dari PNBSP.

IKU. 11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kawasan)

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL) yang terdiri dari sosialisasi BCL dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sampah plastik di Laut. Bulan Cinta Laut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah plastik yang masuk laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah plastik untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. Capaian IKU ini dihitung dari inventarisasi dan penjumlahan Kabupaten/Kota yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKU 11 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 57. Perbandingan Target dan Capaian IKU 11

IKU. 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kawasan)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	4	4	100	-

Capaian IKU ini adalah 4 Kawasan dengan persentase capaian 100% yang didukung dengan terselenggarakannya Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Padang, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Deli Serdang.

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KQSA7mazBtvXs6cLi8ZNn_9i0OcvVUx

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tidak terdapat perbandingan capaian pada tahun 2023-2024. Pada tahun 2023, IKU ini tidak digunakan dalam pengukuran kinerja karena anggaran pendukungnya terdampak blokir hingga akhir tahun.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan dengan indikator ini. Sementara itu, pada perbandingan

dengan standar nasional, terdapat Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berkaitan dengan indikator ini.

Tabel 58. Rincian Target dalam RPJMN yang Berkaitan dengan IKU 11 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	8	6	6	5	5	27 Lokasi

Dalam hal ini, indikator kinerja Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 59. Perbandingan Capaian Kawasan Pesisir yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)	4	4	4	4

Berdasarkan perbandingan capaian antara dua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak telah mencapai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran sesuai target, yaitu 4 Kawasan. Dalam hal ini, kedua unit kerja melaksanakan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut sesuai dengan lokasi target di masing-masing unit kerja.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKU 11 didukung oleh partisipasi aktif dari nelayan dalam kegiatan Bulan Cinta Laut. Dalam hal ini, BPSPL Padang akan melaksanakan sosialisasi dan supervisi kepada nelayan untuk mendorong partisipasi dan meningkatkan pemahaman mereka dalam pemilahan sampah.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat selama pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Selain itu, efisiensi sumber daya juga terdapat pada pelibatan mitra stakeholder terkait selama penyelenggaraan kegiatan.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU 11 didukung oleh pelaksanaan kegiatan berikut:

1. Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut

Dalam rangka mendukung penanggulangan pencemaran pesisir, BPSPL Padang melaksanakan identifikasi di lokasi-lokasi yang potensial untuk menjadi lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Identifikasi tersebut dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar, Kota Batam, Kota Padang, Kota Duri, Kota Dumai, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Deli Serdang. Kemudian, berdasarkan hasil identifikasi yang mempertimbangkan keaktifan nelayan, ketersediaan mitra, dan profil timbulan sampah, disepakati bahwa lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang adalah Kota Batam, Kota Padang, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Deli Serdang.

2. Verifikasi dan Validasi Data Nelayan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut

Berikut adalah rincian jumlah nelayan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di masing-masing lokasi.

Tabel 60. Rincian Nelayan Gernas Bulan Cinta Laut yang Terverifikasi dan Tervalidasi

No	Lokasi	Jumlah Nelayan yang Tervalidasi (Orang)
1	Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat	87
2	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	93
3	Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	73
4	Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara	70
Total		323

3. Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis ini merupakan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan Bahaya Sampah Plastik terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau - Pulau Kecil (Keanekaragaman Hayati Laut, Ekosistem, Kesehatan dan berdampak pada Ekonomi); Pencegahan dan Pengendalian Sampah di Laut (3R, Analisa Usaha Pengolahan Sampah); serta Pengendalian dan edukasi pengelolaan sampah plastik yang masuk ke laut bernilai ekonomis. Adapun narasumber dari berbagai kalangan, meliputi instansi pemerintah, praktisi, mitra dan dari kelompok masyarakat.

4. Penimbangan Sampah

Berikut adalah rekapitulasi sampah yang terkumpul pada kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

Gambar 113. Rekapitulasi Sampah pada Gernas Bulan Cinta Laut di Wilker BPSPL Padang

No	Lokasi	Periode Penimbangan Sampah	Sampah Terkumpul (kg)	Sampah Bernilai Ekonomis (kg)	Nilai Ekonomis Sampah Terkumpul	Keterlibatan Masyarakat
1	Kota Padang, Sumatra Barat	8 Mei s.d. 19 Juli 2024	109.914,82	97.795,84	51.676.146	87
2	Kota Batam, Kepulauan Riau	22 Mei s.d. 11 Juli 2024	33.514	345,9	1.091.800	93
3	Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau	16 Mei s.d. 9 Juli 2024	5.345,25	3.794,1	6.475.917	73
4	Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara	21 Mei s.d. 13 Juni 2024	11.007,8	11.007,8	21.419.580	70



Gambar 114. Rangkuman Gernas BCL di Wilayah Kerja BPSPL Padang



Gambar 115. Timeline Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di BPSPL Padang



Gambar 116. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Padang



Gambar 117. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Batam



Gambar 118. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Tanjungpinang



Gambar 119. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kab. Deli Serdang

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 11 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD] Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dengan Rincian Output (RO) [4346.QDD.001] Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 61. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 11

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[4346.QDD.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	800.000.000,00	791.390.836,00	98,9
Total		800.000.000,00	791.390.836,00	98,9

Realisasi anggaran komponen [4346.QDD.001.051] adalah 98,9%.

IKM. 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Padang (Nilai)

Indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi atas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kategori capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
3. cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
4. kurang, apabila nilai IKPA > 70 .

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKM 12 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 62. Perbandingan Target dan Capaian IKM 12

IKM. 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
95,34	93,76	99,61	106,24	4,48

Capaian IKPA tahun 2024 adalah 99,61 dengan persentase capaian 106,24.

Data Dukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VDZZrX58kmlaJ_nRJA6WeSbmNxRslzx

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan perbandingan capaian dengan tahun 2023, terdapat kenaikan capaian sebesar 4,48% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didukung dengan adanya peningkatan pada aspek kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada penilaian IKPA.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Sementara itu, untuk perbandingan dengan standar nasional, digunakan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai acuan. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024

dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, capaian nilai IKPA memiliki target 90 pada tahun 2024. Dalam hal ini, persentase capaian BPSPL Padang pada triwulan IV 2024 telah mencapai 110,68% dari target Renstra DJPRL tahun 2024.

Tabel 63. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 12 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai IKPA (nilai)	88	89	89	90	90

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 64. Perbandingan Nilai IKPA dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Nilai)	93,76	99,61	93,76	94,98

Berdasarkan perbandingan Nilai IKPA, BPSPL Padang memiliki nilai IKPA lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Pontianak. Seluruh komponen penilaian IKPA BPSPL Padang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Pontianak. Pada penilaian IKPA BPSPL Padang, diperoleh penilaian maksimal pada aspek Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Belanja Kontraktual, dan Penyelesaian Tagihan.

Tabel 65. Perbandingan Komponen Penilaian IKPA

Unit Kerja	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total
BPSPL Padang	10	15	19,88	10	10	9,73	25	99,61
BPSPL Pontianak	10	12,70	19,25	9,60	9,67	8,77	25	94,98

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya pencapaian IKM 12 didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Dalam hal ini, kedisiplinan, konsistensi, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam unsur-unsur pelaksanaan anggaran sangat penting dalam pencapaian nilai IKPA yang baik. Dalam pelaksanaan anggaran, acapkali ditemukan permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pengelola keuangan dapat melakukan monitoring secara berkala, khususnya dalam hal menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan. Dengan adanya sistem monitoring tersebut, permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangan tindak lanjutnya.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaannya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 12 berupa penggunaan teknologi informasi dalam monitoring pengelolaan keuangan menggunakan form *excel* dan *whatsapp group*. Adanya ruang khusus tersebut dapat membantu staf pengelola keuangan untuk memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah, dan menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan. Selain itu, terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya dalam hal penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) melalui <https://sakti.kemenkeu.go.id/> untuk penyampaian usulan revisi DIPA dan Hal III DIPA dan aplikasi <https://espm.kemenkeu.go.id/> untuk pengajuan SPM. Sebelum terdapat aplikasi, kegiatan tersebut dilakukan secara luring ke KPPN dan Kantor Wilayah Perbendaharaan yang lebih memakan waktu dan tenaga.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKM 12 dapat ditunjang dengan metode pengawasan yang berjenjang. Dalam hal pelaksanaan anggaran, tim pengelola keuangan BPSPL Padang menerapkan sistem monitoring yang berguna untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya sistem tersebut dapat mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusi yang dirumuskan.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 12.

IKM. 13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup BPSPL Padang (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Adapun cakupan evaluasi kinerja meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan Satuan Kerja BPSPL Padang ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) dengan indikator perhitungan meliputi capaian keluaran kegiatan, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKM 13 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 66. Perbandingan Target dan Capaian IKM 13

IKM. 13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	71	98.32	138.48 atau 120 berdasarkan aplikasi Kineriaku KKP	-

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Padang pada tahun 2024 adalah 98,32 dengan persentase capaian 138,48% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tidak terdapat perbandingan capaian pada tahun 2023-2024 karena IKM ini merupakan IKM baru pada tahun 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator Nilai Kinerja

Perencanaan Anggaran tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan juga tidak termuat dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 67. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Nilai)	71	98,32	71	98,11

Berdasarkan perbandingan Nilai IKPA, BPSPL Padang memiliki nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Pontianak dengan perbedaan yang tidak signifikan.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM 13 juga didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan aspek penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. Pada tahun 2024, penyajian data pada aplikasi SMART DJA telah terkoneksi dengan pengisian rincian output ke aplikasi SAKTI. Dalam hal ini, BPSPL Padang senantiasa melakukan koordinasi dengan pengelola aplikasi terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka kesesuaian penyajian rincian output.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 13 berupa penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA tidak perlu menginput realisasi keuangan dan hanya perlu melengkapi capaian rincian output setiap bulannya. Selain itu, perhitungan NKA yang berbasis aplikasi tidak perlu melakukan perhitungan manual.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian IKM 13 didukung oleh pemahaman terhadap Pengukuran nilai kinerja anggaran lebih lengkapnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, pencapaian IKM 13 juga didukung dengan ketaatan dalam penginputan capaian output setiap bulannya.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 13.

IKM. 14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan

pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Predikat tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian yang mengacu PermenPAN RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Secara teknis, unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK:

- Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua pengungkit;
- Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal 18,25 dengan nilai subkomponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 dan subkomponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 52,5;
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 14 (Survei 3,20).

Adapun pencapaian IKM ini diperoleh dari perhitungan penilaian WBK oleh Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKM 14 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 68. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14

IKM. 14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
93,31	75	90,40	120,53 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP	-3,12

Capaian nilai WBK BPSPL Padang tahun 2024 adalah 90,40 dengan persentase capaian 120,53% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP. Dalam perkembangannya, BPSPL Padang meraih predikat Menuju WBK Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FLY52f3ljNRZL-foUvWv4L0MTdGTmk24>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan perbandingan dengan tahun 2023, terdapat penurunan capaian nilai WBK sebesar 3,12%. Adapun penurunan nilai tersebut disebabkan adanya penyesuaian penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal KKP. Namun demikian, adanya penurunan capaian tersebut tidak mempengaruhi persentase capaian pada aplikasi Kinerjaku. Selain itu, dengan perolehan nilai WBK dari Tim Penilai Internal KKP sebesar 90,40, BPSPL Padang berhasil meraih predikat Menuju WBK Nasional yang dianugerahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan secara langsung dengan indikator ini.

Tabel 69. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 14 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (kumulatif) (unit)	6	7	8	9	10

Dalam hal ini, Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 70. Perbandingan Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Nilai)	75	90,40	75	90,81

Berdasarkan perbandingan nilai WBK pada kedua unit kerja, nilai WBK BPSPL Pontianak lebih tinggi dibandingkan dengan nilai WBK BPSPL Padang. Namun demikian, sumber data yang digunakan sebagai capaian kedua unit kerja berbeda. Nilai WBK BPSPL Padang diperoleh berdasarkan Hasil Seleksi Pengusulan WBK TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 20 September 2024. Sementara itu, Nilai yang digunakan sebagai capaian BPSPL Pontianak merupakan Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2022.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sebagai upaya pencapaian nilai WBK yang maksimal, BPSPL Padang melaksanakan monitoring pembangunan zona integritas secara berkala untuk memantau perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dokumen tersebut dapat disusun sesuai dengan kriteria Petunjuk Teknis.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 14 dengan adanya pemantauan oleh Inspektorat Jenderal secara daring. Dalam upaya kontrol secara internal, BPSPL Padang juga menerapkan rapat daring yang dapat diikuti oleh seluruh tim yang tersebar di wilayah kerja BPSPL Padang.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya pencapaian IKM 14, BPSPL Padang menerapkan sistem monitoring secara berkala. Pada kegiatan ini, Ketua Pembangunan Zona Integritas BPSPL Padang memimpin sesi pembahasan yang mencakup

evaluasi mandiri, pengecekan dokumen secara menyeluruh, hingga monitoring dari tindak lanjutnya. Adanya kegiatan ini dapat mendukung kedisiplinan tim dalam membangun area pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

a. Pembentukan Tim

Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2024 di lingkup BPSPL Padang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala BPSPL Padang Nomor B.277/BPSPL.1/KP.440/I2024 tanggal 17 Januari 2024 dan kemudian diperbaharui melalui Surat Tugas Kepala BPSPL Padang Nomor B.756/BPSPL.1/Tu.110/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.

b. Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di BPSPL Padang oleh Inspektorat V KKP

Penilaian pembangunan zona integritas di BPSPL Padang dilaksanakan pada 20 s.d. 24 Februari 2024. Penilaian ini menghasilkan nilai sementara 88,63 bagi BPSPL Padang. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan dapat dipenuhi secara bertahap.

Tabel 71. Hasil Penilaian Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada BPSPL Padang

PENILAIAN			BOBOT	NILAI	%
A.	PENGUNGKIT		60,00	52,55	
	I.	PEMENUHAN	30,00	25,08	83,61
	1.	Manajemen Perubahan	4,00	3,05	76,16
	2.	Penataan Tatalaksana	3,50	2,92	83,33
	3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,28	85,58
	4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	3,58	71,60
	5.	Penguatan Pengawasan	7,50	6,44	85,87
	6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	4,82	96,40
	II.	REFORM	30,00	27,46	91,54
	1.	Manajemen Perubahan	4,00	3,42	85,50
	2.	Penataan Tatalaksana	3,50	2,92	83,38
	3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,25	85
	4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	5,00	100,00
	5.	Penguatan Pengawasan	7,50	6,88	91,67
	6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
TOTAL PENGUNGKIT				52,55	87,58
B.	HASIL		40,00	36,08	
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50	20,07	89,19
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK)	17,50	16,32	93,25
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	3,75	75,00
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50	16,01	91,50
		Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP)	17,50	16,01	91,50
TOTAL HASIL					90,20
NILAI PEMANTAUAN PEMBANGUNAN ZI					88,63

c. Monitoring Pembangunan ZI

Monitoring pembangunan zona integritas di BPSPL Padang dilaksanakan triwulanan untuk memantau kelemahan-kelemahan dan merumuskan rekomendasi tindak lanjutnya. Pemantauan ini berguna untuk memastikan komponen-komponen yang harus dipenuhi.

d. Pengusulan Penilaian Menuju WBK Nasional

Berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1456/MEN-KP/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Usulan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BPSPL Padang merupakan salah satu unit kerja yang diusulkan penilaian WBK

Nasional dengan 90,40. Hal tersebut diperkuat dengan surat Inspektur Jenderal KKP Nomor B.291/ITJ/KP.730/IX/2024 pada 18 September 2024 perihal Hasil Seleksi Pemantauan Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KKP Tahun 2024.



Gambar 120. Pengusulan BPSPL Padang untuk Predikat Menuju WBK Tahun 2024

e. Penghargaan Predikat Menuju WBK Nasional

Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/156/PW.99/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Undangan Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPSPL Padang diundang sebagai penerima penganugerahan Zona Integritas dengan predikat WBK di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lampiran 3).

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

panrb
JALAN JENDRAL SUKOWIRJO KAW. 63 JAKARTA 12159
TELIPON (021) 7390381 - 7390382 - 7390383 FAX (021) 7390313, 7390314, 7390315 www.menpan.go.id

Nomor : B/156/PW.99/2024 02 Desember 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Undangan Satu Dekade Zona Integritas
dan Penganugerahan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM Tahun 2024

Yth:
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
di
Tempat

Dalam upaya mempercepat berwujudnya pemerintah berkelas dunia yang diarahkan pada birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima selama 16 tahun terakhir, telah dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/pelaksanaan kerja tertentu yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas terhadap unit kerja yang telah mengusulkan Zona Integritas tahun 2024.

Atas dasar tersebut, Kementerian PANRB akan menyelenggarakan kegiatan **"Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024"** pada:

Hari, tanggal : Rabu, 11 Desember 2024
Waktu : 08.30 - 12.00 WIB
Tempat : Assembly Hall Binawa, Hotel Bidakara Jakarta
Dresscode : Baik Formal

Kami mohon kehadiran Bapak/Ibu Pimpian Unit Kerja sebagaimana terlampir beserta **1 (satu) orang Pendamping yang merupakan Ketua Tim Zona Integritas** sebagai **Penerima Penghargaan Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024**. Untuk ketertiban dan kelancaran berjalannya acara tersebut, Bapak/Ibu dimohon melakukan registrasi dengan ketentuan sebagaimana terdapat pada lampiran surat ini.

Pelaksanaan acara ini dibebankan pada anggaran Kementerian PANRB, kecuali biaya perjalanan dinas dan akomodasi penginapan ditanggung oleh masing-masing instansi pemerintah. Seluruh dokumentasi akan dilakukan oleh Kementerian PANRB, dimohon untuk tidak membawa jurno foto sendiri.

Catatan :

- UU RI No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya mempunyai nilai hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **B2-E**.
- Surat ini dapat divalidasi keabsahannya di <https://pnsurung.menpan.go.id>, dengan kode 241202PW04.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh...

ERWAN AGUS PURWANTO
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 1306080233980210401

Catatan :

- UU RI No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya mempunyai nilai hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **B2-E**.
- Surat ini dapat divalidasi keabsahannya di <https://pnsurung.menpan.go.id>, dengan kode 241202PW04.

Lampiran I

Nomor : B/156/PW.99/2024
Tanggal : 1 Desember 2024

DAFTAR UNDANGAN
Penerima Penganugerahan Zona Integritas di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Unit Kerja	Predikat
1.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSP) Padang	WBK
2.	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap	WBK

Gambar 121. Undangan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 di Lingkungan KKP



Gambar 122. Dokumentasi Penganugerahan Predikat Menuju WBK Tahun 2024

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 14 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan Rincian Output (RO) [2367.EBA.958] Layanan Kehumasan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 72. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 14

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2367.EBA.958.052] Pelayanan Publik	18.840.000,00	17.911.125,00	95,1
Total		18.840.000,00	17.911.125,00	95,1

Hingga triwulan IV 2024, komponen [2367.EBA.958.052] telah terealisasi 95,1%.

IKM. 15. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)

Indeks profesionalitas (IP) ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Adapun bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- Kualifikasi, yang diukur dari indikator Riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, memiliki bobot 25%,
- Kompetensi, yang diukur dari indikator Riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, memiliki bobot 40%,
- Kinerja, yang diukur dari indikator penilaian prestasi kerja, memiliki bobot 30%,
- Disiplin, yang diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin, memiliki bobot 5%.

Penjumlahan dari nilai masing-masing dimensi akan menghasilkan Indeks Profesionalitas ASN dengan kategori penilaian sebagai berikut:

- 91-100: Sangat Profesional/Sangat Tinggi,
- 81-90: Cenderung Profesional/Tinggi,
- 71-80: Rentan Tidak Profesional/Sedang,
- 61-70: Cenderung Tidak Profesional/Rendah,
- ≤60: Sangat Tidak Profesional/Sangat Rendah.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKM 15 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 73. Perbandingan Target dan Capaian IKM 15

IKM. 15. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
90,82	88	92,85	105,51	2,24

Capaian IP ASN 2024 adalah 92,85 dengan persentase capaian 105,51%.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RoJTrzL1HK9cPWOXKOSO7OhoYInVCgQo>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan perbandingan capaian dengan tahun 2024, terdapat kenaikan capaian sebesar 2,24%. Kenaikan ini didukung adanya peningkatan pada aspek Kinerja dalam pengukuran IP ASN.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, capaian Indeks Profesionalitas ASN memiliki target 76 pada tahun 2024.

Tabel 74. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 15 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (indeks)	72	73	74	75	76

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Indeks Profesionalitas ASN tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 75. Perbandingan IP ASN dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	88	92,85	88	93,65

Berdasarkan perbandingan Indeks Profesionalitas ASN pada kedua unit kerja, IP ASN BPSPL Pontianak lebih tinggi dibandingkan IP ASN BPSPL Padang. Dalam penilaian IP ASN, komponen kualifikasi dan kinerja pada BPSPL Pontianak lebih tinggi dibandingkan BPSPL Padang.

Tabel 76. Perbandingan Penilaian Komponen IP ASN

Unit Kerja	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disipin	Total
BPSPL Padang	20,77	40	27,08	5	92,85
BPSPL Pontianak	20,83	39,57	28,26	5	93,65

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM 15 didukung dengan adanya kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat diikuti pegawai. Setiap pegawai dapat memenuhi diklat 20 JP-nya melalui kegiatan pengembangan diri yang tersedia secara luring dan daring untuk mendongkrak perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang. Namun demikian, pencapaian IP ASN BPSPL Padang tidak meningkat secara signifikan karena tidak ada tambahan pegawai yang meningkat kualifikasi pendidikannya. Maka dari itu, alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IP ASN BPSPL Padang adalah mendorong pegawai yang telah selesai izin dan tugas belajar untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi finalnya agar gelarnya dapat segera diakui.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam keikutsertaan pegawai BPSPL Padang dalam pengembangan kompetensi berbasis daring. Adanya kegiatan pengembangan kompetensi secara daring ini dapat memperluas kesempatan bagi seluruh pegawai tanpa dibatasi oleh ketersediaan anggaran.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian IKM 15 didukung oleh keaktifan pegawai dalam mengikuti pengembangan kompetensi workshop/diklat yang diinput ke dalam SIASN. Untuk itu, BPSPL Padang senantiasa melakukan monitor pencapaian IP ASN masing-masing pegawai. Monitoring tersebut dilakukan dengan pengunggahan bukti dukung nilai IP ASN masing-masing pegawai ke laman google drive untuk memudahkan pemantauan.

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 15 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBC] Layanan Manajemen SDM Internal dengan Rincian Output (RO) [2367.EBC.954] Layanan Manajemen SDM. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 77. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 15

No	Komponen	Pagu (Rp)	Total Blokir	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2367.EBC.954.051] Layanan Manajemen SDM	325.367.000,00	1.644.000,00	323.605.900,00	99,5
Total		325.367.000,00	1.644.000,00	323.605.900,00	99,5

Realisasi anggaran rincian output [2367.EBC.954] adalah 99,5%. Komponen ini terdampak oleh blokir penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.644.000,00.

IKM. 16. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang

Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat empat aspek penilaian di dalam evaluasi tersebut, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Adapun kategori nilai PM SAKIP antara lain sebagai berikut:

1. predikat AA dengan nilai >90-100 dengan kategori Sangat Memuaskan;
2. predikat A dengan nilai >80-90 dengan kategori Memuaskan;
3. predikat BB dengan nilai >70-80 dengan kategori Sangat Baik;
4. predikat B dengan nilai >60-70 dengan kategori Baik;
5. predikat CC dengan nilai >50-60 dengan kategori Cukup;
6. predikat C dengan nilai >30-50 dengan kategori Kurang;
7. predikat D dengan nilai 0-30 dengan kategori Sangat Kurang.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKM 16 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 78. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16

IKM. 16. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
88,2	81	89,85	110,93	1,87

Capaian nilai PM SAKIP BPSPL Padang adalah 89,85 dengan persentase capaian 110,93%.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vMzAJhSdJdYk0PTJaiZ2BJB6FmKtJmJG>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan perbandingan capaian dengan tahun 2023, terdapat kenaikan capaian sebesar 1,87%. Kenaikan capaian ini didukung dengan adanya peningkatan pada nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada evaluasi AKIP.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, capaian Nilai PM SAKIP memiliki target 83,75 pada tahun 2024. Dalam hal ini, persentase capaian BPSPL Padang pada triwulan IV 2024 telah mencapai 107,28% dari target Renstra DJPRL tahun 2024..

Tabel 79. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 16 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Nilai PM SAKIP tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 80. Perbandingan Nilai PM SAKIP dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai PM SAKIP (Nilai)	81	89,85	81	85,55

Berdasarkan perbandingan nilai PM SAKIP pada kedua unit kerja, nilai PM SAKIP BPSPL Padang lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Pontianak. Perolehan nilai PM SAKIP BPSPL Padang didukung oleh pengembangan *platform* Rumah Gadang yang menyediakan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan penerapan KOMPAK Plus.

Tabel 81. Perbandingan Komponen Penilaian PM SAKIP

Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Nilai Hasil Evaluasi
BPSPL Padang	27,60	27,60	12,90	21,75	89,85
BPSPL Pontianak	25,80	27,60	12,90	19,25	85,55

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian IKM 16 dapat didukung oleh adanya harmonisasi antara tim pengelola kinerja, dari sub-tim perencanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan. Selain itu, pemahaman tim pengelola kinerja mengenai aspek-aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 16 berupa pemanfaatan teknologi dalam media penyimpanan dokumen dan aplikasi untuk pertemuan virtual. Di samping itu, dokumen pendukung SAKIP juga telah tertata dalam media penyimpanan *google drive* sehingga tidak tercecer dan terkumpul dengan baik.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKM 16 dapat ditunjang dengan adanya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup BPSPL Padang secara konsisten dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, verifikasi, hingga evaluasi kinerja. Selain itu, kepatuhan pelaporan dan pendokumentasian data dukung kinerja juga dapat mendukung perolehan nilai SAKIP.

Evaluasi AKIP tahun 2024 di lingkungan DJPKRL telah dilaksanakan pada 24 s.d. 27 Juni 2024, dilanjutkan dengan Pleno pembahasannya pada 11 s.d. 13 September 2024. Perolehan nilai Evaluasi AKIP BPSPL Padang tahun 2024 adalah 89,85.

Tabel 82. Nilai AKIP BPSPL Padang 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	27,60	90%
1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6,00	6,00	100%
1.b	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	8,10	90%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,50	90%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	27,60	90%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6,00	100%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10	90%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	13,50	90%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,90	90%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja	3,00	3,00	100%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,15	70%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,75	90%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	21,75	90%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	5	100%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	90%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja	12,50	10	80%

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 16 dapat didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal dan Rincian Output (RO) [2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan [2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 83. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKM 16

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Total Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	154.500.000,00	-	153.929.226,00	99,6
2	[2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	88.000.000,00	4.158.000,00	82.789.987,00	94,1
Total		242.500.000,00	4.158.000,00	236.719.213,00	97,6

IKM. 17. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup KKP, penyelenggaraan SPIP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKM 17 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 84. Perbandingan Target dan Capaian IKM 17

IKM. 17 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)				
Realisasi	Tahun 2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
Tahun 2023				
4	4	4	100	-

Capaian IKM 17 pada tahun 2024 telah sesuai target 4 dokumen dengan persentase capaian 100%, yaitu Laporan SPIP BPSPL Padang Triwulan IV 2023, Triwulan I 2024, Triwulan II 2024, dan Triwulan III 2024.

Dokumen pendukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jwaQmkrcYTCj1shtbIKXf6dwOeXPjKo9>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKM 17 pada tahun 2023 dan 2024 adalah sama, yaitu empat dokumen. Maka dari itu, tidak terdapat persentase kenaikan capaian IKM 17 pada 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan secara langsung dengan indikator ini.

Tabel 85. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 17 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (level)	3	3	3	3	3

Dalam hal ini, Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Nilai Maturitas SPIP tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 86. Perbandingan Laporan SPIP yang Disusun dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Laporan SPIP yang disusun (Dokumen)	4	4	4	4

Berdasarkan perbandingan capaian antara dua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak telah mencapai Laporan SPIP yang Disusun sesuai target, yaitu 4 Dokumen. Dalam hal ini, kedua unit kerja telah Menyusun dan menyampaikan Laporan SPIP setiap triwulannya.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM 17 didukung dengan adanya kegiatan FGD Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi. Pengendalian Risiko Kegiatan BPSPL Padang dibuat berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk diantisipasi dan dijadikan bahan masukan dalam persiapan kegiatan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada kegiatan monitoring upaya pengendalian di BPSPL Padang yang secara umum memanfaatkan teknologi komunikasi dan media penyimpanan data berbasis daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya pun tim didukung dengan aplikasi-aplikasi penunjang pelaksanaan anggaran, pelayanan peredaran jenis, pemungutan PNB, hingga pelaporan berkala.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian IKM ini didukung dengan implementasi manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan dengan menyertakan data dukung pengendalian risiko yang dilaporkan secara berkala. Lebih lanjut, BPSPL Padang juga menerapkan implementasi pemantauan risiko secara berkala dan menyeluruh.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 17.

IKM. 18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang telah memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Dalam pencapaian IKM ini, digunakan system informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office*.

Penghitungan capaian berdasarkan poin keaktifan Kepala UPT melakukan posting berbagi pengetahuan dengan target 3 poin dan nilai maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin per triwulan. Penghitungan poin berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut:

- Unggah dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai bobot poin 0,5. Dalam hal unggah kegiatan Apel Pagi tidak mendapatkan nilai.
- Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 1.
- Berbagi informasi berupa video atau campaign dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 3.

Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut dengan penghitungan sesuai rumus:

$$\text{Keaktifan} = \frac{\text{Jumlah Poin Keaktifan Pejabat}}{\text{Jumlah Target Poin Keaktifan Pejabat}} \times 100\%$$

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKM 18 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 87. Perbandingan Target dan Capaian IKM 18

IKM. 18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
133,33	94	133,33	141,84 atau 120 (aplikasi Kinerjaku)	-

Capaian IKM 18 pada tahun 2024 adalah 133,33%. Capaian tersebut menghasilkan persentase capaian 141,84% atau 120% berdasarkan persentase maksimal perhitungan aplikasi Kinerjaku.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EAYK9n51RS4VSfOBOSkzflAhvMNKG4d6>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan perbandingan dengan capaian tahun 2023, tidak terdapat kenaikan karena pada kedua periode Indikator Kinerja ini memiliki capaian yang sama.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar memiliki target 90 pada tahun 2024. Dalam hal ini, persentase capaian BPSPL Padang pada triwulan IV 2024 telah mencapai 148,14% dari target Renstra DJPRL tahun 2024.

Tabel 88. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 18 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	82	84	86	88	90

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 89. Perbandingan Persentase Penerapan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	133,33	94	133,33

Berdasarkan perbandingan capaian antara dua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak telah mencapai Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar melampaui target, yaitu dengan realisasi 133,33%. Dalam hal ini, kedua unit kerja aktif mengunggah informasi kegiatan melalui portal *Collaboration Office*.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh keaktifan Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dalam membagikan informasi kegiatan dan infografis menggunakan portal *Collaboration Office*.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKM 18 terdapat pada pemanfaatan sarana teknologi dan informasi untuk lebih proaktif dalam input data di portal.kkp.go.id sehingga terjadi peningkatan capaian kinerja BPSPL Padang dalam menyampaikan informasi kegiatan setiap triwulannya.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian IKM ini adalah diluncurkannya portal *Collaboration Office* yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Portal ini telah menyediakan layanan pengetahuan yang dapat digunakan untuk membagikan informasi kegiatan berupa berita, infografis, hingga video.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 18.

IKM. 19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

IKM ini menilai rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPSPL Padang berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti, baik berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPSPL Padang yang menjadi objek pengawasan. Capaian IKM ini dihitung dari persentase

jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 s.d triwulan III tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKM 19 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 90. Perbandingan Target dan Capaian IKM 19

IKM. 19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)				
Realisasi	Tahun III 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
100	80	100	125 atau 120 (aplikasi Kinerjaku)	-

Capaian IKM 19 pada tahun 2024 adalah 100%. Capaian tersebut menghasilkan persentase capaian 125% atau 120% berdasarkan persentase maksimal perhitungan aplikasi Kinerjaku. Adapun dalam perkembangannya, hingga triwulan IV 2024 BPSPL Padang telah menindaklanjuti dengan tuntas rekomendasi-rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana terlampir.

Tabel 91. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Hingga Triwulan IV 2024

No	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Objek Pengawasan	Jumlah Rekomendasi	Status
1	Pemantauan	T.44/ITJ.3/HP.550/I/2024	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 pada BPSPL Padang	6	Tuntas
2	Evaluasi	100/ITJ.1/HP.430/V/2024	Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	4	Tuntas

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
3096	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	100/ITJ.1/HP.430/V/2024	2024-05-28	Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	TUNTAS	Q Detail
2090	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Pemantauan	T.44/ITJ.3/HP.550/V/2024	2024-01-25	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
2608	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.439/ITJ.3/HP.470/V/2023	2023-08-31	Laporan Hasil Evaluasi PMSB TA 2022-2023 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
2686	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.427/ITJ.3/HP.430/V/2023	2023-08-29	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
2487	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.162/ITJ.3/HP.496/V/2023	2023-04-14	Laporan Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
2386	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Audit	T.82/ITJ.3/HP.110/I/2023	2023-10-21	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
2143	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.238/ITJ.3/HP.430/V/2022	2022-09-07	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2022 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
1875	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Audit	T.85-ATJ.3/HP.110/I/2022	2022-03-30	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2021 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
1517	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	4906/ITJHP.322/V/2021	2021-04-19	Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Tracking Mangrove pada Sektor Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang di Provinsi Sumatera Barat	TUNTAS	Q Detail
1510	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Pemantauan	4905/ITJHP.550/V/2021	2021-04-13	Pemantauan Pemantauan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang	TUNTAS	Q Detail
1497	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	5075/ITJHP.440/V/2021	2021-07-19	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir (BPSPL) Padang Tahun 2021	TUNTAS	Q Detail
351	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Pemantauan	4143/ITJHP.550/V/2019	2019-08-28	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBKM pada BPSPL Padang, Provinsi Sumatera Barat	TUNTAS	Q Detail

Gambar 123. Status Tindak Lanjut Hasil Pemantauan terhadap BPSPL Padang
(Sumber: Aplikasi SIDAQ, Januari 2025)

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BtAPw3C2LEDJlqL9SpIcKov5cDajaRAa>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan perbandingan dengan capaian tahun 2023, tidak terdapat kenaikan karena pada kedua periode Indikator Kinerja ini memiliki capaian yang sama.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja memiliki target 80 pada tahun 2024. Dalam hal ini, persentase capaian BPSPL Padang pada triwulan IV 2024 telah mencapai 125% dari target Renstra DJPRL dan tahun 2024.

Tabel 92. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 19 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	60	65	70	75	80

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 93. Perbandingan Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80	100	80	100

Berdasarkan perbandingan capaian antara dua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak telah mencapai Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan melampaui target, yaitu dengan realisasi 100%. Dalam hal ini, kedua unit kerja telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM 19 didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Padang. Dalam tindak lanjutnya, tim BPSPL Padang dimudahkan dengan adanya aplikasi SIDAK <https://sidak.kkp.go.id/> yang dapat menampilkan data temuan beserta status tindak

lanjutnya. Dalam hal ini, penanggung jawab temuan harus menindaklanjuti catatan dari Inspektorat Jenderal sesuai dengan waktu yang ditentukan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pencapaian IKM 14 melalui penggunaan aplikasi SIDAK <https://sidak.kkp.go.id/> yang memudahkan BPSPL Padang dan tim Inspektorat Jenderal untuk memantau proses tindak lanjut hasil pengawasan. Aplikasi SIDAK juga telah mengakomodir penyampaian dokumen tindak lanjut tersebut sehingga dokumentasi menjadi lebih terarsip dengan rapi.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKM 19 dapat ditunjang oleh adanya upaya pendampingan oleh APIP terhadap kegiatan di BPSPL Padang. Dengan adanya pendampingan tersebut, ke depannya BPSPL Padang dapat meminimalisir jumlah temuan pada kegiatan serupa.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 19.

IKM. 20. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Padang (%)

Temuan LHP BPK BPSPL Padang yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Padang Tahun 2023. Capaian IKM ini dihitung dari persentase perbandingan jumlah temuan LHP yang diselesaikan dengan Jumlah temuan, sebagaimana rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Padang yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK BPSPL Padang}} \times 100\%$$

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKM 20 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 94. Perbandingan Target dan Capaian IKM 20

IKM. 20. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Padang (%)				
Tahun 2024				
Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
Tahun 2023				
100	100	100	100	-

Capaian IKM 20 adalah 100%. Pada tahun 2024, tidak terdapat pemeriksaan oleh BPK terhadap BPSPL Padang sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 100%.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qEz1e1RQ39GyotgmJMTZ1z4P0lu8-jdF>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tidak terdapat kenaikan capaian pada tahun 2024 karena pada kedua periode Indikator Kinerja ini memiliki realisasi capaian yang sama. Pada tahun 2023 lalu pun tidak terdapat pemeriksaan oleh BPK.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan secara langsung dengan indikator ini.

Tabel 95. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 20 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1

Dalam hal ini, Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Persentase Penyelesaian Temuan tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 96. Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK (%)	100	100	100	100

Berdasarkan perbandingan capaian antara dua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak telah mencapai Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK sesuai target, yaitu dengan realisasi 100%. Dalam hal ini, tidak terdapat pemeriksaan oleh BPK pada kedua unit kerja tersebut.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Perlu dilakukan pengawasan secara berjenjang dalam penggunaan anggaran oleh Kepala BPSPL Padang. Setiap pertanggungjawaban keuangan harus mencantumkan bukti otentik dan konfirmasi langsung kepada pengguna anggaran. Sebagai antisipasi, BPSPL Padang perlu senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya dengan disertai penerapan nilai-nilai akuntabilitas untuk meminimalisir temuan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan anggaran, terdapat efisiensi pada penggunaan Pemegang Uang Muka Kegiatan sebagai upaya mencegah penggunaan anggaran yang melebihi pagu. Selain itu, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan juga telah dilaksanakan secara berjenjang.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKM 20 dapat ditunjang dengan adanya evaluasi kinerja dan anggaran yang dilaksanakan setiap triwulannya. Pada kesempatan tersebut, dibahas secara tuntas perkembangan isu yang terdapat di BPSPL Padang, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam hal ini, BPSPL Padang memperhatikan aspek kinerja dan referensi keuangan yang sesuai.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 20.

IKM. 21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang (%)

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis adalah suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain:

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. memiliki anggaran besar;
- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- f. pertimbangan lainnya.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan prioritas atau bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya yaitu bantuan konservasi. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan nilai yang telah disepakati pada pleno hasil penilaian evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Adapun nilai efektivitas diperoleh dari rumus perhitungan **Efektivitas = 80% Pencapaian Tujuan + 10% Integrasi + 10% AT**.

Keterangan:

PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target

IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah

AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Nilai efektivitas tersebut terbagi ke dalam kategori sebagai berikut:

1. predikat AA dengan nilai >90-100 dengan kategori Memuaskan;
2. predikat A dengan nilai >80-90 dengan kategori Efektif;
3. predikat B dengan nilai >60-80 dengan kategori Cukup Efektif;
4. predikat C dengan nilai >40-60 dengan kategori Kurang Efektif;
5. predikat D dengan nilai 0-40 dengan kategori Tidak Efektif.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKM 21 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 97. Perbandingan Target dan Capaian IKM 21

IKM. 21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang (%)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
100	80	100	125 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerja KKP	-

Capaian Indikator Kinerja ini adalah 100% dengan persentase capaian 125% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerja KKP yang didukung oleh hasil evaluasi terhadap penerima bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) tahun anggaran 2023, yaitu Kelompok Poseidon Diver Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Banyu Biru di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kelompok Masyarakat Pengawas Hiu Macan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1udamSkAOf7dAIA09Gq1FssXTXYaxWezi>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan perbandingan capaian dengan tahun 2023, tidak terdapat kenaikan karena pada kedua periode Indikator Kinerja ini memiliki capaian yang sama.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah juga tidak termuat dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 98. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Bantuan Pemerintah dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah (%)	80	100	80	100

Berdasarkan perbandingan capaian antara dua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak telah mencapai Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah melampaui target, yaitu dengan

realisasi 100%. Dalam hal ini, kelompok konservasi penerima bantuan konservasi binaan kedua unit kerja tersebut telah memenuhi unsur-unsur penilaian efektivitas berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM 21 didukung oleh pemahaman menyeluruh terkait aspek-aspek pengukuran efektivitas bantuan pemerintah. Selain itu, kooperasi dari kelompok penerima bantuan dalam menyampaikan data dukung, informasi, dan keterangan yang benar juga dapat menunjang pengukuran yang menyeluruh dan akuntabel. Dalam hal ini, BPSPL Padang telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kelompok sebelum melakukan peninjauan langsung di lapangan untuk mempersiapkan kelompok. Di samping itu, pelibatan dinas sebagai mitra juga dapat mendukung upaya pembekalan kepada kelompok lebih menyeluruh.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, Efisiensi terdapat pada kegiatan pra-monev yang dilakukan secara daring. Pada kesempatan tersebut, verifikator BPSPL Padang melakukan diskusi dan wawancara dengan perwakilan kelompok dengan mengacu pada Kertas Kerja Evaluasi yang menjadi acuan penilaian. Dalam hal ini, pra-monev dapat membantu identifikasi masalah lebih awal sehingga pelaksanaan pemantauan langsung dapat berjalan lebih efisien.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKM 21 dapat didukung oleh hal berikut.

a. Pra-Monev terhadap Kelompok Penerima Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Tahun Anggaran 2023

Pra-monev pengelolaan bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) bertujuan untuk memperoleh gambaran konkret terkait perkembangan pemanfaatan bantuan. Dengan dilaksanakan pra-monev terlebih dahulu, identifikasi permasalahan dapat dilaksanakan lebih cepat sehingga pelaksanaan monev secara langsung dapat efektif fokus pada pendampingan penyelesaian masalah.

b. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan KOMPAK

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan KOMPAK ditargetkan pada tiga kelompok penerima bantuan tahun anggaran 2023, yaitu Poseidon Diver Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kelompok Banyu Biru di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Pokmaswas Hiu Macan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil pemantauan tersebut akan dituangkan ke dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Efektivitas Bantuan Pemerintah.



Gambar 124. Dokumentasi Pemantauan terhadap Kelompok Banyu Biru



Gambar 125. Dokumentasi Pemantauan terhadap Pokmaswas Hiu Macan



Gambar 126. Dokumentasi Pemantauan terhadap Kelompok Poseidon Diver Mentawai

c. Pembahasan Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah lingkup DJPKRL TA 2023

Kegiatan dilaksanakan di Grand Mercure Harmoni, Kota Jakarta Pusat pada 10 s.d. 13 Desember 2024. Adapun pengukuran efektivitas bantuan pemerintah tahun anggaran 2023 mengacu pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dengan aspek penilaian meliputi (tiga) indikator, yaitu pencapaian tujuan (PT), integrasi (IG), dan adaptasi (AT) dengan nilai maksimal 100.

Pada sesi pembahasan, Tim BPSPL Padang memaparkan perihal bantuan KOMPAK lingkup BPSPL Padang mencakup kondisi eksisting, permasalahan, dan rekomendasi.

1. Poseidon Diver Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai

Pada tahun 2023 Poseidon Diver Mentawai menerima bantuan berupa peralatan selam SCUBA dan kamera bawah air senilai Rp99.000.500. Hasil penilaian terhadap Poseidon Diver Mentawai adalah 100 yang didukung oleh kapasitas kelompok dalam mengoperasikan bantuan, keaktifan kelompok dalam aktivitas konservasi dan pengembangan kapasitas kelompok. Selain itu, Poseidon Diver Mentawai juga telah berkolaborasi dengan akademisi dan NGO dalam mendukung riset dan konservasi kelautan di Kepulauan Mentawai. Dalam hal ini, Poseidon Diver Mentawai telah memenuhi aspek-aspek penilaian yang disyaratkan dalam KKE.

2. Kelompok Banyu Biru, Kab. Ogan Komering Ilir

Pada tahun 2023 Kelompok Banyu Biru menerima bantuan berupa perlengkapan selam SCUBA dan kamera underwater senilai Rp90.970.000. Hasil penilaian terhadap Kelompok Banyu Biru adalah 100 yang didukung oleh kapasitas kelompok dalam mengoperasikan bantuan, keaktifan kelompok dalam aktivitas konservasi, pengembangan kapasitas kelompok, dan pengembangan kegiatan. Dalam hal ini, Kelompok Banyu Biru telah memenuhi aspek-aspek penilaian yang disyaratkan dalam KKE dan direkomendasikan untuk berkolaborasi dengan klub selam atau stakeholder lainnya dalam melaksanakan kegiatan.

3. Pokmaswas Hiu Macan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pada tahun 2023, Pokmaswas Hiu Macan menerima bantuan berupa boat fiber dan kelengkapannya serta jaket pelampung senilai Rp109.990.000. Hasil penilaian terhadap Pokmaswas Hiu Macan adalah 100 yang didukung adanya upaya perawatan bantuan, kapasitas kelompok dalam mengoperasikan bantuan, keaktifan kelompok dalam patroli pengawasan, dan pengembangan aset. Dalam hal ini, Pokmaswas Hiu Macan telah memenuhi aspek-aspek penilaian yang disyaratkan dalam KKE dan direkomendasikan untuk mulai berkolaborasi dengan stakeholder lain.

Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2023 kemudian disampaikan melalui Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor B.6928/DJPKRL.1/TU.140/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024. Adapun perolehan tingkat efektivitas pelaksanaan bantuan pemerintah tahun 2023 lingkup BPSPL Padang adalah 100.



Gambar 127. Dokumentasi Pembahasan Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah lingkup DJPKRL TA 2023

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 21 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.QEH] Bantuan Kelompok Masyarakat dengan Rincian Output (RO) [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 99. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 21

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.QEH.001.053] Pendampingan dan Pembinaan KOMPAK	39.000.000,00	36.718.850,00	94,2
Total		39.000.000,00	36.718.850,00	94,2

Realisasi anggaran pada komponen [2362.QEH.001.053] adalah 94,2%.

IKM. 22. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Padang (Nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari aspek pengelolaan arsip dinamis dan aspek sumberdaya kearsipan. Adapun nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan memiliki kriteria sebagai berikut.

Tabel 100. Kriteria Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	0 – 30

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Rincian target IKM 22 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 101. Perbandingan Target dan Capaian IKM 21

IKM. 22. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi	Tahun 2024			
Tahun 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	65	83,78	128,89 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerja KKP	-

Capaian Indikator Kinerja ini adalah 83,78 dengan persentase capaian 128,89% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerja KKP.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vszkNhOWQKvy9mwQNqWDQjYzsIVVQJMw>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKM ini tidak terdapat pada tahun 2023 sehingga tidak terdapat perbandingan capaian antara tahun 2023 dan 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator Nilai Pengawasan Internal Kearsipan tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan juga tidak termuat dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

D. Perbandingan Antara Realisasi Tahun Berjalan dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Pontianak, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 102. Perbandingan Capaian Nilai Pengawasan Internal Kearsipan dengan BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Pengawasan Internal Kearsipan (Nilai)	65	83,79	65	81,36

Berdasarkan perbandingan Nilai Pengawasan Internal Kearsipan kedua unit kerja, capaian BPSPL Padang lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Pontianak. Dalam hal ini, penilaian aspek pengelolaan arsip dinamis dan SDM kearsipan BPSPL Padang lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Pontianak.

Tabel 103. Perbandingan Penilaian Komponen Nilai Pengawasan Internal Kearsipan

Unit Kerja	Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis	Nilai Aspek Sumber Daya Kearsipan	Total
BPSPL Padang	50,00	33,78	83,78
BPSPL Pontianak	48,28	33,08	81,36

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh pengelolaan arsip yang memenuhi kriteria penilaian. Dalam hal ini, pengelolaan arsip yang selaras didukung oleh sumber daya manusia dan sarana yang menunjang pengelolaan arsip.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada penggunaan fitur Korespondensi pada laman portal.kkp.go.id yang membantu proses persuratan secara sistematis.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pengelolaan arsip didukung dengan kecakapan dan keterampilan arsiparis dalam pengelolaan arsip. Selain itu, pemahaman pegawai BPSPL Padang dalam menggunakan fitur Korespondensi pada aplikasi *Portal Collaboration Office* dalam persuratan juga dapat mendukung pengelolaan arsip lingkup BPSPL Padang.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 22.

3. 2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pencapaian target-target kinerja, pada tahun 2024 ini BPSPL Padang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA 032.07.2.499346/2024 sebesar **Rp17.622.716.000,00** (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 88,14% bersumber dari Rupiah Murni sementara 11,86% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pagu anggaran tersebut telah mengalami dinamika blokir dan penambahan anggaran pada tahun anggaran 2024. **Hingga triwulan IV 2024, realisasi anggaran mencapai Rp17.394.164.610,00** (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) **dengan persentase 98,7%**. Adapun realisasi anggaran BPSPL Padang secara rinci disajikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 104. Realisasi Anggaran BPSPL Padang Hingga Triwulan IV 2024

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang		17.622.716.000,00	17.394.164.610,00	98,70
2362 Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut				
2362.PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	50.000.000,00	49.830.920,00	99,7
2362.PEC.001	Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	70.000.000,00	68.126.978,00	97,3
2362.QEH.001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	400.000.000,00	397.071.682,00	99,3
2362.RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	172.800.000,00	172.265.600,00	99,7
2362.REB.001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	900.000.000,00	889.604.013,00	98,8
2362.REB.002	Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan	1.227.200.000,00	1.180.024.959,00	96,2
2362.SCC.002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya	200.000.000,00	194.605.775,00	97,3
2362.UBA.001	Pemerintah Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	150.000.000,00	132.373.967,00	88,2
2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan				
2363.PBW.002	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	100.000.000,00	98.033.999,00	98
4346 Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
4346.QDD.001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	800.000.000,00	791.390.836,00	98,9
2366 Perencanaan Ruang Laut				
2366.PBT.009	Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	1.100.000.000,00	1.056.265.852,00	96
2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut				

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2367.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	287.000.000,00	286.225.650,00	99,7
2367.EBA.956	Layanan BMN	62.500.000,00	60.707.331,00	97,1
2367.EBA.957	Layanan Hukum	210.000.000,00	195.458.144,00	93,1
2367.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	44.233.000,00	43.248.063,00	97,8
2367.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	209.600.000,00	206.800.509,00	98,7
2367.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.992.716.000,00	10.933.191.622,00	
2367.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	325.367.000,00	323.605.900,00	99,5
2367.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	154.500.000,00	153.929.226,00	99,6
2367.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	88.000.000,00	82.789.987,00	94,1
2367.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	78.800.000,00	78.613.597,00	99,8

IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengukuran kinerja hingga periode Tahun 2024, terdapat 22 Indikator Kinerja (IK) di lingkup BPSPL Padang dengan jangka waktu target bersifat triwulanan, semesteran, dan tahunan yang juga disampaikan perkembangan kegiatannya. Adapun hasil pengukuran kinerja menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://kinerjaku.kkp.go.id/> menunjukkan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang pada triwulan IV 2024 adalah 111,12 (kategori istimewa).**

Berikut disampaikan capaian masing-masing indikator kinerja BPSPL Padang tahun 2024:

1. Nilai PNBP BPSPL Padang dengan target Rp650.000.000,00 telah tercapai dengan perolehan PNBP sebesar Rp1.087.770.503,00 dengan persentase capaian 167,35% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 320 Orang telah tercapai dengan keterlibatan nelayan sejumlah 323 orang dengan persentase capaian 100,94%. Dari 323 orang nelayan Bulan Cinta Laut BPSPL Padang, 18 orang di antaranya (5,57%) berjenis kelamin perempuan.
3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 3 Dokumen telah tercapai sesuai target dengan persentase capaian 100%.
4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 3 Daerah telah tercapai melampaui target dengan pendampingan terhadap 6 provinsi dengan persentase capaian 200% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
5. Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 1 Kesepakatan telah tercapai melampaui target dengan 2 Kesepakatan dengan persentase capaian 200% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 3 Kelompok telah tercapai sesuai target dengan persentase capaian 100%.
7. Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru dengan target 30 orang telah tercapai melampaui target dengan capaian 45 orang dengan persentase capaian 150% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP. Dari 45 orang masyarakat yang difasilitasi pengembangan mata pencahariannya, 12 orang di antaranya (26,67%) berjenis kelamin perempuan.
8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 8 jenis telah tercapai melampaui target dengan capaian 11 jenis dengan persentase capaian 137,5% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 5 jenis telah tercapai melampaui target dengan capaian 8 jenis dengan persentase capaian 160% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 1 Dokumen telah tercapai sesuai target dengan persentase capaian 100%.
11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 4 Kawasan telah tercapai sesuai target dengan persentase capaian 100%.
12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 93,76 telah tercapai dengan nilai 99,61 atau 106,25% dari target.
13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Nilai) lingkup BPSPL Padang dengan target 71 telah tercapai dengan nilai 98,32 dengan persentase capaian 138,48% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.

14. Nilai Unit Kerja Berpredikat menuju WBK di BPSPL Padang dengan target 75 telah tercapai dengan capaian 90,40 dengan persentase capaian 120,53% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang dengan target 88 telah tercapai dengan capaian 92,85 dengan persentase capaian 105,51%.
16. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang dengan target 81 telah tercapai dengan capaian 89,85 dengan persentase capaian 110,93%.
17. Laporan SPIP yang Disusun lingkup BPSPL Padang telah mencapai 4 dokumen sesuai dengan targetnya dengan persentase capaian 100%.
18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah mencapai 133,33% dari target 94% dengan persentase capaian 141,84% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan telah mencapai 100% dari target 80% dengan persentase capaian 125% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Padang telah mencapai 100% dari target 100% dengan persentase capaian 100%.
21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang dengan target 80% telah tercapai 100% dengan persentase capaian 125% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.
22. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Padang dengan target 65 telah tercapai dengan capaian 83,78 dengan persentase capaian 128,89% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP.

Berdasarkan uraian capaian tersebut, BPSPL Padang telah mencapai seluruh indikator kinerja tahun 2024 dengan persentase $\geq 100\%$. Pencapaian tersebut juga didukung dengan adanya alokasi **pagu anggaran sejumlah Rp17.622.716.000,00** (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 88,14% bersumber dari Rupiah Murni sementara 11,86% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Komposisi pagu anggaran tahun 2024 telah mengalami dinamika berupa blokir senilai Rp659.800.000,00 yang disebabkan adanya Rencana Desain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sehingga perlunya penyesuaian KRO yang kemudian dibuka pada Maret dan Juni 2024, penambahan belanja pegawai sejumlah Rp717.856.000,00, dan blokir penghematan belanja perjalanan dinas senilai Rp98781.000,00 hingga akhir tahun anggaran. **Hingga triwulan IV 2024, realisasi anggaran mencapai Rp17.394.164.610,00** (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) **dengan persentase 98,7%**.

Dalam perkembangannya, tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian target tahun 2024. Namun demikian, terdapat hal yang perlu didorong pelaksanaannya untuk mendukung kinerja BPSPL Padang pada tahun mendatang.

4.2. Rekomendasi

A. Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan III 2024

Rekomendasi pada triwulan III 2024 adalah melaksanakan pendampingan pengusulan penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Aceh. Dalam upaya tindak lanjutnya, BPSPL Padang telah melaksanakan pendampingan pengusulan penetapan kawasan konservasi di Provinsi Aceh melalui pendampingan pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Simeulue pada tahapan Rapat Persiapan Survei Biofisik, Survei Biofisik dan Sosial Ekonomi, Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Simeulue, dan Konsultasi Teknis.

B. Rekomendasi Tahun 2025

Langkah yang dapat dilakukan pada tahun 2025 adalah melaksanakan dialog kinerja untuk membahas penjenjangan kinerja serta kegiatan yang terdampak oleh blokir anggaran.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Tahun 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL sespridirenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fajar Kurniawan**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang

Fajar Kurniawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PADANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNB BPSPL Padang	1.	Nilai PNB BPSPL Padang (Rp.000)	650.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	320
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)	3
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Padang	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)	3
		7.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Kelompok)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Padang	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	8
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Padang	10.	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	1
10.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	4
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Padang	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang (Nilai)	86
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Padang (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		18.	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	80
		22. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Padang (nilai)	65

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.100.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	3.170.000.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	800.000.000
4.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	100.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	11.734.860.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2024		16.904.860.000

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor ~~Guetaaf~~ Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang

Fajar Kurniawan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fajar Kurniawan**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang



Fajar Kurniawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PADANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Padang	1.	Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)	650.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	320
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)	3
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Padang	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)	3
		7.	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang)	30

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Padang	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	8
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Padang	10.	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	1
10.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	4
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Padang	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Padang (Nilai)	71
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Padang (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		18.	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94

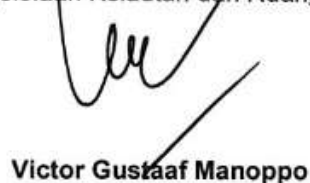
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	80
		22. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Padang (nilai)	65

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.100.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	3.170.000.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	800.000.000
4.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	100.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	11.734.860.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2024		16.904.860.000

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang



Fajar Kurniawan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridinengprk@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fajar Kurniawan**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

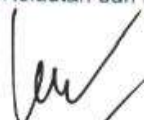
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang


Fajar Kurniawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PADANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Padang	1.	Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)	650.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	320
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)	3
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Padang	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)	3
		7.	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang)	30

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Padang	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	8
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Padang	10.	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	1
10.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	4
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Padang	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Padang (Nilai)	71
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Padang (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		18.	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	80
		22.	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Padang (nilai)	65

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.100.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	3.170.000.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	800.000.000
4.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	100.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	12.452.716.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2024		17.622.716.000

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang

Fajar Kurniawan

Lampiran 2. Sertifikat BPSPL Padang

Certificate of Registration



Registration No. : QAIC / ID / 11112 - A
Q.A. Indonesia Certification
Hereby grants to:

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

(hereinafter called the Registered Institution) the right to be listed in the Directory of Registered Institution in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Institution at or form only the address given below in accordance with the Quality Management System in compliance with ISO 9001:2015.

Address to which this Certificate refers :

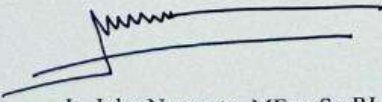
**Jl. Raya Pertanian, Sei Duo - Sungai Lareh, Lubuk Minturun,
Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat**

Approved Scope to which this Certificate refers:

**Provision of Public Administration in Monitoring Trading Traffic of Endangered
and Protected Fish**

*(Further clarification regarding the Scope of this Certificate and the applicability of ISO 9001:2015
requirement may be obtained by consulting the organization)*

For and on behalf of QA Indonesia



Ir. Joko Nursapto, MEng.Sc-RLA

Certificate Issue Date : 02 February 2023 - Re-assessment Date : 02 February 2024
Date of Initial Registration : 02 February 2023 - Certificate Expiry Date : 02 February 2026
This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Governing Board.

QA INDONESIA CERTIFICATION
Address: Jl. Surabaya No.11, Menteng, Jakarta 10310
Telp: 021 - 21230866
Email: admin@qai.co.id
Website: www.qai.co.id



Registration No : QAIC / ID / 11112 – A

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

Location

Jl. Raya Pertanian, Sei Duo - Sungai Lareh, Lubuk Minturun, Kec. Koto Tengah, Kota Padang,
Sumatera Barat

Registered Activities :

1. Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri
2. Surat Rekomendasi

Certificate Issue Date : 02 February 2023 - Re-assessment Date : 02 February 2024
Date of Initial Registration : 02 February 2023 - Certificate Expiry Date : 02 February 2026

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by The Governing Board

QA INDONESIA CERTIFICATION

Address: Surabaya St No.11, Menteng, Jakarta 10310
Telp: 021 - 21230866
Email: admin@qai.co.id
Website: www.qai.co.id





Certificate of Registration

Registration No. : QAIC / ID / 11112 - E
QAI Indonesia Certification
Hereby grants to:

**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
PADANG**

**Jl. Raya Pertanian, Sei Duo - Sungai Lareh, Lubuk Minturun,
Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat**

(hereinafter called the Registered Institution) the right to be listed in the Directory of Registered Institution in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Institution at or from only the address given below in accordance with the Anti-bribery Management System in compliance with

ISO 37001:2016

Approved Scope to which this Certificate refers:

Provision of Public Administration in Monitoring Trading Traffic of Endangered and Protected Fish

(Further clarification regarding the Scope of this Certificate and the applicability of ISO 37001:2016 requirement may be obtained by consulting the organization)
For and on behalf of QA Indonesia



Ir. Joko Nursapto, MEng.Sc-RLA

Certificate Issue Date : 05 April 2024 - Re-assessment Date : 05 April 2025
Date of Initial Registration : 05 April 2024 - Certificate Expiry Date : 05 April 2027
This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Governing Board.

**QAI INDONESIA
CERTIFICATION**
Address: Jl. Surabaya No.11, Menteng,
Jakarta, 10310
Telp: 021 - 21230866
Email: admin@qai.co.id
Website QAI: www.qai.co.id
Website Accreditor: www.ascb.com







Lampiran 3. Penghargaan BPSPL Padang





